

Kode>Nama Rumpun Ilmu*: 571/ Manajemen

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PRODUK TERAPAN**



**Analisis Financial Distress Dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Publik
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang**

TIM PENGUSUL

Hendri Duan, SE. MM

NIDN: 0230096501

Dra. Farida Efriyanti, MM

NIDN0027046101

Dibiayai Oleh:

**Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017**

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

Oktober 2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Financial Distress Dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah KabupatenTulang Bawang.

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : HENDRI DUNAN, S.E., M.M.
Perguruan Tinggi : Universitas Bandar Lampung
NIDN : 0230096501
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Manajemen
Nomor HP : 085279490101
Alamat surel (e-mail) : minak.kiay@yahoo.com

Anggota (1)
Nama Lengkap : Dra. FARIDA EFRIYANTI M.M.
NIDN : 0027046101
Perguruan Tinggi : Universitas Bandar Lampung

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 73,068,000
Biaya Keseluruhan : Rp 146,273,000

Mengetahui,
Dekan FEB

(DR. Andala Rama Putra Barusman, SE., MA.
Ec.)
NIP/NIK 197409252005011002

LAMPUNG, 30 - 10 - 2017
Ketua,

(HENDRI DUNAN, S.E., M.M.)
NIP/NIK 0230096501

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

(IP Elias Widodojoko, MT.)
NIP/NIK 196605221986022001



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)
Jl. Z.A. Pagar Alam No : 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp: 701979
E-mail : lppm@ubl.ac.id

SURAT TUGAS

No: 101 / LPPM-UBL / VII / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : Drs. Soewito, SE.,M.M
2. Jabatan : Sekretaris LPPM UBL

Memberi Tugas Kepada:

1. a. N a m a : Dr. Hendri Dunan, SE, M.M
- b. NIDN : 0025076008

Untuk Memberikan Penyuluhan tentang Kepemimpinan kepada Ketua Lingkungan dan Ketua Rt se-Kelurahan Rajabasa Nyunyai pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juli 2018
Waktu : pkl. 09.00 s.d Selesai
Tempat : Aula Kantor Kelurahan Rajabasa Nyunyai, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan.

Bandar Lampung, 12 Juli 2018
Sekretaris LPPM-UBL



Drs. Soewito.,M.M

Tembusan:

1. Bapak Rektor UBL (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Jl. Z.A. Pagar Alam No : 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp: 701979
E-mail : lppm@ubl.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 117 / S.Ket / LPPM-UBL / VIII / 2018

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bandar Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. N a m a | : Dra. Farida Efriyanti, M.M |
| 2. NIDN | : 0027046101 |
| 3. Tempat, tanggal lahir | : Pulau Panggung, 27 April 1961 |
| 4. Pangkat, golongan ruang, TMT | : Pembina / IV.a Tmt April 2000 |
| 5. Jabatan | : Lektor Kepala 01 Oktober 2000 |
| 6. Bidang Ilmu | : Manajemen |
| 7. Jurusan / Program Studi | : Manajemen/Manajemen dan Bisnis |
| 8. Unit Kerja | : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UBL. |

Telah melaksanakan Penelitian dengan Judul

:"Analisis Financial Distress dan dampaknya terhadap pelayanan publik pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 08 Agustus 2018
Kepala LPPM-UBL

UBL
LPPM
Dr. Hendri Dunan, SE., M.M

Tembusan:

1. Rektor UBL (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

**ANALISIS FINANCIAL DISTRESS DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kondisi kesulitan keuangan (financial distress) di Kabupaten Tulang Bawang. Financial distress diinterpretasikan sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan fasilitas pelayanan public pada level yang layak.

Beberapa indikator digunakan memprediksi terjadinya financial distress, yaitu komposisi pendapatan, komitmen keuangan, populasi penduduk, dan fenomena pemekaran wilayah yang terjadi di Indonesia dan pelayanan publik.

Kabupaten Tulang Bawang dipilih sebagai sampel dan obyek penelitian dan sampel penelitian.

Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang masih rendah rata-rata 8,99% antara Tahun 2012-2016. Beberapa rasio lainnya menunjukkan trend yang meningkat yaitu ratio kemandirian, ratio efektivitas, ratio efisiensi, dan debt service coverage ratio (DSCR) rata-rata 2,5%, artinya fasilitas pelayanan publik perlu ditingkatkan dengan mengurangi belanja pegawai seminimal mungkin.

Kata kunci: Desentralisasi, Financial Distress, Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, DSCR, dan Pelayanan Publik.

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Laporan Kemajuan Penelitian ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Bagi peneliti, penyusunan Laporan Kemajuan Penelitian ini yang berjudul “Analisis Financial Distress dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Peneliti sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan laporan ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti sendiri. Kalaupun pada akhirnya laporan ini dapat terselesaikan tentulah karena beberapa pihak yang telah membantu dalam penulisan penelitian ini. Oleh Karena itu penulis sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya.

Bandar Lampung, Oktober 2017

Tim Peneliti,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	2
1.3. Ruang Lingkup Masalah	2
1.4. Permasalahan Penelitian	2
1.5. Hasil Penelitian	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. KajianTeori	4
2.1.1. Otonomi Daerah	4
2.1.2. Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah	4
2.1.3.Financial Distress	5
2.2. Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap Prediksi Financial Distress	5
2.2.1. Pengaruh Derajat Desentralisasi erhadap Prediksi Financial Distress	6
2.2.2. Pengaruh RasioSolvabilitasTerhadap Prediksi Financial Distress	6
2.2.3. Pengaruh KompleksitasTerhadapPrediksi Financial Distress.....	7
2.2.4. PengaruhPemekaran Wilayah Terhadaf Financial Distress	7
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
3.1. Tujuan Penelitian	9
3.2. Manfaat Penelitian	9
BAB IV. METODE PENELITIAN	10
4.1. Objek Penelitian	10
4.2. Teknik Pengumpulan Data	10
4.3. Organisasi Variabel Penelitian	10
4.4. Model Penelitian	13
4.5. Metode Analisis	14
BAB V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	16
5.1. Analisis	16
5.1.1. Analisis Tingkat Kemandirian Kabupaten Tulang Bawang	16
5.1.2. Analisis Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Tulang Bawang	25
5.1.3. Analisis Efektivitas Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang	30

5.1.4. Analisis Efisiensi Daerah Kabupaten Tulang Bawang.....	35
5.1.5. Analisis DSCR Kabupaten Tulang Bawang.....	40
5.1.6. Analisis Pertumbuhan PAD Kabupaten Tulang Bawang.....	46
	53
5.2. Pembahasan.....	
5.2.1 Analisis Rasio KeuanganA PBD	53
5.2.1.1. Resiko Kemandirian	54
5.2.1.2. Indeks Kemampuan Rutin	55
5.2.1.3. Rasio Efektivitas	55
5.2.1.4. Rasio Efisiensi	56
5.2.1.5. Debt Service Coverage Ratio (DSCR).....	56
5.2.1.6. Rasio Pertumbuhan	57
5.2.2. Hubungan Antar Rasio	61
BAB VI. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	63
BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN	64
7.1. Kesimpulan.....	64
7.2. Keterbatasan.....	65
7.3. Saran.....	65

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1.	Rencana Target Capaian Tahunan	3
Tabel 5.1.	Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012.....	17
Tabel 5.2.	Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013.....	18
Tabel 5.3.	Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014.....	19
Tabel 5.4.	Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015.....	21
Tabel 5.5.	Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016.....	22
Tabel 5.6.	Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	23
Tabel 5.7.	Trend Perkembangan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.	24
Tabel 5.8.	Proyeksi Perkembangan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2017-2021.....	24
Tabel 5.9	Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	28
Tabel 5.10.	Trend Perkembangan Tingkat Kemandirian Rutin Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	29
Tabel 5.11.	Proyeksi Perkembangan IKR Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2017-2021	29
Tabel 5.12.	Tingkat Efektifitas Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	32
Tabel 5.13.	Trend Perkembangan Tingkat Efektifitas Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	34
Tabel 5.14.	Proyeksi Perkembangan Tingkat Efektifitas Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2017-2021.....	35
Tabel 5.15.	Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012 2016.....	38
Tabel 5.16.	Trend Perkembangan Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	39
Tabel 5.17.	Perkembangan Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2017-2021.....	40
Tabel 5.18.	DSCR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	44
Tabel 5.19.	Trend Perkembangan DSCR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	45

Tabel 5.20.	Proyeksi Perkembangan DSCR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2017-2020.....	46
Tabel 5.21.	Ringkasan Perhitungan PAD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2013.....	47
Tabel 5.22.	Ringkasan Perhitungan PAD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013 dan 2014.....	48
Tabel 5.23.	Ringkasan Perhitungan PAD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014-2015.....	49
Tabel 5.24.	Ringkasan Perhitungan PAD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015-2016.....	50
Tabel 5.25.	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	51
Tabel 6.1.	Rencana Capaian Tahunan.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 1.1	Fishbone Diagram Penelitian	13
Gambar 1.2	Road Map Penelitian	14
Gambar 5.1.	Rasio Kemandirian Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012 2016.....	23
Gambar 5.2.	Perbandingan PAD dan Belanja Rutin Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012 2016	28
Gambar 5.3.	IKR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016....	28
Gambar 5.4.	Rasio Efektifitas Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016	33
Gambar 5.5.	Rasio Efisiensi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016	38
Gambar 5.6.	DSCR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	44
Gambar 5.7.	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	52
Gambar 5.8.	Analisis Rasio Keuangan Pemda Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012 2016.....	58
Gambar 5.9.	Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	58
Gambar 5.10.	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	59
Gambar 5.11.	Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang 2012-2016.....	60

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, keberhasilan program ini mulai banyak dipertanyakan. Otonomi daerah yang tadinya diharapkan mampu memperbaiki masalah ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, justru menimbulkan masalah baru akibat penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Adanya temuan lembaga independen yang ikut mengawasi pelaksanaan otonomi daerah juga telah menyebutkan bahwa kini kondisi keuangan daerah cenderung kritis dan mengkhawatirkan. Kecenderungan kritis dan mengkhawatirkan ini ditandai dengan adanya fenomena pegawai yang lebih besar dibandingkan dengan belanja-belanja lainnya antara 60-70% dari pendapatan daerah, penataan dan pengembangan sumber daya dan aset daerah yang belum optimal dan adanya disparitas pembangunan wilayah khususnya kota/kabupaten antar provinsi masih timpang.

FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi) menyebutkan pada tahun 2012 terdapat 291 pemerintah daerah yang memproyeksikan belanja pegawai lebih dari 50 persen, yang artinya sisa anggaran yang masih tersedia untuk belanja program dalam rangka memenuhi pelayanan publik hanya sebesar 9 persen sampai 14 persen (*seknasfitra.org*, 2013). Perilaku boros pemerintah daerah yang menguras separuh lebih anggarannya hanya untuk belanja pegawai dikhawatirkan akan mengantarkan pemerintah daerah pada kondisi kebangkrutan. Pemiaraan terjadinya rekrutmen pegawai secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah akan berdampak pada berkurangnya dana untuk membangun fasilitas publik, percepatan pembangunan daerah, penciptaan pelayanan yang berkualitas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam kebijakan otonomi daerah.

Pada sektor swasta *financial distress* didefinisikan sebagai kegagalan untuk memenuhi komitmen keuangan, berupa ketidaksanggupan melunasi pinjaman, kegagalan membayar dividen (atau bahkan pengurangan jumlah pembayaran dividen), kekurangan modal kerja, dan ketidakcukupan dana untuk membayar sejumlah biaya perusahaan (Foster, 1986; Lau, 1987; Ward, 1994; Jones and Hensher, 2004, Luo and Yu, 2011). Pada sektor publik, Jones dan Walker (2007) mendefinisikan *financial distress* sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan ini dikarenakan pemerintah tidak memiliki kecukupan

dana untuk membangun infrastruktur pelayanan publik, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi dan fasilitas publik lainnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengembangkan indikator untuk memprediksi *financial distress*. Pada sektor swasta, rasio-rasio keuangan digunakan untuk memprediksi ketidakpastian atau kepailitan sebuah perusahaan (Platt and Platt, 2002; Jones and Hensher, 2004, Luo and Yu, 2011). Pada sektor pemerintahan, Jones dan Walker (2007) menggunakan dua indikator untuk memprediksi *financial distress* negara bagian di Australia, yaitu indikator keuangan dan non-keuangan. Indikator keuangan terdiri dari: (1) besaran dana yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur pelayanan publik dan (2) rasio-rasio kinerja keuangan, sedangkan indikator non keuangan terdiri dari: (1) karakteristik dewan dan (2) kualitas pelayanan publik.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun hasil identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Secara merata diseluruh Indonesia perilaku boros pemerintah daerah yang mengurus separuh lebih anggarannya untuk belanja pegawai lebih dari 50%.
2. Sisa anggaran yang masih tersedia untuk belanja program dalam rangka memenuhi pelayanan publik hanya sebesar 9% sampai dengan 14%.
3. Terjadinya pemborosan anggaran daerah akan berdampak pada berkurangnya dana untuk membangun fasilitas publik, percepatan pembangunan daerah, penciptaan pelayanan yang berkualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah pada penelitian ini hanya dibatasi pada financial distress keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang yang dijadikan objek penelitian, dimana financial distress diukur dengan rasio-rasio keuangan berdasarkan data LKPD. Dari tahun anggaran 2013-2014 dan 2014-2015 serta data-data dari sumber lainnya.

1.4. Permasalahan Penelitian

Apakah analisis financial distress dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya penurunan terhadap fasilitas pelayanan publik dan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang?.

1.5. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian yang akan didapatkan dari penelitian ini antara lain :

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dibidang manajemen keuangan publik.
2. Memberikan informasi yang akurat tentang kemungkinan terjadinya financial distress keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat membantu para pemangku kepentingan (stake holder) dalam pembuatan tata kelola keuangan pemerintah daerah.
3. Meningkatkan kualitas implementasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas keuangan publik
4. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional yang terakreditasi dan seminar lokal maupun nasional.

Tabel 1.1
Rencana Target Capaian Tahunan

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian			
		TS ¹⁾	TS+1	TS+2	
1	Publikasi ilmiah ²⁾	Internasional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Nasional Terakreditasi	Tidak ada	ada	Tidak ada
2	Pemakalah dalam pertemuan ilmiah ³⁾	Internasional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Nasional	ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Invited Speaker dalam pertemuan ilmiah ⁴⁾	Internasional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Nasional	ada	ada	Tidak ada
4	Visiting Lecturer ⁵⁾	Internasional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ⁶⁾	Patent	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Patent sederhana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Hak Cipta	Tidak ada	ada	Tidak ada
		Merek dagang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Rahasia dagang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Desain Produk Industri	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Indikasi Geografis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Perlindungan Varietas Tanaman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Teknologi Tepat Guna ⁷⁾	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
7	Model/Purwarupa/Desain/Karyaseni/Rekayasa Sosial ⁸⁾	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
8	Buku Ajar (ISBN) ⁹⁾	Tidak ada	ada	Tidak ada	
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) ¹⁰⁾	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing.

2.1.2. Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Bab V UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, serta pemerintah/ lembaga asing. Sementara itu, Bab VI UU No.17 Tahun 2003 mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah terjadi dalam bentuk:

- a. Pengalokasian transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian
- b. Pemberian pinjaman dan/atau hibah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau sebaliknya dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat
- c. Pemberian Pinjaman/hibah/penyertaan modal oleh pemerintah pusat kepada perusahaan daerah atau sebaliknya pemberian pinjaman/hibah oleh perusahaan daerah kepada pemerintah pusat
- d. Pemberian pinjaman/hibah oleh perusahaan negara kepada pemerintah daerah.

2.1.3. Financial Distress

Financial distress atau “kesulitan keuangan” pada sektor swasta didefinisikan sebagai kegagalan untuk memenuhi komitmen keuangan, berupa ketidaksanggupan melunasi pinjaman, kegagalan membayar dividen (atau bahkan pengurangan jumlah pembayaran dividen), kekurangan modal kerja, dan ketidakcukupan dana untuk membayar sejumlah biaya perusahaan (Foster, 1986; Lau, 1987; Ward, 1994; Jones and Hensher, 2004, Luo and Yu, 2011). Pada sektor publik, Jones dan Walker (2007) mendefinisikan *financial distress* sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan ini dikarenakan pemerintah tidak memiliki kecukupan dana untuk membangun infrastruktur pelayanan publik, seperti jalan, jembatan dan fasilitas publik lainnya. Pada pemerintah daerah, *Financial Distress* ditandai dengan tidak terkendalinya pengeluaran yang dilakukan untuk belanja rutin, sehingga pemerintah daerah menekan pengeluaran untuk belanja modal atau belanja investasi.

2.2. Pengaruh kemandirian Keuangan terhadap Prediksi Financial Distress

Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan mengenai hubungan antar organisasi. Sebuah organisasi dipandang memiliki sifat seperti makhluk hidup (organisme) yang survavilitasnya akan tergantung pada lingkungan. Organisasi mengambil sumber daya dari lingkungannya, seperti bahan baku dan tenaga kerja. Organisasi yang mampu menguasai sumber daya vital atau bisa mengurangi ketidakpastian dalam hubungannya dengan organisasi lain akan memiliki kekuatan (power) yang paling besar (Peffer dan Salancik, 1978 dalam Gudono, 2009).

Pada pemerintah daerah, kekuatan (power) sumber daya keuangan dapat tercermin dari besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut. Menurut Undang- Undang, Pemerintah daerah memiliki tiga komponen sumber pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan LainLain. Pemerintah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah rendah akan membutuhkan dana dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sumber dana tersebut diantaranya dapat berasal dari dana transfer pemerintah pusat/provinsi (dana perimbangan).

Sesuai pandangan teori ketergantungan sumber daya, pemerintah daerah yang memiliki kemandirian sumber daya keuangan akan memiliki kekuatan untuk *survive* dan terhindar dari financial distress. Kemandirian keuangan juga telah digunakan oleh peneliti terdahulu

sebagai indikator dalam menilai kinerja keuangan pemerintah (Cheng, 1992; Christiaens, 1999; Christiaens dan Pateghem, 2007). Kloha, Weissert, dan Kleine (2005)

2.2.1. Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Prediksi Fiancial Distress

Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan bahwa organisasi adalah konsekwensi dari kemampuan mereka mempengaruhi, sehingga organisasi yang hidupnya tergantung pada subsidi pemerintah biasanya akan cenderung lebih taat pada perintah (aturan) pemerintah (Pfeffer dan Salancik, 1978 dalam Gudono, 2009). Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah akan bergantung pada transfer dana pemerintah pusat/provinsi, agar dapat mendanai program-programnya. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi dapat menyelenggarakan desentralisasi dengan mengandalkan pendapatan asli daerah lebih banyak, disamping dana transfer (perimbangan).

Jones dan Walker (2007) meneliti financial distress pada pemerintah lokal di negara bagian Australia (New South Wales). Hasil temuannya menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan terhadap dana pemerintah federal diprediksi mengalami financial distress

2.2.2. Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap Prediksi Fiancial Distress

Ketersediaan sumber daya untuk melunasi hutang merupakan sinyal kemampuan organisasi dalam memenuhi komitmen keuangan. Beberapa penelitian terdahulu, baik di sektor bisnis maupun sektor publik, menggunakan hutang sebagai indikator financial distress. Monti dan Garcia (2010) menggunakan *debt turnover ratio*, *non current debt ratio*, *debt coverage* dan *liabilities (average)* untuk memprediksi financial distress jangka pendek perusahaan-perusahaan di Argentina. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan dalam memprediksi financial distress.

Wibowo dan Samekto (2013) menggunakan Current Liability ratio, dan Debt to Revenue ratio sebagai informasi akuntansi relevan dalam mengukur Financial distress pemerintah daerah di Jawa Timur. Penelitiannya menghasilkan adanya hubungan yang cukup kuat dan searah antara ketiga variabel tersebut dengan financial distress. Sutaryo, dkk (2010) menggunakan *Current Liability Government Wealth*, *Current Liabilities*, *Long Term Debt to Total Asset*, dan *Debt to Revenue* sebagai nilai relevan informasi laporan keuangan terkait financial distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel-variabel tersebut.

2.2.3. Pengaruh Kompleksitas terhadap Prediksi Fiancial Distress

Organisasi yang kompleks akan dilengkapi dengan sistem informasi yang lebih canggih (*sophisticated*) dibanding organisasi sederhana (kecil). Pada organisasi yang kompleks terdapat sistem informasi yang efektif untuk menjamin ketersediaan informasi dan mengurangi kos informasi per unit. Sistem informasi yang efektif akan diperlukan pada organisasi yang kompleks untuk mengawasi ketercapaian tujuan organisasi (Hossain, 2008). Kompleksitas pada riset akuntansi pemerintahan diukur dengan menggunakan proksi populasi penduduk suatu wilayah pada periode tertentu (Ingram, 1984; Robbins dan Austin, 1986; Evans dan Patton, 1987; Cheng, 1992; Christiaens, 1999; Christiaens dan Pateghem, 2007). Populasi dianggap sebagai ukuran pembayaran transfer pemerintah berkaitan dengan jumlah sumber daya yang mungkin dapat disalahgunakan oleh pejabat pemerintah (agen). Jadi kota dengan populasi yang lebih besar diperkirakan akan menghasilkan kinerja yang lebih baik karena lebih banyak sumber daya yang dipertaruhkan (Evans dan Patton, 1987).

Christiaens (1999) dan Christiaens dan Pateghem (2007) menemukan bahwa kota besar dengan jumlah penduduk yang lebih banyak memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik terhadap prinsip akuntansi. Penelitian ini juga menduga bahwa semakin banyak populasi penduduk yang dimiliki sebuah Kabupaten/Kota, maka probabilitas mengalami financial distress akan semakin kecil dikarena populasi penduduk menggambarkan besaran transfer (sumber daya) yang dimiliki pemerintah (Evans dan Patton, 1987).

2.2.4. Pengaruh Pemekaran Wilayah terhadap Fiancial Distress

Pelaksanaan otonomi daerah yang berlangsung sejak tahun 1999 memberikan aspek penting terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah. Salah satu tujuan pemekaran atau penggabungan wilayah adalah untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan berdemokrasi. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara lebih baik sebagai warga negara.

Namun, pemekaran dan penggabungan wilayah diduga akan berpengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami financial distress. Pemerintah daerah yang sudah lama terbentuk (tidak mengalami pemekaran), sudah memiliki pengalaman dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, sehingga diduga akan terhindar dari financial distress. Sebaliknya, pemerintah daerah yang baru terbentuk (hasil pemekaran), belum memiliki

cukup pengalaman dalam pemerintahan sehingga memiliki kinerja yang lebih buruk dan berisiko mengalami financial distress. Amitabh (2006) menggunakan umur (pengalaman) sebagai indikator dalam menilai kinerja pelaporan keuangan institusi pemerintah. Hasil temuannya menunjukkan bahwa pertumbuhan umur institusi pemerintah akan meningkatkan kinerja dan pengalaman mereka dalam praktik pelaporan keuangan. Hussein (2008) juga menggunakan umur organisasi dalam menjelaskan variasi dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan. Umur organisasi diketahui berpengaruh terhadap kinerja pelaporan keuangan.

BAB III.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi *financial distress* dengan menggunakan indikator keuangan dan non-keuangan. Indikator keuangan yang digunakan meliputi komposisi pendapatan dan komitmen utang, sedangkan indikator non-keuangan meliputi kondisi sosial-ekonomi dan fenomena pemekaran yang terjadi di Indonesia. Derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan digunakan untuk melihat kondisi pendapatan pemerintah daerah. Populasi penduduk digunakan untuk melihat kondisi sosial-ekonomi pemerintah daerah (sebagai ukuran pembayaran transfer). Penentuan indikator-indikator tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan teori dan kondisi yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang.

3.2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian yang akan didapatkan dari penelitian ini antara lain :

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dibidang manajemen keuangan publik.
2. Memberikan informasi yang akurat tentang kemungkinan terjadinya financial distress keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat membantu para pemangku kepentingan (stake holder) dalam pembuatan tata kelola keuangan pemerintah daerah.
3. Meningkatkan kualitas implementasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas keuangan publik
4. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional yang terakreditasi dan seminar lokal maupun nasional.

BAB IV

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Pemerintah Provinsi dikecualikan dari populasi dengan pertimbangan adanya ketidaksetaraan wewenang dan sifat hubungan antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik probabilitas yaitu dilakukan secara acak (random) tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Penyampelan acak dilakukan dengan tujuan agar dapat menggeneralisir kondisi seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Proses pengambilan sampel secara acak dilakukan dengan bantuan software statistik SPSS versi 19.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen dan catatan yang dikumpulkan oleh peneliti dari Pemerintah daerah kabupaten Tulang Bawang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari keuangan dan non keuangan. Data keuangan yang digunakan bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan data non keuangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data populasi penduduk dan data pemekaran daerah yang bersumber dari dokumen dan catatan Kementerian Dalam Negeri.

3.3. Organisasi Variabel Penelitian

Pada penelitian ini terdapat 6 (enam) variabel yang akan diujikan, yaitu satu variabel *dependent* (terikat) *Financial distress* (Y), serta 5 (lima) variabel *independent* (bebas) yaitu: Kemandirian Keuangan (X_1), derajat desentralisasi (X_2), Solvabilitas (X_3), populasi penduduk (X_4), dan Pemekaran wilayah (X_5).

- **Kemandirian Keuangan**

Kemandirian keuangan mencerminkan sejauh mana pendapatan asli daerah (PAD) mampu memenuhi kebutuhan daerah. Variabel kemandirian keuangan daerah diukur dengan menggunakan rasio kemandirian :

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{PAD}{\text{Total Belanja}}$$

- **Derajat Desentralisasi**

Derajat desentralisasi menunjukkan kontribusi pendapatan asli daerah dalam menyelenggarakan kebijakan desentralisasi.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}}$$

- **Solvabilitas**

Kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang tercermin dari rasio solvabilitas pemerintah daerah.

$$\text{Solvabilitas} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Utang}}$$

- **Populasi Penduduk**

Populasi penduduk suatu wilayah mencerminkan banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh wilayah (pemerintah daerah) tersebut.

$$\text{Size} = \ln \text{Populasi Penduduk}$$

- **Umur**

Umur pemerintah daerah merupakan variabel dami (dummy variable) yang dinyatakan melalui konstruk pemekaran atau penggabungan wilayah. Apabila pemerintah daerah bukan Daerah Autonomi Baru (bukan hasil pemekaran/penggabungan wilayah) maka pemerintah daerah tersebut diberi bobot 1, sedangkan apabila pemerintah daerah merupakan Daerah Autonomi Baru (terbentuk setelah tahun 1999) maka pemerintah daerah tersebut diberi bobot 0.

- **Financial Distress**

Jones dan Walker (2007) mendefinisikan *financial distress* sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan ini dikarenakan pemerintah tidak memiliki kecukupan dana untuk membangun fasilitas pelayanan publik. Indikasi financial distress dalam penelitian ini dilihat dari porsi realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran. Apabila pemerintah menghabiskan sebagian besar

anggaran yang dimilikinya untuk belanja yang bersifat rutin (belanja operasi) maka dikhawatirkan Pemda tidak lagi memiliki kecukupan dana untuk kebutuhan membangun infrastruktur pelayanan publik, seperti membangun sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.

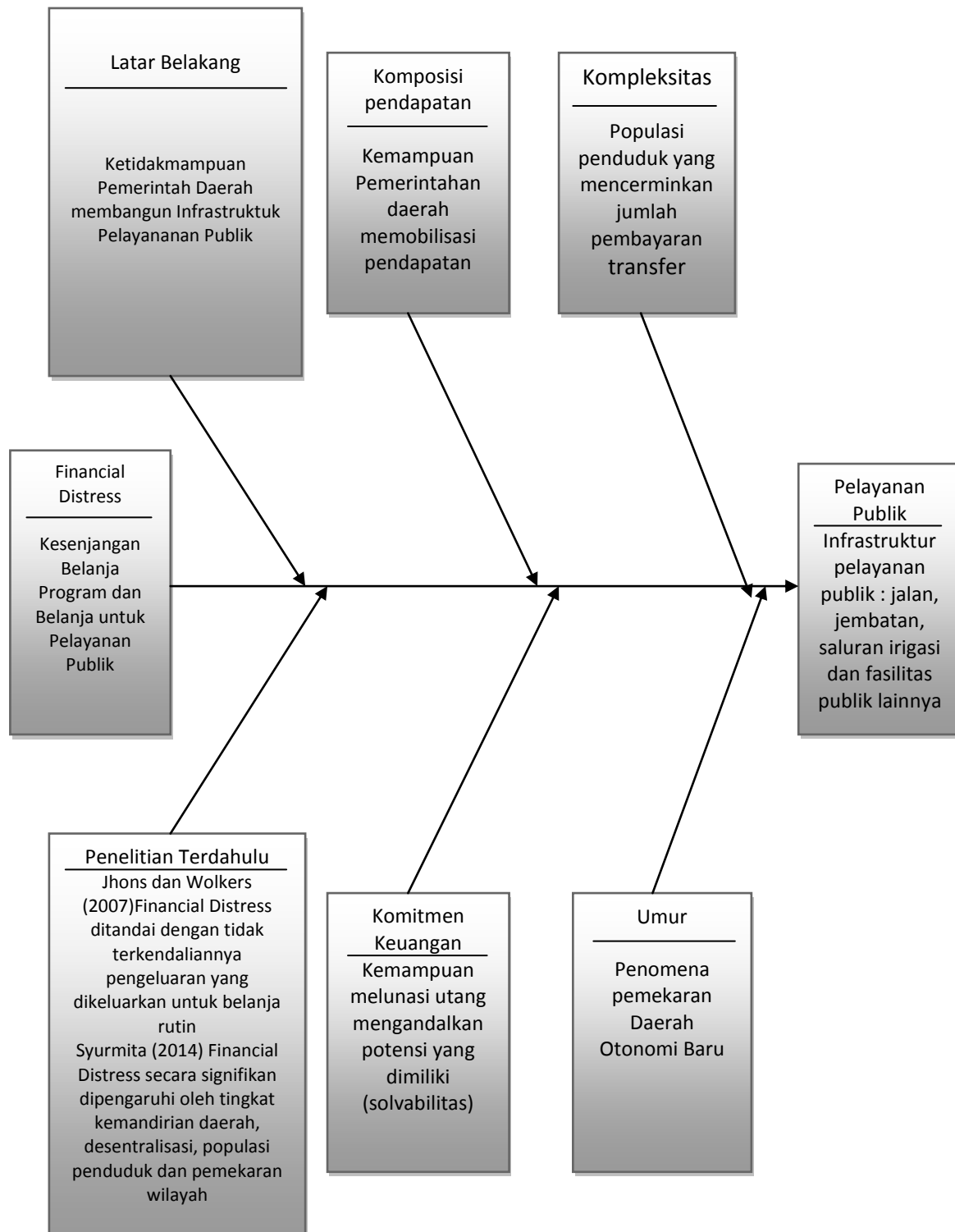
$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Angka ideal untuk rasio belanja modal terhadap total belanja tidak diatur oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengatur sendiri porsi belanja daerah. Pada umumnya rasio belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2010). Namun, dalam rapat koordinasi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (2013) meminta agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja modal sekurang-kurangnya 30% dari total belanja. Tujuannya agar dapat mendorong pembangunan infrastruktur dan sesuai dengan Perpres No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (<http://www.antaraneews.com>).

Oleh karena itu, maka pada penelitian ini pemerintah daerah yang mengalokasikan belanja modal kurang dari 30% dianggap mengalami financial distress karena dana yang dimilikinya habis untuk kebutuhan rutin (operasional) pemerintah daerah.

Variabel financial distress merupakan variabel dummy, dimana pemerintah daerah yang memiliki porsi belanja modal terhadap total belanja kurang dari 30% dianggap mengalami financial distress dan diberi skor 0, sedangkan pemerintah daerah yang memiliki porsi belanja modal terhadap total belanja lebih dari 30% dianggap tidak mengalami financial distress dan diberi skor 1.

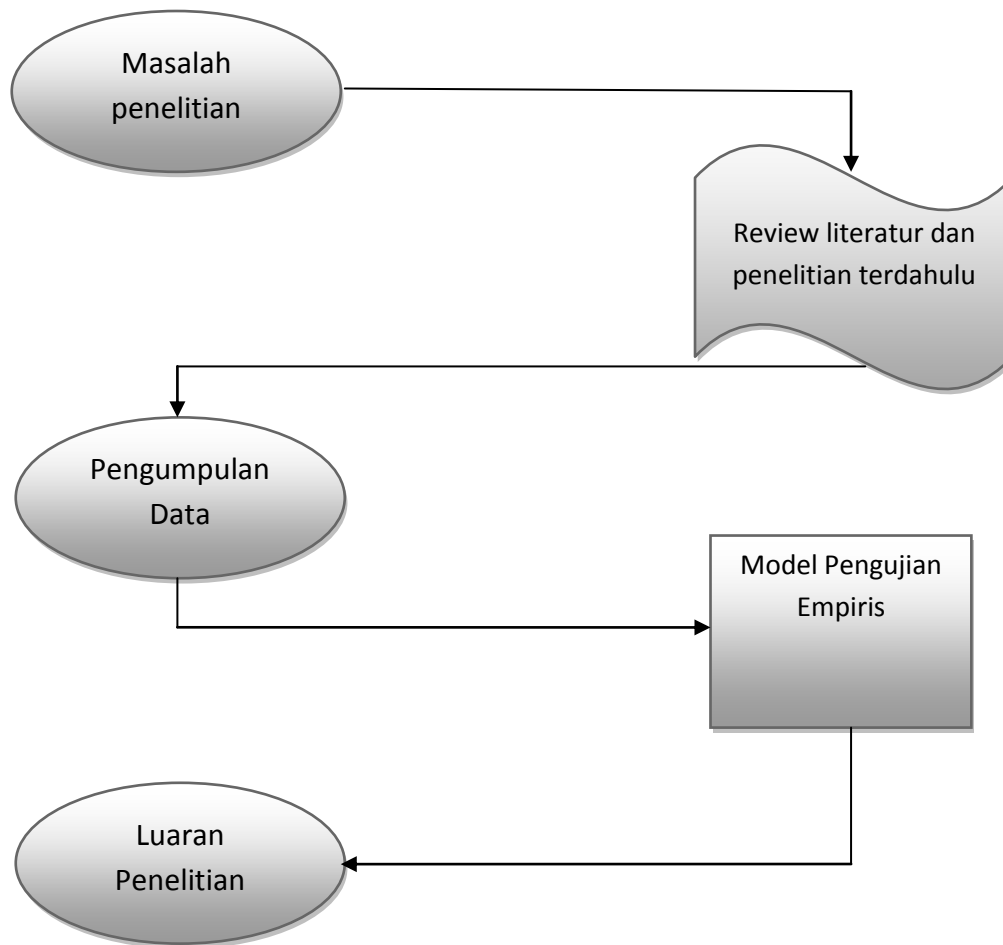
3.4 Model Penelitian



Gambar. 1. Fishbone Diagram Penelitian

Dari diagram tersebut diatas model penelitian yang dilakukan adalah desain penelitian kausalitas yaitu untuk menganalisis hubungan/pengaruh sebab akibat diantara dua variabel

atau lebih, sedangkan prosedur dan rancangan penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar. 2. Road Map Penelitian

3.5. Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dengan menggunakan LKPD pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Analisis regresi logistik biner (*binary logistic regression*) dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 18. Regresi logistik biner digunakan apabila variabel dependennya berupa variabel dikotomi atau variabel biner. Dalam penelitian ini, *financial distress* merupakan variabel dikotomi yang memiliki dua tingkatan berbeda, yaitu pemerintah daerah yang mengalami *financial distress* dan pemerintah daerah yang tidak mengalami *financial distress*.

Selain untuk melihat pengaruh sejumlah variabel independen terhadap variabel dependen yang berupa variabel response biner, regresi logistik biner juga biasa digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel dependen y (yang berupa variabel biner) berdasarkan nilai

variabelvariabel independen x_1, x_2, \dots, x_k .

Model *regresi logistic* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Log} (p / 1 - p) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Dimana p adalah kemungkinan bahwa $Y = 1$ (*financial distress*), dan X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 adalah variabel independen.

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesehatan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimulai dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan penelitian terhadap suatu objek tertentu, dimana data selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan. Dalam melakukan penelitian ini, data yang peneliti dapatkan adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2016 yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, serta data Laporan Realisasi APBD (LRA) Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2016. Berdasarkan data tersebut, peneliti menggunakan beberapa rasio keuangan untuk menganalisis kesehatan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang.

5.1.1 Analisis Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam penerapan otonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut dalam membangun daerahnya. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian daerah, yaitu dengan cara membandingkan total Penerimaan Asli Daerah (PAD) dengan total Penerimaan Daerah.

a. Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012

Tabel 5.1.
Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012.

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
I.	PENDAPATAN	
	Pendapatan Asli Daerah	68.673.500.000,00
	Pajak Daerah	19.178.930.000,00
	Retribusi Daerah	25.482.970.000,00
	Bagian Laba Usaha Daerah	6.451.680.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	17.559.920.000,00
II	Dana Perimbangan	874.661.230.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	45.559.840.000,00
	Dana Alokasi Umum	770.394.000.000,00
	Dana Alokasi Khusus	15.480.000.000,00
	Dana Perimbangan dari Propinsi	43.227.390.000,00
Total Pendapatan Daerah		943.334.730.000,00

Sumber : data diolah

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012, diketahui bahwa jumlah total Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp. 68.673.500.000. PAD tersebut terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.19.178.930.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.25.482.970.000,00, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp. 6.451.680.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.17.559.920.000,00. Sedangkan total Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, ialah sebesar Rp. 874.661.230.000,00. Sehingga total penerimaan daerah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun anggaran bersangkutan adalah sebesar Rp. 943.334.730.000,00.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{68.673.500.000,00}{943.334.730.000,00} \times 100 \% = 7,28\%$$

Berdasarkan perhitungan atas perbandingan antara total PAD dan total pendapatan daerah di atas, dapat diketahui bahwa tingkat Kemandirian Daerah

Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2012 adalah sebesar 7,28%. Berdasarkan tabel tingkat kemandirian pada bab 3, tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2012 tergolong sangat rendah, karena berada pada kisaran 0% hingga 25%, dan memiliki pola hubungan *instruktif*, yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

b. Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013

Tabel 5.2.
Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
I	PENDAPATAN	
	Pendapatan Asli Daerah	77.180.270.000,00
	Pajak Daerah	55.494.160.000,00
	Retribusi Daerah	861.126.000.000,00
	Bagian Laba Usaha Daerah	66.222.800.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	17.256.370.000,00
II	Dana Perimbangan	982.842.960.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	55.494.160.000,00
	Dana Alokasi Umum	861.126.000.000,00
	Dana Alokasi Khusus	66.222.800.000,00
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	37.222.635.000,00
	Hibah	60.368.000,00
	Dana Darurat	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	50.654.342.000,00
	Total Pendapatan Daerah	1.110.737.940.000,00

Sumber : data diolah

Pada tahun anggaran 2013, total penerimaan daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 17,75% dari tahun sebelumnya sebesar Rp.943.334.730.000,00 menjadi Rp.1.110.737.940.000,00. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan sebesar 12,39% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 68.673.500.000,00 menjadi Rp.77.180.270.000,00.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{77.180.270.000,00}{1.110.737.940.000,00} \times 100 \% = \mathbf{6,95\%}$$

Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2013 mengalami penurunan sebesar 4,55%, dari tahun sebelumnya sebesar 7,28%, menjadi 6,95%. Berdasarkan tabel tingkat kemandirian daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2013 sebesar 6,95% menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong masih sangat rendah karena masih berada pada kisaran 0% hingga 25%, dan memiliki pola hubungan *instruktif*, yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

c. Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014

Pada tahun anggaran 2014, total penerimaan daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 15,27% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.110.737.940.000,00 menjadi Rp1.280.324.520.000,00. PAD juga mengalami peningkatan sebesar 76,82% dari tahun sebelumnya sebesar Rp77.180.270.000,00 menjadi Rp136.470.690.000,00. Rincian mengenai perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 5.3.
Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
I	PENDAPATAN	
	Pendapatan Asli Daerah	136.470.690.000,00
	Pajak Daerah	24.222.730.000,00
	Retribusi Daerah	65.576.840.000,00
	Bagian Laba Usaha Daerah	15.043.630.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	31.627.490.000,00
II	Dana Perimbangan	982.842.960.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	62.165.920.000,00
	Dana Alokasi Umum	942.532.800.000,00
	Dana Alokasi Khusus	66.485.000.000,00
	Dana Penyesuaian Infrastruktur	-
	Dana Kontingensi	-
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	72.670.110.000,00
	Hibah	-

	Dana Darurat	17.510.000.000,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	45.656.460.000,00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9.385.150.000,00
	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	118.500.000,00
	Total Pendapatan Daerah	1.280.324.520.000,00

Sumber : data diolah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{136.470.690.000,00}{1.280.324.520.000,00} \times 100 \% = \mathbf{10,66\%}$$

Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2014 mengalami peningkatan sebesar 53,4%, dari tahun sebelumnya sebesar 6,95% menjadi 10,66%. Berdasarkan tabel tingkat kemandirian daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2014 sebesar 10,66% menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh besarnya tingkat kemandirian daerah masih berada pada kisaran 0% hingga 25%, dan memiliki pola hubungan *instruktif*, yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

d. Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015

Pada tahun anggaran 2015, total penerimaan daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 4,55% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.280.324.520.000,00 menjadi Rp. 1.338.578.665.186,72. Namun PAD mengalami penurunan sebesar 1,06% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 136.470.690.000,00 menjadi Rp. 135.022.280.000,00.

Tabel 5.4.
Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun Anggaran 2015

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
I	PENDAPATAN	
	Pendapatan Asli Daerah	135.022.280.000,00
	Pajak Daerah	26.481.360.000,00
	Retribusi Daerah	78.007.400.000,00
	Bagian Laba Usaha Daerah	15.747.510.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	14.786.010.000,00
II	Dana Perimbangan	109.049.845.186,72
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	79.488.430.000,00
	Dana Alokasi Umum	940.397.110.000,00
	Dana Alokasi Khusus	74.621.000.000,00
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	72.670.110.000,00
	Hibah	-
	Dana Darurat	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	59.401.740.000,00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28.757.400.000,00
	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20.791.510.000,00
	Dana Bagi Hasil Retribusi	99.195.186,72
	Total Pendapatan Daerah	1.338.578.665.186,72

Sumber : data diolah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{135.022.280.000,0}{1.338.578.665.186,72} \times 100\% = \mathbf{10,09\%}$$

Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar 5,37%, dari tahun sebelumnya sebesar 10,66% menjadi 10,09%. Berdasarkan tabel tingkat kemandirian daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2015 masih berada pada kisaran 0% hingga 25%, sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong masih sangat rendah, dan memiliki pola hubungan *instruktif*, yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

d. Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016

Tabel 5.5.
Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016.

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
I	PENDAPATAN	
	Pendapatan Asli Daerah	153.802.040.000,00
	Pajak Daerah	30.841.170.000,00
	Retribusi Daerah	96.585.340.000,00
	Bagian Laba Usaha Daerah	11.953.810.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	14.421.720.000,00
II	Dana Perimbangan	1.130.522.873.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	87.762.600.000,00
	Dana Alokasi Umum	955.007.373.000,00
	Dana Alokasi Khusus	87.752.900.000,00
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	52.557.613.327,14
	Total Pendapatan Daerah	1.542.856.103.000,00

Sumber data : LKPJ Bupati Kabupaten Tulang Bawang

Pada tahun anggaran 2016, total penerimaan daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 15,26% dari tahun sebelumnya sebesar Rp.1.338.578.665.186,72 menjadi Rp.1.542.856.103.000,00. PAD juga mengalami peningkatan sebesar 13,91% dari tahun sebelumnya sebesar Rp.135.022.280.000,00 menjadi Rp.153.802.040.000,00.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{153.802.040.000,00}{1.542.856.103.000,00} \times 100 \% = \mathbf{9,97\%}$$

Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar 1,17%, dari tahun sebelumnya sebesar 10,09% menjadi 9,97%. Berdasarkan tabel tingkat kemandirian daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2016 masih berada pada kisaran 0% hingga 25%, sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong masih sangat rendah, dan memiliki pola hubungan *instruktif*, yaitu pola hubungan dimana peranan

pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

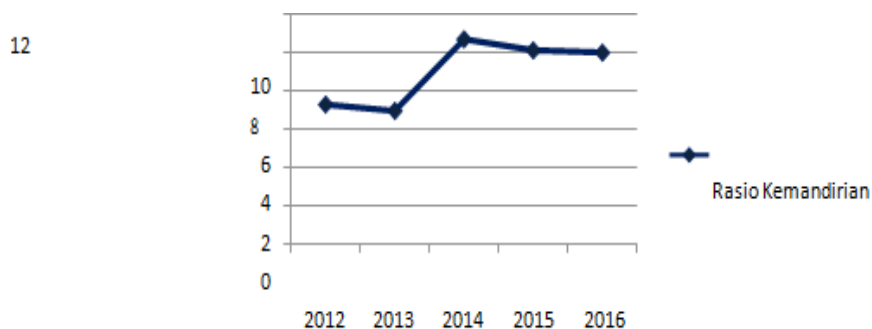
Tabel 5.6.
Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah	% TKD	Kemandirian
2012	68.673.500.000	943.334.730.000,00	7,28%	Sangat rendah
2013	77.180.270.000	1.110.737.940.000,00	6,95%	Sangat rendah
2014	136.470.690.000	1.280.324.520.000,00	10,66%	Sangat rendah
2015	135.022.280.000	1.338.578.665.186,72	10,09%	Sangat rendah
2016	153.802.040.000	1.542.856.103.000,00	9,97%	Sangat rendah

Sumber data: Data diolah

Dari tabel 4.6 di atas, terlihat bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan sosial kemasyarakatan tergolong masih sangat rendah. Rasio kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tergambar pada gambar 5.1, diketahui hanya berada di kisaran 6% sampai 10%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang memiliki pola hubungan yang instruktif, yaitu suatu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada peranan kemandirian daerah. penyebabnya tak lain ialah karena besarnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah atas transfer dari pemerintah pusat dalam APBD secara keseluruhan terhadap APBD Kabupaten Tulang Bawang pada tahun anggaran 2012 hingga 2016. Peranan pemerintah pusat masih sangat dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Walaupun tingkat kemandirian rendah tetapi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya mengalami peningkatan

Gambar 5.1
Rasio Kemandirian Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016



Untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, ditinjau dari tingkat kemandirian daerah selama lima tahun anggaran, digunakan metode analisis trend dengan formula : $Y' = a + Bx$

Tabel 5.7.
Trend Perkembangan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Tingkat Kemandirian(Y)	X	XY	X ²
2012	7,28	-2	-14,56	4
2013	6,95	-1	-6,95	1
2014	10,66	0	0	0
2015	10,09	1	10,09	1
2016	9,97	2	19,94	4
Total	44,95	0	8,52	10

Sumber data: Data diolah

Nilai a dan b dicari dengan formula :

$$a = \frac{\sum Y}{N} = \frac{44,95}{5} = 8,99$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{8,52}{10} = 0,852$$

Sehingga, persamaan trend dilihat dari tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah : $Y' = 8,99 + 0,852 X$

Tabel 5.8.
Proyeksi Perkembangan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2017 – 2021

No	Tahun Anggaran	Proyeksi Tingkat Kemandirian (%)
1	2017	11,55 %
2	2018	12,4 %
3	2019	13,25 %
4	2020	14,1 %
5	2021	14,95 %

Sumber data: Data diolah

Dari persamaan trend di atas, maka proyeksi/perkiraan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel 4.8. Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa proyeksi Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun-tahun yang akan datang, akan terus mengalami peningkatan.

5.1.2 Analisis Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Tulang Bawang

Kemampuan rutin daerah menunjukkan sejauh mana kemampuan keuangan pada potensi suatu daerah dalam rangka membiayai belanja langsung daerah. Kemampuan rutin suatu daerah dapat diketahui dengan menggunakan rasio indeks kemampuan rutin (IKR), yaitu dengan cara membandingkan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Belanja Langsung.

a. Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012, diketahui bahwa jumlah total Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.68.673.500.000. PAD tersebut terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.19.178.930.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.25.482.970.000,00, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp.6.451.680.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.17.559.920.000,00. Sedangkan total Belanja Langsung adalah sebesar Rp.793.682.420.000. Belanja langsung tersebut terdiri dari Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal, masing-masing ialah sebesar Rp.464.069.230.000, Rp.175.414.810.000, dan Rp.154.198.380.000.

$$\text{IKR} = \frac{68.673.500.000}{793.682.420.000} \times 100\% = 8,65\%$$

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2012 adalah sebesar 8,65%. Berdasarkan tabel tingkat kemampuan rutin daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, IKR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2012 berada pada kisaran 0% hingga 20%, sehingga tingkat kemampuan rutin Kabupaten Tulang Bawang tergolong masih sangat kurang dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah.

b. Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013

Pada tahun anggaran 2013, total PAD Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 12,39% dari tahun sebelumnya sebesar Rp68.673.500.000,00 menjadi Rp77.180.270.000,00. Sedangkan Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar 34,71% daripada tahun sebelumnya, menjadi Rp518.221.690.000,00.

$$\text{IKR} = \frac{77.180.270.000}{518.221.690.000} \times 100\% = 14,89\%$$

Tingkat kemampuan rutin daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2013 mengalami peningkatan sebesar 72,13%, dari tahun sebelumnya sebesar 8,65% menjadi 14,89%. Berdasarkan tabel tingkat kemampuan rutin daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, IKR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2013 berada pada kisaran 0% hingga 20%, sehingga tingkat kemampuan rutin Kabupaten Tulang Bawang tergolong masih sangat kurang dalam membiayai pengeluaran rutin daerah.

c. Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014

Pada tahun anggaran 2013, total PAD Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 76,82% dari tahun sebelumnya sebesar Rp.77.180.270.000,00 menjadi Rp.136.470.690.000,00. Belanja Langsung juga mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,82% daripada tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp.518.221.690.000,00 menjadi Rp.527.672.050.000,00.

$$\text{IKR} = \frac{136.470.690.000}{527.672.050.000} \times 100\% = 25,86\%$$

Tingkat kemampuan rutin daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2014 mengalami peningkatan sebesar 13,80%, dari tahun sebelumnya sebesar 14,89% menjadi 25,86%. Berdasarkan tabel tingkat kemampuan rutin daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, IKR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2014 berada pada kisaran 20% hingga 40%, sehingga tingkat kemampuan rutin Kabupaten Tulang Bawang tergolong kurang mampu dalam membiayai belanja rutin daerah.

d. Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015

Pada tahun anggaran 2015, total PAD Kabupaten Tulang Bawang mengalami penurunan sebesar 1,06% dari tahun sebelumnya sebesar Rp136.470.690.000 menjadi Rp135.022.280.000. Sedangkan pos Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar

14,3% daripada tahun sebelumnya, menjadi Rp 458.754.820.000.

$$\text{IKR} = \frac{135.022.280.000}{458.754.820.000} \times 100\% = \mathbf{29,43\%}$$

Tingkat kemampuan rutin daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2015 mengalami peningkatan sebesar 13,8%, dari tahun sebelumnya sebesar 25,86% menjadi 29,43%. Berdasarkan tabel tingkat kemampuan rutin daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, IKR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2015 berada pada kisaran 20% hingga 40%, sehingga tingkat kemampuan rutin Kabupaten Tulang Bawang tergolong kurang mampu dalam membiayai belanja rutin daerah.

e. Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016

Pada tahun anggaran 2016, total PAD Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 13,91% dari tahun sebelumnya sebesar Rp.135.022.280.000 menjadi Rp.153.802.040.000. Sedangkan pos Belanja Langsung kembali mengalami penurunan sebesar 14,3% dari pada tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp.458.754.820.000 menjadi Rp.393.148.340.000.

$$\text{IKR} = \frac{153.802.040.000}{393.148.340.000} \times 100\% = \mathbf{39,12\%}$$

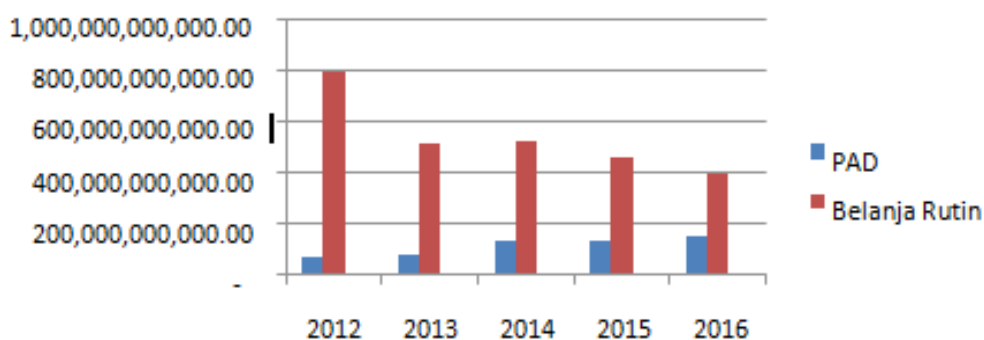
Tingkat kemampuan rutin daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2016 kembali mengalami peningkatan sebesar 32,92%, dari tahun sebelumnya sebesar 29,43% menjadi 39,12%. Berdasarkan tabel tingkat kemampuan rutin daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, IKR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2016 berada pada kisaran 20% hingga 40%, sehingga tingkat kemampuan rutin Kabupaten Tulang Bawang tergolong kurang mampu dalam membiayai belanja rutin daerah.

Tabel 5.9
Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	PAD	Total Belanja Rutin	% IKR	Kemandirian
2012	68.673.500.000	793.682.420.000	8,65 %	Sangat kurang
2013	77.180.270.000	518.221.690.000	14,89 %	Sangat kurang
2014	136.470.690.000	527.672.050.000	25,86 %	Kurang
2015	135.022.280.000	458.754.820.000	29,43 %	Kurang
2016	153.802.040.000	393.148.340.000	39,12 %	Kurang

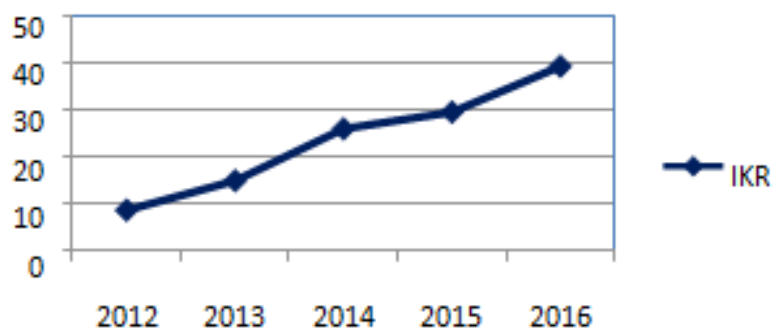
Sumber data: Data diolah

Gambar 5.2.
Perbandingan PAD dan Belanja Rutin Daerah Kab. Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016



Untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, ditinjau dari tingkat kemampuan rutin daerah selama lima tahun anggaran, digunakan metode analisis trend dengan formula $Y' = a + bX$

Gambar 5.3.
IKR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016



Tabel 5.10.

**Trend Perkembangan Tingkat Kemampuan Rutin Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016.**

Tahun Anggaran	IKR (Y)	X	XY	X ²
2012	8,65	-2	-17,3	4
2013	14,89	-1	-14,89	1
2014	25,86	0	0	0
2015	29,43	1	29,43	1
2016	39,12	2	78,24	4
Total	117,95	0	75,48	10

Nilai a dan b dicari dengan formula :

$$a = \frac{\sum Y}{N} = \frac{117,95}{5} = 23,59$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{75,48}{10} = 7,548$$

Sehingga, persamaan trend dilihat dari tingkat kemampuan rutin daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah : $Y' = 23,59 + 7,548 X$

Dari persamaan trend di atas, maka proyeksi/perkiraan tingkat kemampuan rutin daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 5.11
Proyeksi Perkembangan IKR Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2017 - 2021

No	Tahun Anggaran	Proyeksi Tingkat Kemandirian (%)
1	2017	46,23 %
2	2018	53,78 %
3	2019	61,33 %
4	2020	68,88 %
5	2021	76,43 %

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, dapat diketahui bahwa proyeksi Tingkat Kemampuan Rutin Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun-tahun yang akan datang, akan terus mengalami peningkatan.

5.1.3 Analisis Efektivitas Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Efektivitas merupakan keberhasilan suatu entitas dalam usaha mencapai tujuan entitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio Efektivitas Anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas anggaran suatu daerah dapat diketahui dari total realisasi penerimaan PAD dibandingkan dengan total penerimaan PAD berdasarkan potensi riil.

a. Tingkat Efektivitas Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012, diketahui bahwa jumlah total realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.68.673.500.000. Sedangkan total penerimaan PAD daerah ialah sebesar Rp.53.189.640.000. Sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{68.673.500.000}{53.189.640.000} \times 100\% = 129,11\%$$

Tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan perhitungan di atas diketahui mencapai 129,11%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang mampu menjalankan tugasnya dengan efektif, karena tingkat efektivitas anggaran mampu melebihi tingkat efektivitas minimal sebesar 100%.

b. Tingkat Efektivitas Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007

Pada tahun anggaran 2013, total PAD berdasarkan potensi riil daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 29,26% dari tahun sebelumnya, yang hanya sebesar Rp. 53.189.640.000 menjadi Rp. 68.752.734.749,98. Namun total realisasi PAD hanya mengalami peningkatan sebesar 12,39% dari tahun

sebelumnya sebesar Rp.68.673.500.000 menjadi sebesar Rp.77.180.270.000.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{77.180.270.000}{68.752.734.749,98} \times 100\% = \mathbf{112,26\%}$$

Tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2013 mengalami penurunan sebesar 13,05%, dari tahun sebelumnya sebesar 129,11% menjadi 112,26%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2013 tergolong mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, karena tingkat efektivitas anggaran mampu melebihi tingkat efektivitas minimal sebesar 100%.

c. Tingkat Efektivitas Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014

Pada tahun anggaran 2014, total PAD berdasar potensi riil daerah Kabupaten Tulang Bawang mencapai Rp113.611.443.946,02. Dan total realisasi PAD Kabupaten Tulang Bawang pada tahun anggaran yang sama, mencapai Rp. 136.470.690.000.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{136.470.690.000}{113.611.443.946,02} \times 100\% = \mathbf{120,12\%}$$

Tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2014 mengalami peningkatan sebesar 7%, dari tahun sebelumnya sebesar 112,26% menjadi 120,12%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2014 tergolong mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, karena tingkat efektivitas anggaran mampu melebihi tingkat efektivitas minimal sebesar 100%.

d. Tingkat Efektivitas Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015

Pada tahun anggaran 2015, total PAD berdasar potensi riil daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp119.817.120.000. Dan total realisasi PAD Kabupaten Tulang Bawang pada tahun anggaran yang sama, mencapai Rp.135.022.280.000.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{135.022.280.000}{119.817.120.000} \times 100\% = \mathbf{112,69\%}$$

Tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun

anggaran 2015 kembali mengalami penurunan sebesar 6,19 %, dari tahun sebelumnya sebesar 120,12% menjadi 112,69%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2015 masih tergolong mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, karena tingkat efektivitas anggaran mampu melebihi tingkat efektivitas minimal sebesar 100%.

e. Tingkat Efektivitas Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016

Pada tahun anggaran 2016, total PAD berdasar potensi riil daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp149.343.450.000. Dan total realisasi PAD Kabupaten Tulang Bawang pada tahun anggaran yang sama, mencapai Rp153.802.040.00

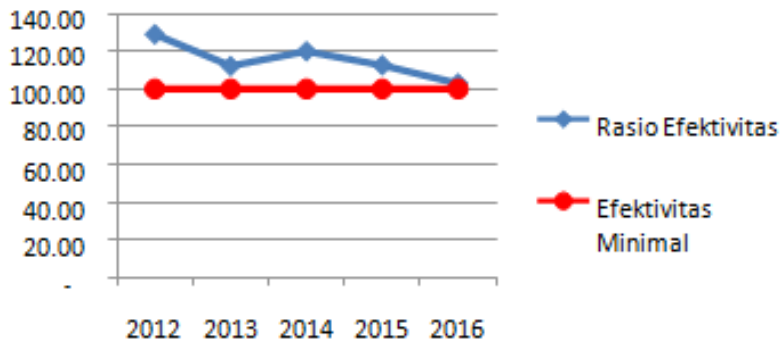
$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{153.802.040.000}{149.343.450.000} \times 100\% = 102,99\%$$

Tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2016 kembali mengalami penurunan sebesar 8,61%, dari tahun sebelumnya sebesar 112,69% menjadi 102,99%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2016 masih tergolong mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, karena tingkat efektivitas anggaran mampu melebihi tingkat.

Tabel 5.12
Tingkat Efektivitas Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016.

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Anggaran PAD	% Efektivitas	Efektivitas
2012	68.673.500.000	53.189.640.000	129,11 %	Efektif
2013	77.180.270.000	68.752.734.749,98	112,26 %	Efektif
2014	136.470.690.000	113.611.443.946,02	120,12 %	Efektif
2015	135.022.280.000	119.817.120.000	112,69 %	Efektif
2016	153.802.040.000	149.343.450.000	102,99 %	Efektif

Gambar 5.4
Rasio Efektivitas Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016



Berdasarkan tabel 5.12 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka merealisasikan anggaran pendapatan yang telah tersusun dalam rancangan APBD Kabupaten Tulang Bawang, mengalami perubahan fluktuatif setiap tahunnya. Jika dilihat pada Gambar 5.4, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas anggaran melebihi 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang mampu menjalankan tugas pemerintahannya secara efektif dalam upaya merealisasikan anggaran pendapatan yang telah tersusun dalam rancangan APBD.

Tabel 5.13
Trend Perkembangan Tingkat Efektivitas Anggaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Efektivitas (Y)	X	XY	X ²
2012	129,11	-2	-258,22	4
2013	112,26	-1	-112,26	1
2014	120,12	0	0	0
2015	112,69	1	112,69	1
2016	102,99	2	205,97	4
Total	577,16	0	-51,82	10

Untuk mengetahui perkembangan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, ditinjau dari efektivitas PAD selama lima tahun anggaran, digunakan metode analisis trend dengan formula $Y' = a + bX$.

Nilai a dan b dicari dengan formula :

$$a = \frac{\sum Y}{N} = \frac{577,16}{5} = 115,43$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-51,82}{10} = -5,182$$

Sehingga, persamaan trend dilihat dari tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah : $Y' = 115,43 - 5,182 X$

Dari persamaan trend di atas, maka proyeksi/perkiraan tingkat efektivitas daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel 4.14.

Tabel 5.14

Proyeksi Perkembangan Tingkat Efektivitas Anggaran Daerah
Kab. Tulang Bawang Tahun Anggaran 2017 – 2021

No	Tahun Anggaran	Proyeksi Tingkat Efektivitas (%)
1	2017	99,89 %
2	2018	94,7 %
3	2019	89,52 %
4	2020	84,34 %
5	2021	79,16 %

Sumber data: Data diolah

Berdasarkan tabel 5.14 dapat diketahui bahwa proyeksi Tingkat Efektivitas Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun-tahun yang akan datang, akan terus mengalami penurunan.

5.1.4 Analisis Efisiensi Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Analisis efisiensi anggaran merupakan gambaran perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan daerah, dengan realisasi pendapatan daerah yang diterima. Pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat besar biaya yang diperlukan guna merealisasikan seluruh kegiatan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan pendapatan yang akan dihasilkannya. Keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pendapatan tidak akan berarti jika besar biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkannya melebihi apa yang dihasilkannya.

a. Tingkat Efisiensi Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012, diketahui bahwa jumlah total realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.68.673.500.000. Sedangkan besar biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD ialah Rp.5.138.605.250. Sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{5.138.605.250}{68.673.500.000} \times 100\% = 7,48 \%$$

Tingkat efisiensi anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan perhitungan di atas diketahui mencapai 7,48%. Berdasarkan tabel tingkat efisiensi

anggaran daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, tingkat efisiensi Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2012 berada di kisaran, <60%, sehingga tingkat efisiensi anggaran sebesar 7,48% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong cukup efisien dalam rangka melakukan pemungutan PAD.

b. Tingkat Efisiensi Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013

Pada tahun anggaran 2013, total realisasi PAD mengalami peningkatan sebesar 12,39% dari tahun sebelumnya sebesar Rp68.673.500.000 menjadi Rp77.180.270.000. Sedangkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD mengalami penurunan yang cukup tajam, menjadi Rp1.990.500.000. Sehingga, tingkat efisiensi anggaran tahun 2013 adalah sebesar :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.990.500.000}{77.180.270.000} \times 100\% = 2,58 \%$$

Tingkat efisiensi anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2013 mengalami penurunan sebesar 65,53%, dari tahun sebelumnya sebesar 7,48% menjadi 2,58%. Berdasarkan tabel tingkat efisiensi anggaran daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, tingkat efisiensi Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2013 berada di kisaran, <60%, sehingga tingkat efisiensi anggaran sebesar 2,58% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong cukup efisien dalam rangka melakukan pemungutan PAD.

c. Tingkat Efisiensi Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014

Pada tahun anggaran 2014, total realisasi PAD mencapai Rp136.470.690.000. Sedangkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD pada tahun anggaran bersangkutan, mencapai Rp2.910.767.870,00. Sehingga, tingkat efisiensi anggaran tahun 2014 adalah sebesar :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{2.910.767.870}{136.470.690.000} \times 100\% = 2,13 \%$$

Tingkat efisiensi anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2014 mengalami penurunan sebesar 17,3%, dari tahun sebelumnya sebesar 2,58% menjadi 2,13%. Berdasarkan tabel tingkat efisiensi anggaran daerah yang peneliti

cantumkan pada bab 3, tingkat efisiensi Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2014 berada di kisaran, <60%, sehingga tingkat efisiensi anggaran sebesar 2,13% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong cukup efisien dalam rangka melakukan pemungutan PAD.

d. Tingkat Efisiensi Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015

Pada tahun anggaran 2015, total realisasi PAD mencapai Rp135.022.280.000. Sedangkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD pada tahun anggaran bersangkutan, mencapai Rp2.220.037.627. Sehingga, tingkat efisiensi anggaran tahun 2015 adalah sebesar :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{2.220.037.627}{135.022.280.000} \times 100\% = 1,64 \%$$

Tingkat efisiensi anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar 22,91%, dari tahun sebelumnya sebesar 2,13% menjadi 1,64%. Berdasarkan tabel tingkat efisiensi anggaran daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, tingkat efisiensi Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2015 berada di kisaran, <60%, sehingga tingkat efisiensi anggaran sebesar 1,64% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong cukup efisien dalam rangka melakukan pemungutan PAD.

e. Tingkat Efisiensi Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016

Pada tahun anggaran 2016, total realisasi PAD mencapai Rp153.802.040.000. Sedangkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD pada tahun anggaran bersangkutan, mencapai Rp1.916.630.700. Sehingga, tingkat efisiensi anggaran tahun 2016 adalah sebesar :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.916.630.700}{153.802.040.000} \times 100\% = 1,25 \%$$

Tingkat efisiensi anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar 24,21%, dari tahun sebelumnya sebesar 1,64% menjadi 1,25%. Berdasarkan tabel tingkat efisiensi anggaran daerah yang peneliti

cantumkan pada bab 3, tingkat efisiensi Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2016 berada di kisaran, <60%, sehingga tingkat efisiensi anggaran sebesar 1,25% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong cukup efisien dalam rangka melakukan pemungutan PAD.

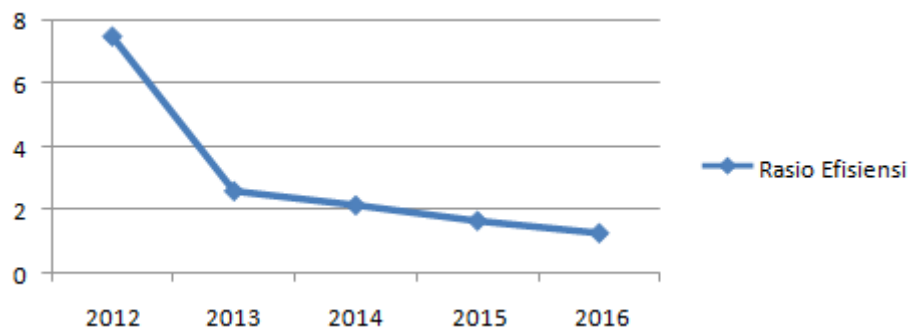
Berdasarkan tabel 4.15, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka merealisasikan anggaran pendapatan yang telah tersusun dalam rancangan APBD Kabupaten Tulang Bawang, mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang mampu menjalankan tugas pemerintahannya secara efisien dalam upaya menghasilkan PAD Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 5.15
Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Biaya Guna Memungut PAD	Realisasi PAD	% Efisiensi	Efisiensi
2012	5.138.605.250	68.673.500.000	7,48 %	Efisien
2013	1.990.500.000	77.180.270.000	2,58 %	Efisien
2014	2.910.767.870	136.470.690.000	2,13 %	Efisien
2015	2.220.037.627	135.022.280.000	1,64 %	Efisien
2016	1.916.630.700	153.802.040.000	1,25 %	Efisien

Sumber data: Data diolah

Gambar 5.5
Rasio Efisiensi Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016



Tabel 5.16

Trend Perkembangan Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Efisiensi (Y)	X	XY	X ²
2012	7,48	-2	-14,96	4
2013	2,58	-1	-2,58	1
2014	2,13	0	0	0
2015	1,64	1	1,64	1
2016	1,25	2	2,5	4
Total	15,08	0	-13,4	10

Sumber data : Data diolah

Untuk mengetahui perkembangan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, ditinjau dari tingkat efisiensi anggaran selama lima tahun anggaran, digunakan metode analisis trend dengan formula $Y' = a + bX$

Nilai a dan b dicari dengan formula :

$$a = \frac{\sum Y}{N} = \frac{15,08}{5} = 3,02$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-13,4}{10} = -1,34$$

Sehingga, persamaan trend dilihat dari tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah :

$$Y' = 3,02 - 1,34 X$$

Dari persamaan trend di atas, maka proyeksi/perkiraan tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel 4.17.

Tabel 5.17
 Proyeksi Perkembangan Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah
 Kabupaten Tulang Bawang
 Tahun Anggaran 2017 – 2021

No	Tahun Anggaran	Proyeksi Tingkat Efisiensi (%)
1	2017	-1 %
2	2018	-2,34 %
3	2019	-3,68 %
4	2020	-5,02 %
5	2021	-6,36 %

Sumber data: Data diolah

Berdasarkan tabel 5.17 dapat diketahui bahwa proyeksi Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun-tahun yang akan datang, akan terus mengalami penurunan.

5.1.5 Analisis DSCR Kabupaten Tulang Bawang

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) merupakan suatu tolok ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu entitas dalam rangka menghasilkan pendapatan yang cukup guna membayar utang maupun sewa. Dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah, selain menggunakan PAD dan dana perimbangan dari pusat, pemerintah juga dapat menggunakan sumber alternatif lain, yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti DSCR minimal 2,5.

a. DSCR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012, diketahui bahwa jumlah total realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah, DAU, dan Belanja Wajib Kabupaten Tulang Bawang masing-masing adalah sebesar Rp.68.673.500.000,00, Rp.26.239.900.000,00, Rp.770.394.000.000,00, dan Rp143.919.390.000,00. Sedangkan total pokok dan bunga pinjaman daerah adalah sebesar Rp.770.394.000.000,00. Sehingga perhitungan DSCR Kabupaten Tulang Bawang untuk Tahun Anggaran 2012 adalah:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	68.673.500.000	
Bagian Daerah	26.239.900.000	
Dana Alokasi Umum (DAU)	770.394.000.000	
Total PAD + BD + DAU	865.307.400.000	+
Belanja Wajib (BW)	143.919.390.000	
Total (PAD + BD + DAU) - BW	721.388.010.000	-

$$\text{DSCR} = \frac{721.388.010.000}{770.394.000.000} \times 100\% = 93,64\%$$

$$\text{Maksimal Angsuran Pokok Pinjaman} = \frac{721.388.010.000}{2,5} \times 100\% = \text{Rp } 288.555.204.000$$

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa DSCR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2012 mencapai 93,64%. Dan maksimal angsuran pokok pinjaman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran yang sama, adalah sebesar Rp.288.555.204.000. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat melakukan pinjaman dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah dengan jumlah angsuran maksimal sebesar Rp.288.555.204.000.

b. DSCR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013

Pada tahun anggaran 2013, total realisasi PAD ialah sebesar Rp.77.180.270.000. Dan besarnya Bagian Daerah, DAU, serta Belanja Wajib, masing-masing adalah sebesar Rp.68.000.870.000,00, Rp.861.126.000.000, dan Rp.587.864.180.000,00. Sedangkan besarnya total pokok dan bunga angsuran adalah Rp.861.126.000.000,00. Sehingga, perhitungan DSCR Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	77.180.270.000	
Bagian Daerah	68.000.870.000	
Dana Alokasi Umum (DAU)	861.126.000.000	
Total PAD + BD + DAU	1.006.307.140.000	+
Belanja Wajib (BW)	587.864.180.000	
Total (PAD + BD + DAU) - BW	418.442.960.000	-

$$\text{DSCR} = \frac{418.442.960.000}{861.126.000.000} \times 100\% = 48,59\%$$

$$\text{Maksimal Angsuran Pokok Pinjaman} = \frac{418.442.960.000}{2,5} \times 100\% = \text{Rp } 167.377.184.000$$

Tingkat DSCR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2013 mengalami penurunan sebesar 47%, dari tahun sebelumnya sebesar 91,63% menjadi 48,59%. Dan maksimal angsuran pokok pinjaman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran yang sama, adalah sebesar Rp.167.377.184.000. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat melakukan pinjaman dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah dengan jumlah angsuran maksimal sebesar Rp.167.377.184.000.

c. DSCR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014

Pada tahun anggaran 2014, besar realisasi PAD, Bagian Daerah, DAU, serta Belanja Wajib, masing-masing adalah Rp.136.470.690.000, Rp.106.316.286.665,00, Rp.942.532.800.000, dan Rp.736.711.555.050. Sedangkan total pokok dan bunga angsuran adalah Rp.942.532.800.000. Sehingga, perhitungan DSCR Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	136.470.690.000	
Bagian Daerah	106.316.286.665	
Dana Alokasi Umum (DAU)	942.532.800.000	
Total PAD + BD + DAU	1.185.319.776.665	+
Belanja Wajib (BW)	736.711.555.050	
Total (PAD + BD + DAU) - BW	448.608.221.615	-

$$\text{DSCR} = \frac{448.608.221.615}{942.532.800.000} \times 100\% = 47,6\%$$

$$\text{Maksimal Angsuran Pokok Pinjaman} = \frac{448.608.221.615}{2,5} \times 100\% = \text{Rp } 179.443.288.646$$

Tingkat DSCR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2014 mengalami penurunan sebesar 2,05%, dari tahun sebelumnya sebesar 48,59% menjadi 47,6%. Dan maksimal angsuran pokok pinjaman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran yang sama, adalah sebesar Rp.179.443.288.646,00. Hal ini menandakan bahwa

pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat melakukan pinjaman dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah dengan jumlah angsuran maksimal sebesar Rp.179.443.288.646.

d. DSCR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015

Pada tahun anggaran 2015, total PAD, Bagian Daerah, DAU, dan Belanja Wajib, masing-masing mencapai Rp.135.022.280.000, Rp.123.405.439.483,13, Rp.940.397.110.000, dan Rp.865.535.337.303,41. Sedangkan besarnya total pokok dan bunga pinjaman daerah pada tahun anggaran bersangkutan, mencapai Rp.940.397.110.000. Sehingga, perhitungan DSCR Kabupaten Tulang Bawang tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	135.022.280.000,00	
Bagian Daerah	123.405.439.483,13	
Dana Alokasi Umum (DAU)	940.397.110.000,00	
Total PAD + BD + DAU	1.198.824.829.483,13	+
Belanja Wajib (BW)	865.535.337.303,41	
Total (PAD + BD + DAU) - BW	333.289.492.179,72	-

$$\text{DSCR} = \frac{333.289.492.179,72}{940.397.110.000,00} \times 100\% = 35,44\%$$

$$\text{Maksimal Angsuran Pokok Pinjaman} = \frac{333.289.492.179,72}{2,5} \times 100\% = \text{Rp } 133.315.796.871,89$$

Tingkat DSCR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar 25,54%, dari tahun sebelumnya sebesar 47,6% menjadi 35,44%. Dan maksimal angsuran pokok pinjaman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran yang sama, adalah sebesar Rp.133.315.796.871,89. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat melakukan pinjaman dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah dengan jumlah angsuran maksimal sebesar Rp.133.315.796.871,89.

e. DSCR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016

Pada tahun anggaran 2016, total PAD, Bagian Daerah, DAU, dan Belanja Wajib, masing-masing mencapai Rp.153.802.040.000, Rp.340.139.827.100,

Rp955.007.373.000, dan Rp.1.110.566.800.000. Sedangkan besarnya total pokok dan bunga pinjaman daerah pada tahun anggaran bersangkutan, mencapai Rp.955.007.373.000,00. Sehingga, perhitungan DSCR Kabupaten Tulang Bawang tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tingkat DSCR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar 0,025%, dari tahun sebelumnya sebesar 35,44% menjadi 35,43%. Dan maksimal angsuran pokok pinjaman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran yang sama, adalah sebesar Rp.135.352.976.040. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat melakukan pinjaman dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah dengan jumlah angsuran maksimal sebesar Rp.135.352.976.040.

Tabel 5.18

DSCR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016

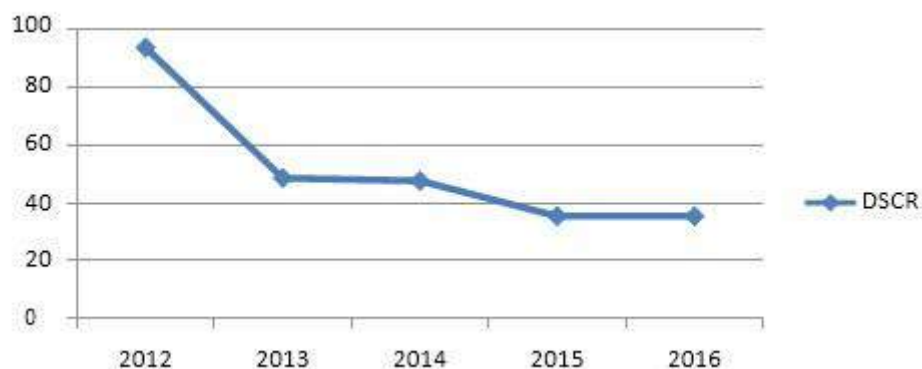
Tahun Anggaran	(PAD + BD + DAU) - BW	(Pokok Angsuran + Bunga + B.Pinjaman)	% DSCR
2012	721.388.010.000,00	770.394.000.000	93,64
2013	418.442.960.000,00	861.126.000.000	48,59
2014	448.608.221.615,00	942.532.800.000	47,6
2015	333.289.492.179,72	940.397.110.000	35,44
2016	338.382.440.100,00	955.007.373.000	35,43

Sumber data: Data diolah

Gambar 5.6

DSCR Kabupaten Tulang Bawang

Tahun Anggaran 2012-2016



Berdasarkan tabel 5.18, dapat diketahui bahwa DSCR daerah Kabupaten Tulang Bawang menurun setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka membayar pokok pinjaman daerah beserta bunganya mengalami penurunan setiap tahunnya.

Tabel 5.19
Trend Perkembangan DSCR Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	DSCR (Y)	X	XY	X ²
2012	93,64	-2	-187,28	4
2013	48,59	-1	-48,59	1
2014	47,6	0	0	0
2015	35,44	1	35,44	1
2016	35,43	2	70,86	4
Total	260,7	0	-129,57	10

Untuk mengetahui perkembangan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, ditinjau dari kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam rangka membayar pokok pinjaman daerah beserta bunganya selama lima tahun anggaran, peneliti menggunakan metode analisis trend dengan formula $Y' = a + bX$

$$a = \frac{\sum Y}{N} = \frac{260,7}{5} = 52,14$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-129,57}{10} = -12,957$$

Nilai a dan b dicari dengan formula :

Sehingga, persamaan trend dilihat dari DSCR Kabupaten Tulang Bawang adalah :

$$Y' = 52,14 - 12,957 X$$

Dari persamaan trend di atas, maka proyeksi/perkiraan DSCR Kabupaten Tulang Bawang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel 4.20.

Tabel 5.20

Proyeksi Perkembangan DSCR Kabupaten Tulang Bawang

Tahun Anggaran 2017 – 2021

No	Tahun Anggaran	Proyeksi DSCR (%)
1	2017	13,27
2	2018	0,31
3	2019	-12,65
4	2020	-25,6
5	2021	-38,56

Berdasarkan tabel 4.26 dapat diketahui bahwa proyeksi DSCR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun-tahun yang akan datang, akan terus mengalami penurunan.

5.1.6 Analisis Pertumbuhan PAD Kabupaten Tulang Bawang

Analisis pertumbuhan PAD dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan PAD yang telah dicapai. Analisis pertumbuhan PAD dapat diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan dengan cara membandingkan PAD tahun bersangkutan dengan PAD tahun sebelumnya.

a. Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012, diketahui bahwa jumlah total Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.68.673.500.000,00. PAD tersebut terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.19.178.930.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.25.482.970.000,00, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp.6.451.680.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.17.559.920.000,00. Sedangkan berdasarkan data perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013, diketahui bahwa jumlah PAD Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.77.180.270.000,00, yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.21.533.250.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.29.630.780.000,00, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp.8.759.870.000,00, serta Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah sebesar Rp.17.256.370.000,00.

Tabel 5.21
Ringkasan Perhitungan PAD Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012 dan 2013
(dalam ribuan rupiah)

Nomor	Uraian	Tahun Anggaran		Pertumbuhan (%)
		2012	2013	
1.1.1	Pajak Daerah	19.178.930	21.533.250	12,28
1.1.2	Retribusi Daerah	25.482.970	29.630.780	16,28
1.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah	6.451.680	8.759.870	35,78
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	17.559.920	17.256.370	-1,73
1.1	Total PAD	68.673.500	77.180.270	12,39

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{77.180.270.000 - 68.673.500.000}{68.673.500.000} \times 100\% = 12,39 \%$$

Berdasarkan tabel 5.21, dapat diketahui, bahwa selain pos Lain-lain PAD, seluruh komponen PAD pada tahun anggaran 2013 mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Sehingga, meskipun pos Lain-lain PAD mengalami penurunan pada tahun 2013, pertumbuhan PAD Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2013 meningkat sebesar 12,39%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2013, pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

b. Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008

Tabel 5.22

Ringkasan Perhitungan PAD Kabupaten Tulang Bawang

Tahun Anggaran 2013 dan 2014

(dalam ribuan rupiah)

Nomor	Uraian	Tahun Anggaran		Pertumbuhan (%)
		2013	2014	
1.1.1	Pajak Daerah	21.533.250	24.222.730	12,49
1.1.2	Retribusi Daerah	29.630.780	65.576.840	121,31
1.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah	8.759.870	15.043.630	71,73
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	17.256.370	31.627.490	83,28
1.1	Total PAD	77.180.270	136.470.690	76,82

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{136.470.690.000 - 77.180.270.000}{77.180.270.000} \times 100\% = 76,82\%$$

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013, diketahui bahwa jumlah total Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.77.180.270.000,00, yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.21.533.250.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.29.630.780.000,00, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp.8.759.870.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.17.256.370.000,00. Sedangkan berdasarkan data perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014, diketahui bahwa jumlah PAD Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.136.470.690.000,00, yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.24.222.730.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.65.576.840.000,00, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp.15.043.630.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.31.627.490.000,00.

Berdasarkan tabel 5.22 dapat diketahui, bahwa seluruh komponen PAD pada tahun anggaran 2014 mengalami peningkatan daripada tahun

sebelumnya. Sehingga, total PAD Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2014 meningkat sebesar 76,82%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2014, pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

c. Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015

Tabel 5.23

Ringkasan Perhitungan PAD Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (dalam ribuan rupiah)

Nomor	Uraian	Tahun Anggaran		Pertumbuhan (%)
		2014	2015	
1.1.1	Pajak Daerah	24.222.730	26.481.360	9,32
1.1.2	Retribusi Daerah	65.576.840	78.007.400	18,96
1.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah	15.043.630	15.747.510	4,68
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	31.627.490	14.786.010	-53,25
1.1	Total PAD	136.470.690	135.022.280	-1,06

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{135.022.280.000 - 136.470.690.000}{136.470.690.000} \times 100\% = -1,06\%$$

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014, diketahui bahwa jumlah total Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.136.470.690.000,00, yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.24.222.730.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.65.576.840.000,00, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp.15.043.630.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.31.627.490.000,00. Sedangkan berdasarkan data perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015, diketahui bahwa jumlah PAD Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.135.022.280.000,00, yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.26.481.360.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.78.007.400.000,00, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp.15.747.510.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.14.786.010.000,00.

Berdasarkan tabel 4.23 dapat diketahui, bahwa selain pos Lain-lain PAD, seluruh komponen PAD pada tahun anggaran 2015 mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Namun, meskipun sebagian besar pos PAD mengalami peningkatan, tingkat pertumbuhan PAD pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,06%. Hal ini disebabkan oleh penurunan pos Lain-lain PAD yang cukup signifikan, yaitu sebesar lebih dari 50%. Dan hal ini menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2015, pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tidak mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

d. Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015, diketahui bahwa jumlah total Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.135.022.280.000,00, yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.26.481.360.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp 78.007.400.000,00, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp. 15.747.510.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.14.786.010.000,00. Sedangkan berdasarkan data perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016, diketahui bahwa jumlah PAD Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.153.802.040.000,00, yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.30.841.170.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.96.585.340.000,00, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp.11.953.810.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.14.421.720.000,00.

Tabel 5.24
Ringkasan Perhitungan PAD Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (dalam ribuan rupiah)

Nomor	Uraian	Tahun Anggaran		Pertumbuhan (%)
		2015	2016	
1.1.1	Pajak Daerah	26.481.360	30.841.170	16,46
1.1.2	Retribusi Daerah	78.007.400	96.585.340	23,82
1.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah	15.747.510	11.953.810	-24,09
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	14.786.010	14.421.720	-2,46
1.1	Total PAD	135.022.280	153.802.040	13,91

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{135.022.280.000 - 136.470.690.000}{136.470.690.000} \times 100\% = -1,06\%$$

Berdasarkan tabel 4.24 dapat diketahui, bahwa untuk tahun anggaran 2016, komponen PAD yang berupa Pajak Daerah serta Retribusi Daerah mengalami peningkatan daripada tahun anggaran sebelumnya, masing-masing sebesar 16,46% dan 23,82%. Sedangkan untuk pos Bagian Usaha Laba Daerah serta Lain-lain PAD, mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 24,09% dan 2,46%. Namun, meskipun pos Bagian Usaha Laba Daerah serta Lain-lain PAD mengalami penurunan, tingkat pertumbuhan PAD pada tahun 2016 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 13,91%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2016, pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

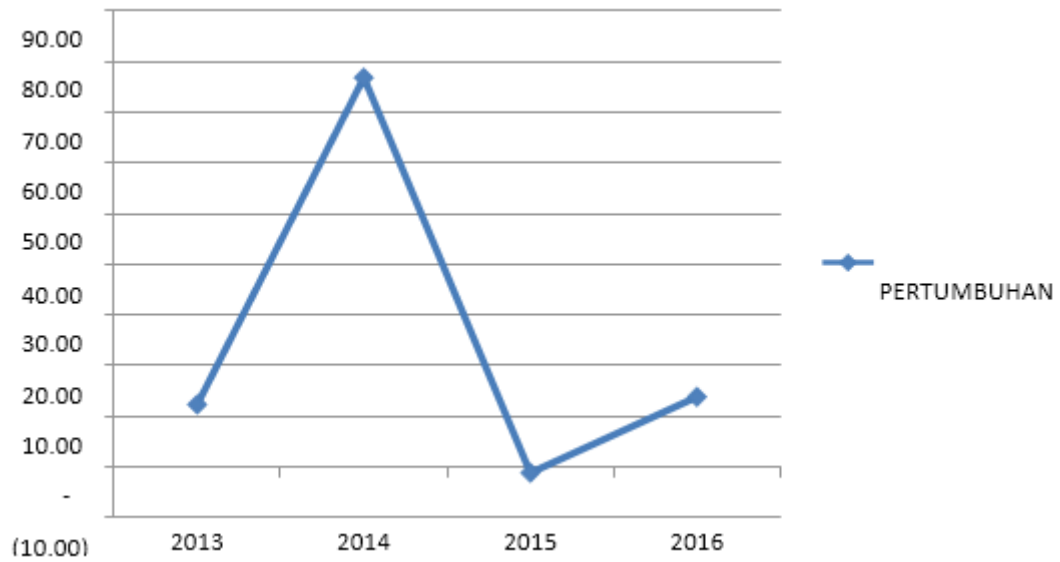
Tabel 5.25
Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	% Pertumbuhan
2012	68.673.500.000	--
2013	77.180.270.000	12,39
2014	136.470.690.000	76,82
2015	135.022.280.000	-1,06
2016	153.802.040.000	13,91

Sumber data: Data diolah

Gambar 5.7

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016



Dari tabel 5.25 di atas, terlihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode, ke periode berikutnya.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Analisis Rasio Keuangan APBD

5.2.1.1 Rasio Kemandirian

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 mengenai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 8,99%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat dikatakan masih rendah, artinya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dinilai masih tinggi. Hal ini diperkuat dengan grafik yang terdapat pada Gambar 4.3 mengenai pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2012 hingga 2016. Pada Gambar 4.3, terlihat bahwa lebih dari 75% komponen pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan, dimana dana perimbangan merupakan dana bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat bagi daerah otonom.

Berdasarkan perhitungan mengenai rasio kemandirian Kabupaten Tulang Bawang, diketahui bahwa tahun anggaran 2014 memiliki tingkat kemandirian tertinggi dengan nilai rasio sebesar 10,66%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2014 memiliki kemandirian daerah yang lebih baik dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat daripada tahun anggaran lainnya. Sedangkan tingkat kemandirian yang paling rendah terjadi pada tahun anggaran 2013 dengan tingkat rasio sebesar 6,95%. Hal ini diperkuat dengan grafik yang penulis cantumkan pada Gambar 4.4 mengenai rasio kemandirian Kabupaten Tulang Bawang. Pada gambar tersebut, diketahui bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Tulang Bawang relatif fluktuatif.

Pada tahun anggaran 2012, tingkat kemandirian Kabupaten Tulang Bawang mencapai 7,28%. Namun pada tahun selanjutnya, tingkat kemandirian menurun pada level 6,95% meskipun pada tahun bersangkutan, PAD Kabupaten Tulang Bawang meningkat. Hal ini disebabkan oleh tidak sebandingnya peningkatan PAD dengan peningkatan Pendapatan Daerah. Pada tahun 2013, PAD hanya meningkat sebesar 12,39%, sedangkan Pendapatan Daerah meningkat sebesar 17,75%. Peningkatan Pendapatan Daerah tersebut berasal dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah, dimana pada tahun anggaran 2012, tidak terdapat pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, artinya nilai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sama dengan nol. Sedangkan pada tahun 2013, terdapat nilai pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp50.714.710.000,00.

Tingkat kemandirian Kabupaten Tulang Bawang pada tahun anggaran 2014, meningkat lebih dari 50% daripada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan, peningkatan PAD pada tahun 2014 lebih dari 75%. Peningkatan tajam PAD tersebut berasal dari peningkatan pos Retribusi Daerah, dimana pos tersebut mengalami peningkatan lebih dari 100% daripada tahun sebelumnya. Selain itu, pos Bagian Laba Usaha Daerah dan pos Lain-lain PAD yang Sah, mengalami peningkatan lebih dari 70%. Sedangkan untuk pos Pajak daerah, hanya meningkat sebesar 12,5%. Namun, meskipun peningkatan PAD mencapai lebih dari 75%, tingkat kemandirian Kabupaten Tulang Bawang tetap tergolong sangat rendah, karena tingkat kemandirian masih berada di bawah 25%. Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang harus berusaha meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan perolehan PAD Kabupaten Tulang Bawang, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam kaitan dengan usaha peningkatan PAD, maka kebijakan yang dapat ditempuh ialah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PAD, sehingga diharapkan PAD dapat lebih berperan, dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kebijakan dan usaha intensifikasi PAD ialah usaha berupa peningkatan PAD dari sumber-sumber PAD yang telah ada atau telah berjalan selama ini. Sedangkan usaha ekstensifikasi PAD ialah berupa mencari dan menggali sumber-sumber PAD baru dalam batas peraturan perundang-undangan.

5.2.1.2 Indeks Kemampuan Rutin

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.9 mengenai tingkat kemampuan rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 23,59%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kemampuan rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong masih kurang mampu dalam rangka membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah. Berdasarkan nilai indeks kemampuan rutin Kabupaten Tulang Bawang, tahun

anggaran 2016 memiliki tingkat kemampuan tertinggi dengan nilai rasio sebesar 39,12%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2016 memiliki kemampuan keuangan dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat yang lebih baik daripada tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan tingkat kemampuan rutin yang paling rendah terjadi pada tahun anggaran 2012 dengan tingkat rasio sebesar 8,65%.

Hasil dari analisis IKR ini berhubungan dengan hasil analisis atas kemandirian daerah, dimana pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang kurang mandiri dalam hal keuangan, dan masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang harus berusaha meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan PAD dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

5.2.1.3 Rasio Efektivitas

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.12 mengenai tingkat efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 115,43%. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat dikatakan efektif dalam melakukan pemungutan PAD karena berada pada nilai minimum rasio efektifitas yaitu diatas 100%.

Berdasarkan rasio efektivitas selama 2012-2016, tahun anggaran 2012 memiliki tingkat efektivitas anggaran tertinggi dengan nilai rasio sebesar 129,11%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dalam rangka merealisasikan tujuan entitas yang telah ditetapkan sebelumnya daripada tahun anggaran setelahnya. Sedangkan tingkat efektivitas yang paling rendah terjadi pada tahun anggaran 2016 dengan tingkat rasio sebesar 102,99%.

Hasil dari analisis rasio ini, diketahui bahwa keuangan pemerintah daerah cukup efektif meskipun cenderung menurun. Sedangkan rasio kemandirian serta IKR menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Tulang Bawang masih tergolong kurang, dalam hal kemandirian daerah, serta kemampuan rutinnya. Hal ini menggambarkan bahwa usaha intensifikasi PAD telah berhasil dilaksanakan, karena realisasi penerimaan PAD lebih besar daripada penerimaan PAD

berdasarkan potensi riil daerah. Oleh sebab itu, usaha peningkatan PAD perlu dilakukan guna mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam hal membiayai pengeluaran rutin daerah, dengan cara ekstensifikasi PAD, atau menggali sumber-sumber PAD baru. Contohnya, pemungutan pajak daerah untuk pemilik pemondokan (rumah kost).

5.2.1.4 Rasio Efisiensi

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.15 mengenai tingkat efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 3,016%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat dikatakan sangat efisien dalam rangka memungut PAD guna merealisasikan target penerimaan PAD yang telah dianggarkan sebelumnya dalam rancangan APBD Kabupaten Tulang Bawang .

Berdasarkan rasio efisiensi anggaran selama tahun anggaran 2012-2016, tahun anggaran 2012 memiliki tingkat efisiensi anggaran tertinggi dengan nilai rasio sebesar 7,48%. Sedangkan tingkat efisiensi anggaran yang paling rendah terjadi pada tahun anggaran 2016 dengan tingkat rasio sebesar 1,25%.

Berdasarkan hasil analisa di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mampu memungut PAD secara efisien. Hal ini dibuktikan dengan kinerja pemerintah daerah yang telah meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD.

5.2.1.5 Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.18, Kabupaten Tulang Bawang memiliki nilai DSCR diatas nilai minimum yang ditetapkan oleh PP nomor 58 Tahun 2012 Pasal 116 yaitu di atas 2,5%. Meskipun cenderung terjadi penurunan nilai rasio setiap tahunnya, tetapi nilai rasio Pemda Kabupaten Tulang Bawang masih berada diatas batas minimum DSCR. Hal ini menerangkan bahwa Pemda Kabupaten Tulang Bawang dapat melakukan pinjaman kepada pihak eksternal.

Kabupaten Tulang Bawang memiliki nilai DSCR yang cenderung menurun pada setiap tahun anggarannya, sehingga jumlah maksimal angsuran pokok atas pinjaman selalu menurun. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan Pemda Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka melakukan pinjaman kepada pihak

eksternal semakin menurun. Sehingga, Pemda Kabupaten Tulang Bawang harus meningkatkan atau mempertahankan kemampuan keuangannya jika ingin melakukan pinjaman kepada pihak eksternal pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

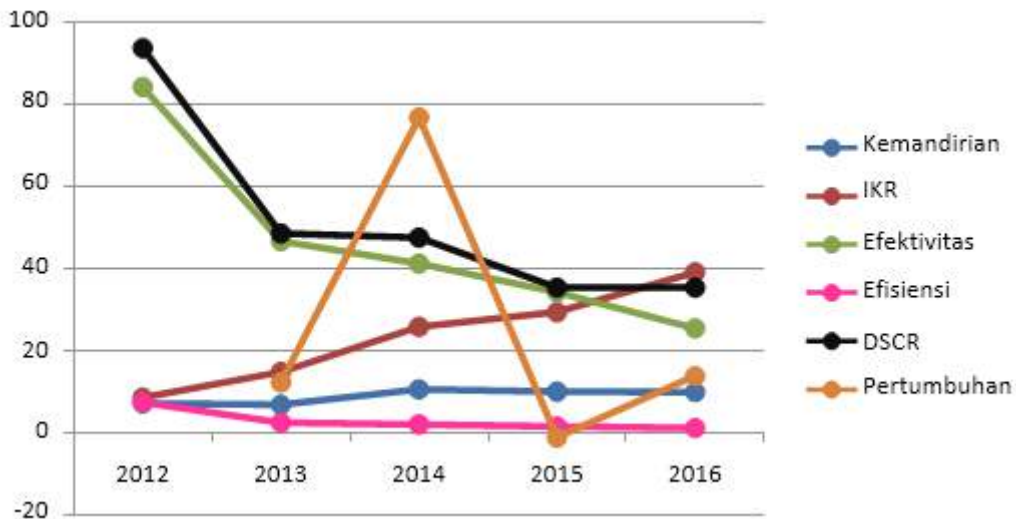
5.2.1.6 Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.25, pertumbuhan PAD Kabupaten Tulang Bawang cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2009 sempat mengalami penurunan tipis sebesar 1,06%. Namun pada tahun berikutnya, Pemda Kabupaten Tulang Bawang mampu meningkatkan kembali pertumbuhan PAD sebesar 13,91%. Pada tahun 2014, pertumbuhan PAD mengalami peningkatan tertinggi sebesar 76,82%.

Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang terdapat di daerahnya sehingga pendapatan yang dihasilkan dari pos PAD mengalami pertumbuhan yang meningkat.

Gambar 5.8 menggambarkan perbandingan antara beberapa analisis rasio keuangan yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Dari gambar tersebut dapat dilihat, bahwa rasio kemandirian, yang merupakan perbandingan antara total PAD dan total Pendapatan Daerah, berhasil meningkat pada 3 tahun pertama, yaitu pada tahun 2012 hingga tahun 2014. Akan tetapi, pada 2 tahun selanjutnya, tingkat kemandirian justru mengalami penurunan. Dilihat dari nilai nominal PAD Kabupaten Tulang Bawang, sebenarnya selalu meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, prosentase peningkatan PAD tersebut tidak sebanding dengan peningkatan prosentase Dana Perimbangan, sehingga rasio kemandirian cenderung menurun selama 3 tahun terakhir.

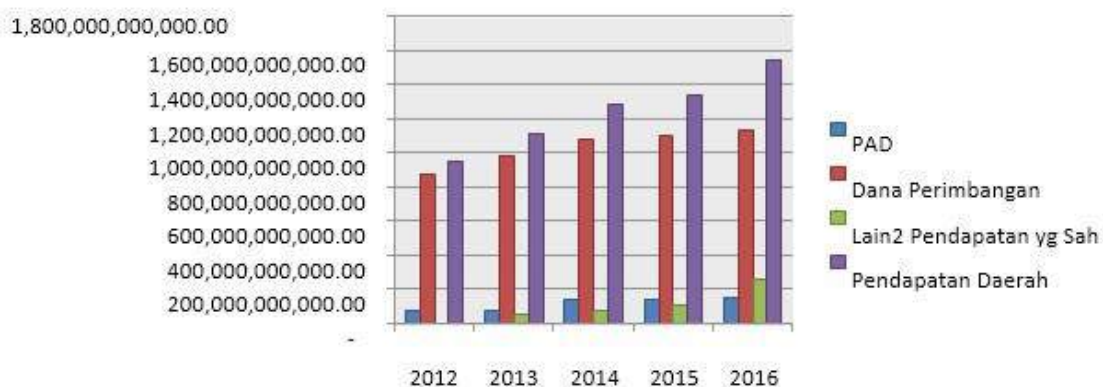
Gambar 5.8
 Analisis Rasio Keuangan Pemda Kab.Tulang Bawang
 Tahun Anggaran 2012-2016



Sedangkan untuk rasio IKR, yang merupakan perbandingan antara PAD dengan Belanja Rutin daerah, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Artinya, pemerintah telah mampu meminimalisir pengeluaran rutin pemerintah daerah dan mengoptimalkan PAD. Namun, tren peningkatan tersebut tidak berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang telah mampu mengatasi seluruh pengeluarannya. Karena hasil dari analisis rasio IKR menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang masih kurang mampu membiayai seluruh pengeluarannya.

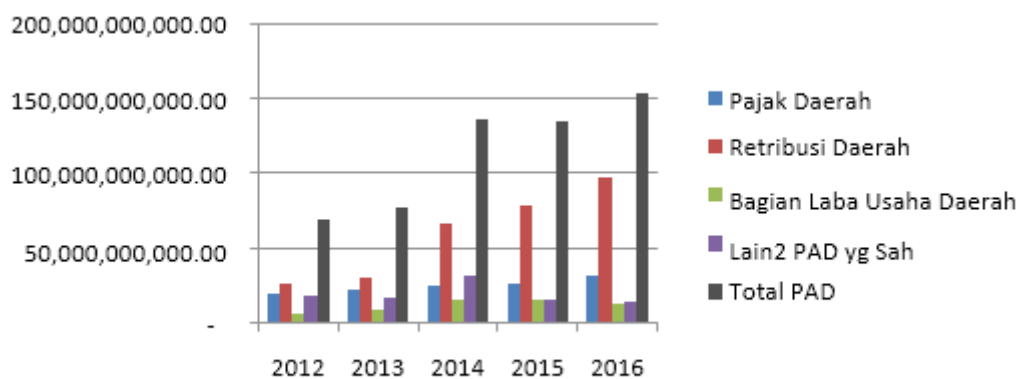
Dan untuk empat rasio keuangan selanjutnya, yang terdiri dari rasio efektivitas, rasio efisiensi, DSCR, serta rasio pertumbuhan sama-sama memiliki trend menurun setiap tahunnya.

Gambar 4.9
 Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
 Tahun Anggaran 2012-2016



Berdasarkan hasil beberapa analisa rasio keuangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang memerlukan upaya-upaya konkrit dari pemerintah daerah untuk secara perlahan mampu mengurangi ketergantungan atas sumber dana yang berasal dari luar/ekstern. Upaya-upaya konkrit tersebut dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Hairunisya (2008, dalam Febriyanti,2011) mengatakan bahwa hal tersebut perlu adanya usaha dari pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber dari pihak eksternal, baik melalui pengoptimalan sumber pendapatan yang telah ada maupun dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai pusat dan provinsi. Pengoptimalan PAD tersebut perlu dilakukan terutama untuk pos Pajak Daerah dan pos Bagian Laba Usaha Daerah, karena jika dilihat pada Gambar 5.8, dapat diketahui bahwa prosentase rata-rata atas pos Pajak Daerah terhadap PAD hanya berkisar 23% per tahun. Sedangkan prosentase rata-rata untuk pos Bagian Laba Usaha Daerah, hanya berkisar 10% per tahun.

Gambar 5.10
Pendapatan Asli Daerah Kab.Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016



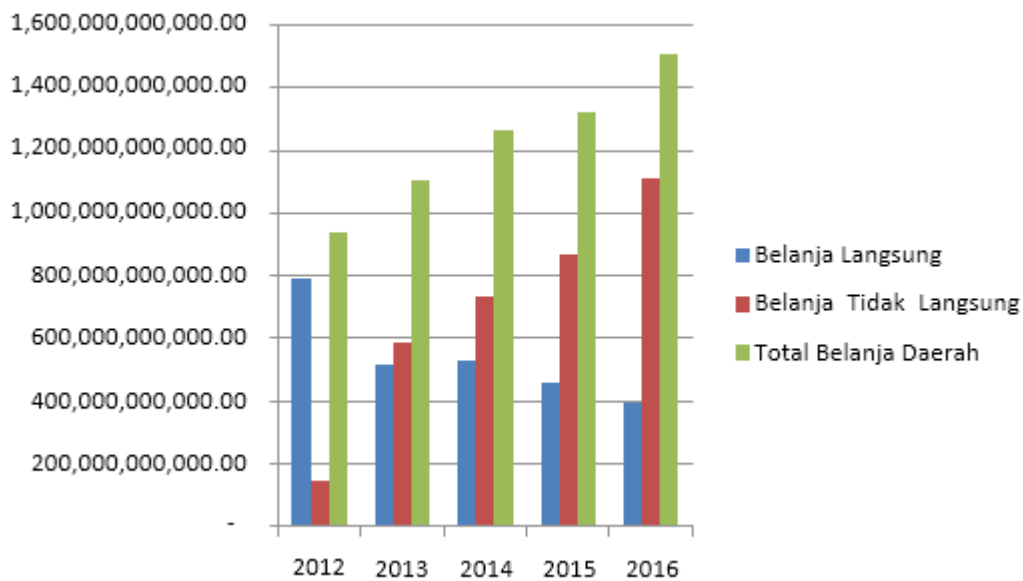
Sumber : data diolah.

Usaha peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Jika dilihat dari rasio efektivitas, diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang telah mampu mengelola keuangan daerah secara efisien. Artinya, intensifikasi telah dilaksanakan dengan optimal. Hal ini terbukti dari hasil analisis rasio efektivitas, dimana tingkat efektivitas mampu melebihi 100%, meskipun tren rasionya menurun. Oleh sebab itu, usaha peningkatan PAD perlu dilakukan dengan cara

ekstensifikasi PAD, yaitu dengan cara menggali sumber-sumber PAD baru. Hal ini perlu dilakukan karena meskipun pemerintah telah mengelola keuangan dengan efektif, namun keuangan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu, PAD Kabupaten Tulang Bawang masih belum mampu membiayai seluruh pengeluaran rutin pemerintah.

Gambar 5.11

Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016



Sumber : data diolah.

Grafik pada Gambar 5.11 menunjukkan perkembangan belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang, yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2012 hingga 2016. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa total belanja daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, peningkatan belanja tersebut tidak digunakan untuk meningkatkan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Sebagian besar anggaran belanja tersebut justru dialokasikan untuk belanja tidak langsung, yaitu belanja yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung, seperti belanja pegawai. Pada Gambar 4.9 terlihat bahwa belanja tidak langsung, meningkat setiap tahunnya. Sebaliknya, belanja langsung justru mengalami penurunan setiap tahunnya. Artinya, peningkatan jumlah belanja daerah setiap tahun, tidak disebabkan oleh meningkatnya alokasi belanja bagi pembangunan daerah, namun disebabkan oleh meningkatnya alokasi belanja gaji bagi para pegawai pemerintah daerah. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat kesehatan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong kurang sehat, karena dilihat dari perkembangan alokasi belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang, selama 5 tahun terakhir, dapat diketahui bahwa lebih dari 60% belanja daerah, dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai.

5.2.2 Hubungan Antar Rasio

Salah satu komponen yang paling penting untuk digunakan sebagai indikator guna mengukur kelima rasio di atas adalah pendapatan asli daerah (PAD). Maka dari itu, pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendapatan Daerah harus lebih efektif dalam melakukan pemungutan PAD. Bertolak dari penelitian di atas, pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan PAD harus semakin ditingkatkan karena PAD merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam pendapatan daerah. Jika PAD di daerah yang lain semakin meningkat maka, kemandirian daerah tersebut semakin meningkat sebab ketergantungan terhadap pihak eksternal semakin menurun. Peningkatan PAD sekaligus juga dapat menggambarkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak atau retribusi.

Semakin meningkatnya alokasi belanja rutin pemerintah daerah, otomatis akan mengurangi alokasi pada belanja pembangunannya. Jika PAD suatu daerah tersebut kurang dan pemerintah daerah ingin terus melakukan pembangunan pada daerahnya, biasanya suatu daerah melakukan pinjaman jangka panjang kepada pihak eksternal.

Namun menurut PP nomor 58 Tahun 2012 Pasal 116, nilai DSCR pemerintah daerah harus diatas 2,5%. DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, bagian daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian lainnya serta Dana Alokasi umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, biaya, pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Oleh sebab itu, semakin banyak pemerintah daerah melakukan pinjaman kepada pihak eksternal, kemandirian daerah tersebut akan menurun. Peran Dinas Pendapatan Daerah dalam hal memungut PAD juga harus ditingkatkan agar semakin efektif dalam memungut PAD sehingga pertumbuhan PAD pada tahun-tahun berikutnya semakin meningkat. Usaha untuk meningkatkan PAD tidak hanya dilakukan dengan mengoptimalkan intensifikasi PAD, namun pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan PAD melalui ekstensifikasi PAD, yaitu menggali sumber-sumber PAD

baru.

Selain usaha untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah juga harus mengurangi alokasi belanja rutinnya agar pembangunan di daerahnya tersebut juga semakin meningkat. Karena sebagai bagian dari negara berkembang, serta tuntutan otonomi daerah, pemerintah daerah juga perlu berusaha untuk meningkatkan pembangunan daerahnya dan mengurangi tingkat ketergantungan daerah pada bantuan pemerintah pusat.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tingkat kemandirian keuangan daerah serta tingkat kesehatan keuangan pemerintah daerah dalam rangka penerapan otonomi daerah. Pengujian terhadap tingkat kesehatan keuangan pemerintah daerah ditentukan dengan menggunakan analisis rasio-rasio keuangan.

Berdasarkan analisa data dan pembahasan yang telah peneliti uraikan dalam bab 4, dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong masih sangat rendah, dengan rata-rata antara tahun anggaran 2012 – 2016 sebesar 8,99%. Artinya, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, masih sangat tinggi.
2. Beberapa rasio keuangan menunjukkan trend meningkat. Namun sebagian besar justru menunjukkan trend menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kurang optimal dalam hal mengelola keuangan daerah.
3. Dilihat dari beberapa rasio yang telah peneliti uraikan dalam bab 4, keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong kurang sehat. Bahkan cenderung menuju kebangkrutan daerah. Hal ini peneliti simpulkan dari besarnya alokasi belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang, dimana lebih dari 60% belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang dialokasikan bagi belanja pegawai. Artinya, sebagian besar pendapatan daerah tidak dialokasikan bagi pembangunan daerah, melainkan justru dialokasikan untuk membayar gaji pegawai pemerintah daerah. Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya usaha untuk memperbaikinya, Kabupaten Tulang Bawang terancam mengalami kebangkrutan, karena tidak ada lagi anggaran belanja yang dialokasikan bagi pembangunan.

5.2 Saran

1. Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat berusaha untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga menurunkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Usaha tersebut tidak hanya berupa optimalisasi intensifikasi PAD, namun juga upaya melalui ekstensifikasi PAD. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu meminimalisir alokasi belanja rutinnya, dan lebih meningkatkan alokasi belanja modal.
2. Perluasan obyek penelitian dengan periode pengamatan yang lebih panjang dapat dilakukan bagi para peneliti selanjutnya dengan mengacu pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota se Jawa - Bali)*. Jurnal SNA IX. Padang.
- Adi, Priyo Hari dan David Harianto. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita*. Jurnal SNA X. Makassar.
- Adi, Priyo Hari dan Wirawan Setiaji. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa - Bali)*. Jurnal SNA X. Makassar.
- Anthony, Robert N, John Dearden, dan Norton M. Bedford. 1993. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi Keenam. Jilid 2. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Anthony, Robert N, Vijay Govindarajan. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jilid 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Berti, Emelia. 2006. *Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 di Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Calia, Roland dan Woods Bowman. 1997. *Evaluating Local Government Financial Health*. Chicago.
- Dajan, Anto. 1986. *Pengantar Metode Statistik Jilid 1*. LP3ES. Jakarta.
- Detisa, Dora. 2009. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Khusus pada Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Eriadi. 2004. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah (Suatu Tinjauan terhadap Perubahan Regulasi Keuangan Daerah)*. Tesis. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Fauziana, Ayu. 2009. *Analisis Rasio Keuangan dan Model Z-Score untuk Menilai Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Febriyanti, Dyvita. 2016. *Analisis Rasio Keuangan Guna Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sumatra Periode Anggaran Tahun 2011-2014*. Skripsi. Universitas Andalas.

Hansen, Don R. dan Maryanal M. Mowen. 1997. *Akuntansi Manajemen*. Edisi 4. Jilid 1. Erlangga. Bandung.

Haryanto, Joko Tri. *Potret PAD dan Relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah*.

<http://didicarsidiawan.wordpress.com/2009/04/29/mengungkap-penyebab-lambatnya-penyerapan-anggaran-belanja-pemerintah/>

http://id.wikipedia.org/wiki/AnggaranSektor_Publik#KarakteristikAnggaran_Sektor_Publik

<http://joernalakuntansi.wordpress.com/2009/08/31/kinerja-keuangan-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-pengangguran-dan-kemiskinan-pendekatan-analisis-jalur/>

<http://journal.uui.ac.id/index.php/JAAI/article/viewFile/390/304>

<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8F558006-ECB1-4FFA-989F-53DCD3B5A0FF/11116/Boks3.pdf>

[http://www.docstoc.com/docs/22735011/FLYPAPER-EFFECT-PADA-DANA-ALOKASI-UMUM-\(DAU\)-DAN-PENDAPATAN.](http://www.docstoc.com/docs/22735011/FLYPAPER-EFFECT-PADA-DANA-ALOKASI-UMUM-(DAU)-DAN-PENDAPATAN.)

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE. Yogyakarta.

Kuncoro, Haryo. 2007. *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Jurnal SNA X. Makassar.

Kusumadewi, Diah Ayu dan Arief Rahman. 2007. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.

Maimunah, Mutiara dan Rusdi Akbar. 2008. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mulyana, Budi, Subkhan dan Kuwat Slamet. 2006. *Keuangan Daerah : Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP). Jakarta.

Nordiawan D., Iswahyudi, dan Rahmawati M. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.

Nordiawan D. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.

- Nurkhamid, Muh. 2008. *Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.3.
- Padovani, Emanuele, Francesca Manes Rossi dan Rebecca Levy Orelli. 2010. *The Use of Financial Indicators to Determine Financial Health of Italian Municipalities*. Toulouse.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2011. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2012. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2013. *Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013 Buku I*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2013. *Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013 Buku II*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2013. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014 Buku I*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2013. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014 Buku II*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2014. *Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014 Buku I*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2014. *Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014 Buku II*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2014. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015 Buku I*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2014. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015 Buku II*. Tulang Bawang.

- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2015. *Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015 Buku I*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2015. *Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015 Buku II*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2015. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016*. Tulang Bawang.
- Penman, Stephen H. dan Doron Nissim. 1999. *Ratio Analysis and Equity Valuation*.
- Suryanovi, Sri. 2008. *Kajian Standar Akuntansi Pemerintahan, Keharmonisan dan Kejelasan Penerapan Basis Kas Menuju Akrual Berdasarkan Perspektif UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.3.
- Tambun, Keriahen Tarigan. 2005. *Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sektor-Sektor Berpotensi yang Dapat Dikembangkan di Pemerintah Kota Medan*. Tesis. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Tunggal, Amin Widjaya. 1995. *Dasar-dasar Budgeting*. Rineka Cipta. Jakarta.

**ANALISIS FINANCIAL DISTRESS DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG**

JURNAL ILMIAH

DITULIS OLEH :

Hendri Dunan,S.E. M.M.

NIDN: 0230096501

Dra.Farida Efriyanti,M.M.

NIDN0027046101



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

2017

**ANALISIS FINANCIAL DISTRESS DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Hendri Dunan
Farida Efriyanti**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kondisi kesulitan keuangan (financial distress) di Kabupaten Tulang Bawang. Financial distress diinterpretasikan sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan fasilitas pelayanan public pada level yang layak.

Beberapa indikator digunakan memprediksi terjadinya financial distress, yaitu komposisi pendapatan, komitmen keuangan, populasi penduduk, dan fenomena pemekaran wilayah yang terjadi di Indonesia dan pelayanan publik.

Kabupaten Tulang Bawang dipilih sebagai sampel dan obyek penelitian dan sampel penelitian.

Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang masih rendah rata-rata 8,99% antara Tahun 2012-2016. Beberapa rasio lainnya menunjukkan trend yang meningkat yaitu ratio kemandirian, ratio efektivitas, ratio efisiensi, dan debt service coverage ratio (DSCR) rata-rata 2,5%, artinya fasilitas pelayanan publik perlu ditingkatkan dengan mengurangi belanja pegawai seminimal mungkin.

Kata kunci: Desentralisasi, Financial Distress, Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, DSCR, dan Pelayanan Publik.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, keberhasilan program ini mulai banyak dipertanyakan. Otonomi daerah yang tadinya diharapkan mampu memperbaiki masalah ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, justru menimbulkan masalah baru akibat penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Adanya temuan lembaga independen yang ikut mengawasi pelaksanaan otonomi daerah juga telah menyebutkan bahwa kini kondisi keuangan daerah cenderung kritis dan mengkhawatirkan. Kecenderungan kritis dan mengkhawatirkan ini ditandai dengan adanya fenomena belanja pegawai yang lebih besar dibandingkan dengan belanja-belanja lainnya antara 60-70% dari pendapatan daerah, penataan dan pengembangan sumber daya dan aset daerah yang belum optimal dan adanya disparitas pembangunan wilayah khususnya kota/kabupaten antar provinsi masih timpang.

Pembiaran terjadinya rekrutmen pegawai secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah akan berdampak pada berkurangnya dana untuk membangun fasilitas publik, percepatan pembangunan daerah, penciptaan pelayanan yang berkualitas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam kebijakan otonomi daerah.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Secara merata diseluruh Indonesia perilaku boros pemerintah daerah yang menguras separuh lebih anggarannya untuk belanja pegawai lebih dari 50%.
2. Sisa anggaran yang masih tersedia untuk belanja program dalam rangka memenuhi pelayanan publik hanya sebesar 9% sampai dengan 14%.
3. Terjadinya pemborosan anggaran daerah akan berdampak pada

berkurangnya dana untuk membangun fasilitas publik, percepatan pembangunan daerah, penciptaan pelayanan yang berkualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

1.3. Permasalahan Penelitian

Apakah analisis financial distress dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya penurunan terhadap fasilitas pelayanan publik dan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang?.

1.4. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat tentang financial distress pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi *financial distress* dengan menggunakan indikator keuangan dan non-keuangan. Indikator keuangan yang digunakan meliputi komposisi pendapatan dan komitmen utang, sedangkan indikator non-keuangan meliputi kondisi sosial-ekonomi dan fenomena pemekaran yang terjadi di Indonesia. Derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan digunakan untuk melihat kondisi pendapatan pemerintah daerah. Populasi penduduk digunakan untuk melihat kondisi sosial-ekonomi pemerintah daerah (sebagai ukuran pembayaran transfer). Penentuan indikator-indikator tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan teori dan kondisi yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi

daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing.

2.1.2. Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Bab V UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, serta pemerintah/ lembaga asing. Sementara itu, Bab VI UU No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah terjadi dalam bentuk:

- a. Pengalokasian transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian
- b. Pemberian pinjaman dan/atau hibah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau sebaliknya dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat
- c. Pemberian Pinjaman/hibah/penyertaan modal oleh pemerintah pusat kepada perusahaan daerah atau sebaliknya pemberian pinjaman/hibah oleh perusahaan daerah

kepada pemerintah pusat

- d. Pemberian pinjaman/hibah oleh perusahaan negara kepada pemerintah daerah.

2.1.3. Financial Distress

Pada sektor publik, Jones dan Walker (2007) mendefinisikan *financial distress* sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan ini dikarenakan pemerintah tidak memiliki kecukupan dana untuk membangun infrastruktur pelayanan publik, seperti jalan, jembatan dan fasilitas publik lainnya. Pada pemerintah daerah, *Financial Distress* ditandai dengan tidak terkendalinya pengeluaran yang dilakukan untuk belanja rutin, sehingga pemerintah daerah menekan pengeluaran untuk belanja modal atau belanja investasi.

2.2. Pengaruh kemandirian Keuangan terhadap Prediksi Financial Distress

Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan mengenai hubungan antar organisasi.

Sebuah organisasi dipandang memiliki sifat seperti makhluk hidup (organisme) yang survivalitasnya akan tergantung pada lingkungan. Organisasi mengambil sumber daya dari lingkungannya, seperti bahan baku dan tenaga kerja. Organisasi yang mampu menguasai sumber daya vital atau bisa mengurangi ketidakpastian dalam hubungannya dengan organisasi lain akan memiliki kekuatan (power) yang paling besar (Peffer dan Salancik, 1978 dalam Gudono, 2009).

Padahal pemerintah daerah, kekuatan (power) sumber daya keuangan dapat tercermin dari besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut. Menurut Undang-Undang, Pemerintah daerah memiliki tiga komponen sumber pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain. Pemerintah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah rendah akan membutuhkan dana dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sumber dana tersebut diantaranya dapat berasal dari dana transfer pemerintah pusat/provinsi (dana perimbangan).

Sesuai pandangan teori ketergantungan sumber daya, pemerintah daerah yang memiliki kemandirian sumber daya keuangan memiliki kekuatan untuk *survive* dan terhindar dari financial distress. Kemandirian keuangan juga telah digunakan oleh peneliti terdahulu sebagai indikator dalam menilai kinerja keuangan pemerintah (Cheng, 1992; Christiaens, 1999; Christiaens dan Pateghem, 2007). Kloha, Weissert, dan Kleine (2005)

2.2.1. Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Prediksi Fiancial Distress

Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan bahwa organisasi adalah konsekwensi dari kemampuan mereka mempengaruhi, sehingga organisasi yang hidupnya tergantung pada subsidi pemerintah biasanya akan cenderung lebih taat pada perintah (aturan) pemerintah (Pfeffer dan Salancik, 1978 dalam Gudono, 2009). Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah akan bergantung pada transfer dana pemerintah pusat/provinsi, agar dapat mendanai program-programnya. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi dapat menyelenggarakan desentralisasi dengan mengandalkan pendapatan asli daerah lebih banyak, disamping dana transfer (perimbangan).

2.2.2. Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap Prediksi Fiancial Distress

Ketersediaan sumber daya untuk melunasi hutang merupakan sinyal kemampuan organisasi dalam memenuhi komitmen keuangan. Beberapa penelitian terdahulu, baik di sektor bisnis maupun sektor publik, menggunakan hutang sebagai indikator financial distress. Monti dan Garcia (2010) menggunakan *debt turnover ratio*, *non current debt ratio*, *debt coverage* dan *liabilities*

(*average*) untuk memprediksi financial distress jangka pendek perusahaan-perusahaan di Argentina. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan dalam memprediksi financial distress.

Wibowo dan Samekto (2013) menggunakan Current Liability ratio, dan Debt to Revenue ratio sebagai informasi akuntansi relevan dalam mengukur Financial distress pemerintah daerah di Sumatra.

Penelitiannya menghasilkan adanya hubungan yang cukup kuat dan searah antara ketiga variabel tersebut dengan financial distress. Sutaryo, dkk (2010) menggunakan *Current Liability Government Wealth*, *Current Liabilities*, *Long Term Debt to Total Asset*, dan *Debt to Revenue* sebagai nilai relevan informasi laporan keuangan terkait financial distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel-variabel tersebut.

2.2.3. Pengaruh Kompleksitas terhadap Prediksi Fiancial Distress

Organisasi yang kompleks akan dilengkapi dengan sistem informasi yang lebih canggih (*sophisticated*) dibanding organisasi sederhana (kecil). Pada organisasi yang kompleks terdapat sistem informasi yang efektif untuk menjamin ketersediaan informasi dan mengurangi kos informasi per unit. Sistem informasi yang efektif akan diperlukan pada organisasi yang kompleks untuk mengawasi ketercapaian tujuan organisasi (Hossain, 2008).

Kompleksitas pada riset akuntansi pemerintahan diukur dengan menggunakan proksi populasi penduduk suatu wilayah pada periode tertentu (Ingram, 1984; Robbins dan Austin, 1986; Evans dan Patton, 1987; Cheng, 1992; Christiaens, 1999; Christiaens dan Pateghem, 2007). Populasi dianggap sebagai ukuran pembayaran transfer pemerintah berkaitan dengan jumlah sumber daya yang mungkin dapat disalahgunakan oleh

pejabat pemerintah (agen). Jadi kota dengan populasi yang lebih besar diperkirakan akan menghasilkan kinerja yang lebih baik karena lebih banyak sumber daya yang dipertaruhkan (Evans dan Patton, 1987). Christiaens (1999) dan Christiaens dan Pateghem (2007) menemukan bahwa kota besar dengan jumlah penduduk yang lebih banyak memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik terhadap prinsip akuntansi. Penelitian ini juga menduga bahwa semakin banyak populasi penduduk yang dimiliki sebuah Kabupaten/Kota, maka probabilitas mengalami financial distress akan semakin kecil dikarenakan populasi penduduk menggambarkan besaran transfer (sumber daya) yang dimiliki pemerintah (Evans dan Patton, 1987).

2.2.4. Pengaruh Pemekaran Wilayah terhadap Fiancial Distress

Pelaksanaan otonomi daerah yang berlangsung sejak tahun 1999 memberikan aspek penting terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah. Salah satu tujuan pemekaran atau penggabungan wilayah adalah untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan berdemokrasi. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara lebih baik sebagai warga negara.

Namun, pemekaran dan penggabungan wilayah diduga akan berpengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami financial distress. Pemerintah daerah yang sudah lama terbentuk (tidak mengalami pemekaran), sudah memiliki pengalaman dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, sehingga diduga akan terhindar dari financial distress. Sebaliknya, pemerintah daerah yang baru terbentuk (hasil pemekaran), belum memiliki cukup pengalaman dalam pemerintahan sehingga memiliki kinerja yang lebih buruk dan berisiko mengalami financial distress. Amitabh (2006) menggunakan umur (pengalaman)

sebagai indikator dalam menilai kinerja pelaporan keuangan institusi pemerintah. Hasil temuannya menunjukkan bahwa pertumbuhan umur institusi pemerintah akan meningkatkan kinerja dan pengalaman mereka dalam praktik pelaporan keuangan. Hussein (2008) juga menggunakan umur organisasi dalam menjelaskan variasi dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan. Umur organisasi diketahui berpengaruh terhadap kinerja pelaporan keuangan.

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Pemerintah Provinsi dikecualikan dari populasi dengan pertimbangan adanya ketidaksetaraan wewenang dan sifat hubungan antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4.2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen dan catatan yang dikumpulkan oleh peneliti dari Pemerintah daerah kabupaten Tulang Bawang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari keuangan dan non keuangan. Data keuangan yang digunakan bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan data non keuangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data populasi penduduk dan data pemekaran daerah yang bersumber dari dokumen dan catatan Kementrian Dalam Negeri.

4.3. Organisasi Variabel Penelitian

Pada penelitian ini terdapat 6 (enam) variabel yang akan diujikan, yaitu satu variabel *dependent* (terikat) *Financial distress* (Y), serta 5 (lima) variabel *independent* (bebas) yaitu: Kemandirian Keuangan (X_1), derajat desentralisasi

(X₂), Solvabilitas (X₃), populasi penduduk (X₄), dan Pemekaran wilayah (X₅).

- **Kemandirian Keuangan**

Kemandirian keuangan mencerminkan sejauh mana pendapatan asli daerah (PAD) mampu memenuhi kebutuhan daerah. Variabel kemandirian keuangan daerah diukur dengan menggunakan rasio kemandirian :

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}}$$

- **Derajat Desentralisasi**

Derajat desentralisasi menunjukkan kontribusi pendapatan asli daerah dalam menyelenggarakan kebijakan desentralisasi.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

- **Solvabilitas**

Kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang tercermin dari rasio solvabilitas pemerintah daerah.

$$\text{Solvabilitas} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Utang}}$$

- **Populasi Penduduk**

Populasi penduduk suatu wilayah mencerminkan banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh wilayah (pemerintah daerah) tersebut.

$$\text{Size} = \ln \text{Populasi Penduduk}$$

- **Umur**

Umur pemerintah daerah merupakan variabel dami (dummy variable) yang dinyatakan melalui konstruk pemekaran atau penggabungan wilayah. Apabila pemerintah daerah bukan Daerah Autonomi Baru (bukan hasil pemekaran/penggabungan wilayah) maka pemerintah daerah tersebut diberi bobot 1, sedangkan apabila pemerintah daerah merupakan Daerah Autonomi Baru (terbentuk setelah tahun 1999) maka

pemerintah daerah tersebut diberi bobot 0.

- **Financial Distress**

Jones dan Walker (2007) mendefinisikan *financial distress* sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan.

Ketidakmampuan ini dikarenakan pemerintah tidak memiliki kecukupan dana untuk membangun fasilitas pelayanan publik. Indikasi financial distress dalam penelitian ini dilihat dari porsi realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran. Apabila pemerintah menghabiskan sebagian besar anggaran yang dimilikinya untuk belanja yang bersifat rutin (belanja operasi) maka dikhawatirkan Pemda tidak lagi memiliki kecukupan dana untuk kebutuhan membangun infrastruktur pelayanan publik, seperti membangun sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.

Realisasi Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Angka ideal untuk rasio belanja modal terhadap total belanja tidak diatur oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengatur sendiri porsi belanja daerah. Pada umumnya rasio belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2010). Namun, dalam rapat koordinasi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (2013) meminta agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja modal sekurang-kurangnya 30% dari total belanja. Tujuannya agar dapat mendorong pembangunan infrastruktur dan sesuai dengan Perpres No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (<http://www.antaraneews.com>).

Oleh karena itu, maka pada penelitian ini pemerintah daerah yang mengalokasikan belanja modal kurang dari 30% dianggap mengalami financial distress karena dana

yang dimilikinya habis untuk kebutuhan rutin (operasional) pemerintah daerah.

Variabel financial distress merupakan variabel dummy, dimana pemerintah daerah yang memiliki porsi belanja modal terhadap total belanja kurang dari 30% dianggap mengalami financial distress dan diberi skor 0, sedangkan pemerintah daerah yang memiliki porsi belanja modal terhadap total belanja lebih dari 30% dianggap tidak mengalami financial distress dan diberi skor 1.

4.5 Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dengan menggunakan LKPD pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Analisis regresi logistik biner (*binary logistic regression*) dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 18. Regresi logistik biner digunakan apabila variabel dependennya berupa variabel dikotomi atau variabel biner.

V. Pembahasan

5.1 Analisis Rasio Keuangan APBD

5.1.1 Rasio Kemandirian

Berdasarkan perhitungan mengenai rasio kemandirian Kabupaten Tulang Bawang, diketahui bahwa tahun anggaran 2014 memiliki tingkat kemandirian tertinggi dengan nilai rasio sebesar 10,66%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2014 memiliki kemandirian daerah yang lebih baik dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat daripada tahun anggaran lainnya. Sedangkan tingkat kemandirian yang paling rendah terjadi pada tahun anggaran 2013 dengan tingkat rasio sebesar 6,95%. Hal ini diperkuat dengan grafik yang penulis cantumkan pada Gambar 4.4 mengenai rasio kemandirian Kabupaten Tulang Bawang. Pada gambar tersebut, diketahui bahwa tingkat

kemandirian Kabupaten Tulang Bawang relatif fluktuatif.

Pada tahun anggaran 2012, tingkat kemandirian Kabupaten Tulang Bawang mencapai 7,28%. Namun pada tahun selanjutnya, tingkat kemandirian menurun pada level 6,95% meskipun pada tahun bersangkutan, PAD Kabupaten Tulang Bawang meningkat. Hal ini disebabkan oleh tidak sebandingnya peningkatan PAD dengan peningkatan Pendapatan Daerah. Pada tahun 2013, PAD hanya meningkat sebesar 12,39%, sedangkan Pendapatan Daerah meningkat sebesar 17,75%. Peningkatan Pendapatan Daerah tersebut berasal dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dimana pada tahun anggaran 2012, tidak terdapat pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, artinya nilai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sama dengan nol. Sedangkan pada tahun 2013, terdapat nilai pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.50.714.710.000,00.

Tingkat kemandirian Kabupaten Tulang Bawang pada tahun anggaran 2014, meningkat lebih dari 50% daripada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan, peningkatan PAD pada tahun 2014 lebih dari 75%. Peningkatan tajam PAD tersebut berasal dari peningkatan pos Retribusi Daerah, dimana pos tersebut mengalami peningkatan lebih dari 100% daripada tahun sebelumnya. Selain itu, pos Bagian Laba Usaha Daerah dan pos Lain-lain PAD yang Sah, mengalami peningkatan lebih dari 70%. Sedangkan untuk pos Pajak daerah, hanya meningkat sebesar 12,5%. Namun, meskipun peningkatan PAD mencapai lebih dari 75%, tingkat kemandirian Kabupaten Tulang Bawang tetap tergolong sangat rendah, karena tingkat kemandirian masih berada di bawah 25%. Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang harus berusaha meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan perolehan PAD Kabupaten Tulang Bawang, sehingga dapat

mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam kaitan dengan usaha peningkatan PAD, maka kebijakan yang dapat ditempuh ialah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PAD, sehingga diharapkan PAD dapat lebih berperan, dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kebijakan dan usaha intensifikasi PAD ialah usaha berupa peningkatan PAD dari sumber-sumber PAD yang telah ada atau telah berjalan selama ini. Sedangkan usaha ekstensifikasi PAD ialah berupa mencari dan menggali sumber-sumber PAD baru dalam batas peraturan perundang-undangan.

5.1.2 Indeks Kemampuan Rutin

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.9 mengenai tingkat kemampuan rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 23,59%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kemampuan rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong masih kurang mampu dalam rangka membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah.

Berdasarkan nilai indeks kemampuan rutin Kabupaten Tulang Bawang, tahun anggaran 2016 memiliki tingkat kemampuan tertinggi dengan nilai rasio sebesar 39,12%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2016 memiliki kemampuan keuangan dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat yang lebih baik daripada tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan tingkat kemampuan rutin yang paling rendah terjadi pada tahun anggaran 2012 dengan tingkat rasio sebesar 8,65%.

Hasil dari analisis IKR ini berhubungan dengan hasil analisis atas kemandirian daerah, dimana pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang kurang mandiri dalam hal keuangan, dan masih sangat bergantung pada bantuan

dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang harus berusaha meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan PAD dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

5.1.3 Rasio Efektivitas

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.12 mengenai tingkat efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 115,43%. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat dikatakan efektif dalam melakukan pemungutan PAD karena berada pada nilai minimum rasio efektifitas yaitu diatas 100%.

Berdasarkan rasio efektivitas selama 2012-2016, tahun anggaran 2012 memiliki tingkat efektivitas anggaran tertinggi dengan nilai rasio sebesar 129,11%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dalam rangka merealisasikan tujuan entitas yang telah ditetapkan sebelumnya daripada tahun anggaran setelahnya. Sedangkan tingkat efektivitas yang paling rendah terjadi pada tahun anggaran 2016 dengan tingkat rasio sebesar 102,99%.

Hasil dari analisis rasio ini, diketahui bahwa keuangan pemerintah daerah cukup efektif meskipun cenderung menurun. Sedangkan rasio kemandirian serta IKR menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Tulang Bawang masih tergolong kurang, dalam hal kemandirian daerah, serta kemampuan rutinnya. Hal ini menggambarkan bahwa usaha intensifikasi PAD telah berhasil dilaksanakan, karena realisasi penerimaan PAD lebih besar daripada penerimaan PAD berdasarkan potensi riil daerah. Oleh sebab itu, usaha peningkatan PAD perlu dilakukan guna mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, serta meningkatkan kemampuan

daerah dalam hal membiayai pengeluaran rutin daerah, dengan cara ekstensifikasi PAD, atau menggali sumber-sumber PAD baru. Contohnya, pemungutan pajak daerah untuk pemilik pemondokan (rumah kost).

5.1.4 Rasio Efisiensi

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.15 mengenai tingkat efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 3,016%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat dikatakan sangat efisien dalam rangka memungut PAD guna merealisasikan target penerimaan PAD yang telah dianggarkan sebelumnya dalam rancangan APBD Kabupaten Tulang Bawang .

Berdasarkan rasio efisiensi anggaran selama tahun anggaran 2012-2016, tahun anggaran 2012 memiliki tingkat efisiensi anggaran tertinggidengan nilai rasio sebesar 7,48%. Sedangkan tingkat efisiensi anggaran yang paling rendah terjadi pada tahun anggaran 2016 dengan tingkat rasio sebesar 1,25%.

Berdasarkan hasil analisa di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mampu memungut PAD secara efisien. Hal ini dibuktikan dengan kinerja pemerintah daerah yang telah meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD.

5.1.5 Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.18, Kabupaten Tulang Bawang memiliki nilai DSCR diatas nilai minimum yang ditetapkan oleh PP nomor 58 Tahun 2012 Pasal 116 yaitu di atas 2,5%. Meskipun cenderung terjadi penurunan nilai rasio setiap tahunnya, tetapi nilai rasio Pemda Kabupaten Tulang Bawang masih berada diatas batas minimum DSCR. Hal ini menerangkan bahwa Pemda Kabupaten Tulang Bawang dapat melakukan pinjaman kepada pihak eksternal.

Kabupaten Tulang Bawang memiliki

nilai DSCR yang cenderung menurun pada setiap tahun anggarannya, sehingga jumlah maksimal angsuran pokok atas pinjaman selalu menurun. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan Pemda Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka melakukan pinjaman kepada pihak eksternal semakin menurun. Sehingga, Pemda Kabupaten Tulang Bawang harus meningkatkan atau mempertahankan kemampuan keuangannya jika ingin melakukan pinjaman kepada pihak eksternal pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

5.1.6 Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.25, pertumbuhan PAD Kabupaten Tulang Bawang cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2009 sempat mengalami penurunan tipis sebesar

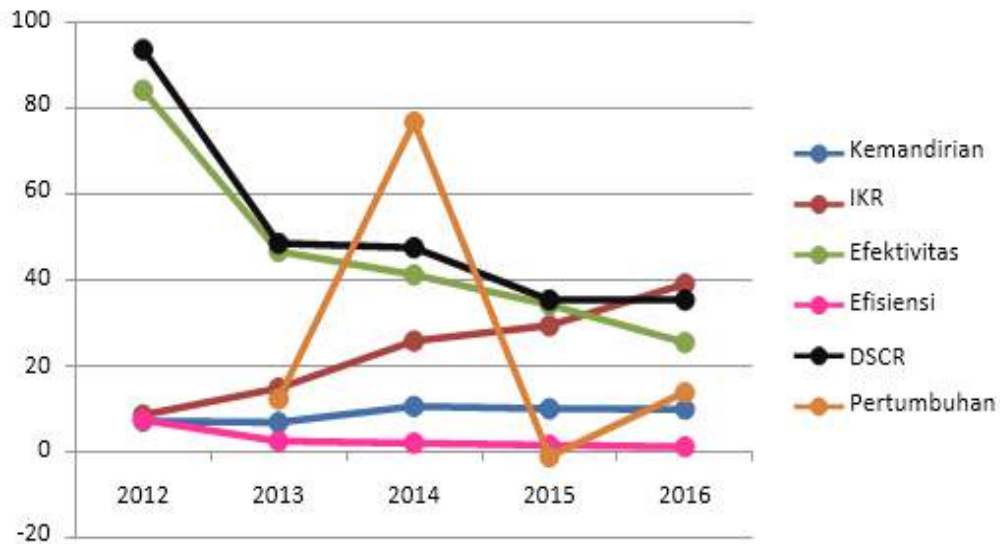
1,06%. Namun pada tahun berikutnya, Pemda Kabupaten Tulang Bawang mampu meningkatkan kembali pertumbuhan PAD sebesar 13,91%. Pada tahun 2014, pertumbuhan PAD mengalami peningkatan tertinggi sebesar 76,82%.

Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang terdapat di daerahnya sehingga pendapatan yang dihasilkan dari pos PAD mengalami pertumbuhan yang meningkat.

Gambar 5.8 menggambarkan perbandingan antara beberapa analisis rasio keuangan yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Dari gambar tersebut dapat dilihat, bahwa rasio kemandirian, yang merupakan perbandingan antara total PAD dan total Pendapatan Daerah, berhasil meningkat pada 3 tahun pertama, yaitu pada tahun 2012 hingga tahun 2014. Akan tetapi, pada 2 tahun selanjutnya, tingkat kemandirian justru mengalami penurunan. Dilihat dari nilai nominal PAD Kabupaten Tulang Bawang, sebenarnya selalu meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, prosentase peningkatan PAD

tersebut tidak sebanding dengan kemandirian cenderung menurun selama peningkatan prosentase Dana 3 tahun terakhir. Perimbangan, sehingga rasio

Gambar 5.8. Analisis Rasio Keuangan Pemda Kab.Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016



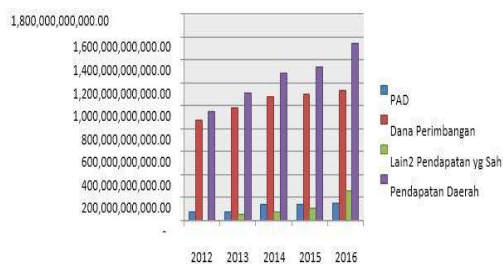
Sedangkan untuk rasio IKR, yang merupakan perbandingan antara PAD dengan Belanja Rutin daerah, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Artinya, pemerintah telah mampu meminimalisir pengeluaran rutin pemerintah daerah dan mengoptimalkan PAD. Namun, tren peningkatan tersebut tidak berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang telah

mampu mengatasi seluruh pengeluaran rutinnya. Karena hasil dari analisis rasio IKR menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang masih kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran rutinnya.

Dan untuk empat rasio keuangan selanjutnya, yang terdiri dari rasio efektivitas, rasio efisiensi, DSCR, serta rasio pertumbuhan sama-sama memiliki trend menurun setiap tahun.

disimpulkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang memerlukan upaya-upaya konkrit dari pemerintah daerah untuk secara perlahan mampu mengurangi ketergantungan atas sumber dana yang berasal dari luar/ekstern. Upaya-upaya konkrit tersebut dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Hairunisa (2008, dalam Febriyanti, 2011) mengatakan bahwa hal tersebut perlu adanya usaha dari pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber dari

Gambar 4.9
Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016

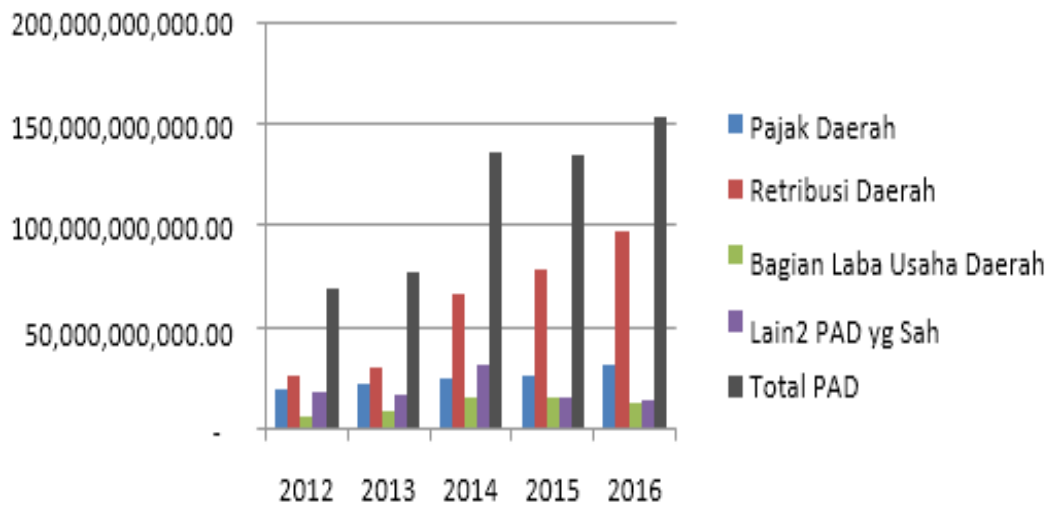


Berdasarkan hasil beberapa analisa rasio keuangan di atas, maka dapat

pihak eksternal, baik melalui pengoptimalan sumber pendapatan yang telah ada maupun dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai pusat dan provinsi. Pengoptimalan PAD tersebut perlu dilakukan terutama untuk pos Pajak

Daerah dan pos Bagian Laba Usaha Daerah, karena jika dilihat pada Gambar 4.8, dapat diketahui bahwa prosentase rata-rata atas pos Pajak Daerah terhadap PAD hanya berkisar 23% per tahun. Sedangkan prosentase rata-rata untuk pos Bagian Laba Usaha Daerah, hanya berkisar 10% per tahun.

Gambar 5.10
Pendapatan Asli Daerah Kab.Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016

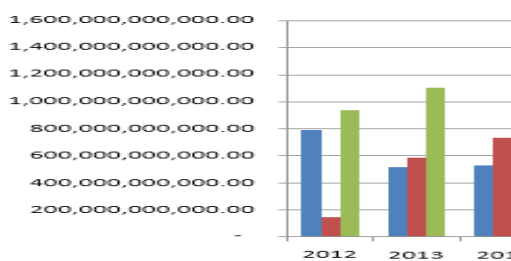


Sumber : data diolah.

Usaha peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Jika dilihat dari rasio efektivitas, diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jember telah mampu mengelola keuangan daerah secara efisien. Artinya, intensifikasi telah dilaksanakan dengan optimal. Hal ini terbukti dari hasil analisis rasio efektivitas, dimana tingkat efektivitas mampu melebihi 100%, meskipun tren rasionya menurun. Oleh sebab itu, usaha peningkatan PAD perlu dilakukan dengan cara ekstensifikasi PAD, yaitu dengan cara menggali sumber-sumber PAD baru. Hal ini perlu dilakukan karena meskipun pemerintah telah mengelola keuangan dengan efektif, namun keuangan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu, PAD Kabupaten Tulang Bawang masih belum mampu membiayai seluruh pengeluaran rutin pemerintah.

besar anggaran belanja tersebut justru dialokasikan untuk belanja tidak langsung, yaitu belanja yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung, seperti belanja pegawai. Pada Gambar 4.9 terlihat bahwa belanja tidak langsung, meningkat setiap tahunnya. Sebaliknya, belanja langsung justru mengalami penurunan setiap tahunnya. Artinya, peningkatan jumlah belanja daerah setiap tahun, tidak disebabkan oleh meningkatnya alokasi belanja bagi pembangunan daerah, namun disebabkan oleh meningkatnya alokasi belanja gaji bagi para pegawai pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong kurang sehat, karena dilihat dari perkembangan alokasi belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang, selama 5 tahun terakhir, dapat diketahui bahwa lebih dari 60% belanja daerah, dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai.

Gambar 5.11 Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016



Grafik pada Gambar 5.11 menunjukkan perkembangan belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang, yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2012 hingga 2016. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa total belanja daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, peningkatan belanja tersebut tidak digunakan untuk meningkatkan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Sebagian

5.2. Hubungan Antar Rasio

Salah satu komponen yang paling penting untuk digunakan sebagai indikator guna mengukur kelima rasio di atas adalah pendapatan asli daerah (PAD). Maka dari itu, pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendapatan Daerah harus lebih efektif dalam melakukan pemungutan PAD. Bertolak dari penelitian di atas, pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan PAD harus semakin ditingkatkan karena PAD merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam pendapatan daerah. Jika PAD di daerah yang lain semakin meningkat maka, kemandirian daerah tersebut semakin meningkat sebab ketergantungan terhadap pihak eksternal semakin menurun. Peningkatan PAD sekaligus juga dapat menggambarkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak atau retribusi.

Semakin meningkatnya alokasi belanja rutin pemerintah daerah, otomatis akan mengurangi alokasi pada belanja pembangunannya. Jika PAD suatu daerah tersebut kurang dan pemerintah daerah ingin terus melakukan pembangunan pada daerahnya, biasanya suatu daerah melakukan pinjaman jangka panjang kepada pihak eksternal.

Namun menurut PP nomor 58 Tahun 2012 Pasal 116, nilai DSCR pemerintah daerah harus diatas 2,5%. DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, bagian daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian lainnya serta Dana Alokasi umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, biaya, pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Oleh sebab itu, semakin banyak pemerintah daerah melakukan pinjaman kepada pihak eksternal, kemandirian daerah tersebut akan menurun. Peran Dinas Pendapatan Daerah dalam hal memungut PAD juga harus ditingkatkan agar semakin efektif dalam memungut PAD sehingga pertumbuhan PAD pada tahun-tahun berikutnya semakin meningkat. Usaha untuk meningkatkan PAD tidak hanya dilakukan dengan mengoptimalkan intensifikasi PAD, namun pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan PAD melalui ekstensifikasi PAD, yaitu menggali sumber-sumber PAD baru.

Selain usaha untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah juga harus mengurangi alokasi belanja rutinnya agar pembangunan di daerahnya tersebut juga semakin meningkat. Karena sebagai bagian dari negara berkembang, serta tuntutan otonomi daerah, pemerintah daerah juga perlu berusaha untuk meningkatkan pembangunan daerahnya dan

mengurangi tingkat ketergantungan daerah pada bantuan pemerintah pusat.

BAB VI. KESIMPULANDAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tingkat kemandirian keuangan daerah serta tingkat kesehatan keuangan pemerintah daerah dalam rangka penerapan otonomi daerah. Pengujian terhadap tingkat kesehatan keuangan pemerintah daerah ditentukan dengan menggunakan analisis rasio-rasio keuangan.

Berdasarkan analisa data dan pembahasan yang telah peneliti uraikan dalam bab 4, dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong masih sangat rendah, dengan rata-rata antara tahun anggaran 2012 – 2016 sebesar 8,99%. Artinya, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, masih sangat tinggi.
2. Beberapa rasio keuangan menunjukkan trend meningkat. Namun sebagian besar justru menunjukkan trend menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kurang optimal dalam hal mengelola keuangan daerah.
3. Dilihat dari beberapa rasio yang telah peneliti uraikan dalam bab 4, keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong kurang sehat. Bahkan cenderung menuju kebangkrutan daerah. Hal ini peneliti simpulkan dari besarnya alokasi belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang, dimana lebih dari 60% belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang dialokasikan bagi belanja pegawai. Artinya, sebagian besar pendapatan daerah tidak dialokasikan bagi

pembangunan daerah, melainkan justru dialokasikan untuk membayar gaji pegawai pemerintah daerah. Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya usaha untuk memperbaikinya, Kabupaten Tulang Bawang terancam mengalami kebangkrutan, karena tidak ada lagi anggaran belanja yang dialokasikan bagi pembangunan.

6.2 Saran

1. Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat berusaha untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga menurunkan tingkat

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. Usaha tersebut tidak hanya berupa optimalisasi intensifikasi PAD, namun juga upaya melalui ekstensifikasi PAD. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu meminimalisir alokasi belanja rutinnya, dan lebih meningkatkan alokasi belanja modal.

2. Perluasan obyek penelitian dengan periode pengamatan yang lebih panjang dapat dilakukan bagi para peneliti selanjutnya dengan mengacu pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa - Bali)*. Jurnal SNA IX. Padang.
- Adi, Priyo Hari dan David Harianto. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita*. Jurnal SNA X. Makassar.
- Adi, Priyo Hari dan Wirawan Setiaji. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa - Bali)*. Jurnal SNA X. Makassar.
- Anthony, Robert N, John Dearden, dan Norton M. Bedford. 1993. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi Keenam. Jilid 2. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Anthony, Robert N, Vijay Govindarajan. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jilid 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Berti, Emelia. 2006. *Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 di Kabupaten Lampung Timur*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Calia, Roland dan Woods Bowman. 1997. *Evaluating Local Government Financial Health*. Chicago.
- Dajan, Anto. 1986. *Pengantar Metode Statistik Jilid 1*. LP3ES. Jakarta.
- Detisa, Dora. 2009. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Khusus pada Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Eriadi. 2004. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah (Suatu Tinjauan terhadap Perubahan Regulasi Keuangan Daerah)*. Tesis. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Fauziana, Ayu. 2009. *Analisis Rasio Keuangan dan Model Z-Score untuk Menilai Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Febriyanti, Dyvita. 2016. *Analisis Rasio Keuangan Guna Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sumatra Periode Anggaran Tahun 2011-2014*. Universitas Andalas.
- Hansen, Don R. dan Maryanal M. Mowen. 1997. *Akuntansi Manajemen*. Edisi 4. Jilid 1. Erlangga. Bandung.
- Haryanto, Joko Tri. *Potret PAD dan Relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah*.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPF. Yogyakarta.
- Kuncoro, Haryo. 2007. *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan*

Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Jurnal SNA X. Makassar.

Kusumadewi, Diah Ayu dan Arief Rahman. 2007. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.

Maimunah, Mutiara dan Rusdi Akbar. 2008. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mulyana, Budi, Subkhan dan Kuwat Slamet. 2006. *Keuangan Daerah : Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP). Jakarta.

Nordiawan D., Iswahyudi, dan Rahmawati M. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.

Nordiawan D. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.

Nurkhamid, Muh. 2008. *Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.3.

Padovani, Emanuele, Francesca Manes Rossi dan Rebecca Levy Orelli. 2010. *The Use of Financial Indicators to Determine Financial Health of Italian Municipalities*. Toulouse.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2011. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012*. Tulang Bawang.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2012. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013*. Tulang Bawang.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2013. *Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013 Buku I*. Tulang Bawang.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2013. *Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013 Buku II*. Tulang Bawang.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2013. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014 Buku I*. Tulang Bawang.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2013. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014 Buku II*. Tulang Bawang.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2014. *Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang*

- Bawang Tahun Anggaran 2014 Buku I. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2014. *Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014 Buku II*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2014. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015 Buku I*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2014. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015 Buku II*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2015. *Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015 Buku I*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2015. *Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015 Buku II*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2015. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016*. Tulang Bawang.
- Penman, Stephen H. dan Doron Nissim. 1999. *Ratio Analysis and Equity Valuation*.
- Suryanovi, Sri. 2008. *Kajian Standar Akuntansi Pemerintahan, Keharmonisan dan Kejelasan Penerapan Basis Kas Menuju Akrual Berdasarkan Perspektif UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.3.
- Tambun, Keriahen Tarigan. 2005. *Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sektor-Sektor Berpotensi yang Dapat Dikembangkan di Pemerintah Kota Medan*. Tesis. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Tunggal, Amin Widjaya. 1995. *Dasar-dasar Budgeting*. Rineka Cipta. Jakarta.

**BUKU AJAR
MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH**

**FINANCIAL DISTRESS
DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK
(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang)**



Hendri Dunan, S.E., M.M.
Dra. Farida Efriyanti, M.M.

Hendri Dunan, S.E., M.M.
Dra. Farida Efriyanti, M.M.

**FINANCIAL DISTRESS
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tuklang Bawang)**

**BUKU AJAR
MANAJEMEN KEUANGAN
DAERAH**

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ... ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Buku ini diberi Judul “Financial Distress dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang”. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan buku ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penyusun. Kalaupun pada akhirnya buku ini dapat terselesaikan tentulah karena beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Oleh Karena itu penyusun sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya.

Bandar Lampung, Oktober 2017

Tim Penyusun,

Hendri Dunan, S.E., M.M.

Dra. Farida Efriyanti, M.M.

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
Permasalahan	2
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	3
Otonomi Daerah	3
Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah	3
Financial Distress	4
Pengaruh Rasio Solvabilitas Terhadap Prediksi Financial Distress	5
Pengaruh Kompleksitas Terhadap Prediksi Financial Distress	6
Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Financial Distress	6
BAB III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	8
Analisis	8
Analisis Tingkat Kemandirian Kabupaten Tulang Bawang	8
Analisis Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Tulang Bawang	15
Analisis Efisiensi Daerah Kabupaten Tulang Bawang	26
Analisis DSCR Kabupaten Tulang Bawang	31
Analisis Pertumbuhan PAD Kabupaten Tulang Bawang	37
Pembahasan	43
Indek Kemampuan Rutin	44
Rasio Efektivitas	45
Rasio Efisiensi	46
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	46
Rasio Pertumbuhan	47
Hubungan Antar Rasio	51
BAB IV. PENUTUP	53
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5.1. Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012.....	9
Tabel 5.2. Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013.....	10
Tabel 5.3. Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014.....	11
Tabel 5.4. Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015.....	12
Tabel 5.5. Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016.....	13
Tabel 5.6. Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	14
Tabel 5.7. Trend Perkembangan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	15
Tabel 5.8. Proyeksi Perkembangan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2017-2021.....	16
Tabel 5.9. Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	19
Tabel 5.10. Trend Perkembangan Tingkat Kemandirian Rutin Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	20
Tabel 5.11. Proyeksi Perkembangan IKR Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2017-2021	21
Tabel 5.12. Tingkat Efektifitas Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	24
Tabel 5.13. Trend Perkembangan Tingkat Efektifitas Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	25
Tabel 5.14. Proyeksi Perkembangan Tingkat Efektifitas Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2017-2021.....	26
Tabel 5.15. Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012 2016.....	29
Tabel 5.16. Trend Perkembangan Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	30
Tabel 5.17. Perkembangan Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2017-2021.....	31
Tabel 5.18. DSCR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	35
Tabel 5.19. Trend Perkembangan DSCR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	36

Tabel 5.20.	Proyeksi Perkembangan DSCR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2017-2020.....	37
Tabel 5.21.	Ringkasan Perhitungan PAD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2013.....	38
Tabel 5.22.	Ringkasan Perhitungan PAD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013 dan 2014.....	39
Tabel 5.23.	Ringkasan Perhitungan PAD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014-2015.....	40
Tabel 5.24.	Ringkasan Perhitungan PAD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015-2016.....	42
Tabel 5.25.	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 5.1. Rasio Kemandirian Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012 2016.....	15
Gambar 5.2. Perbandingan PAD dan Belanja Rutin Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012 2016	19
Gambar 5.3. IKR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016....	20
Gambar 5.4. Rasio Efektifitas Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016	24
Gambar 5.5. Rasio Efisiensi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016	29
Gambar 5.6. DSCR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	35
Gambar 5.7. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	42
Gambar 5.8. Analisis Rasio Keuangan Pemda Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012 2016.....	48
Gambar 5.9. Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	48
Gambar 5.10. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.....	49
Gambar 5.11. Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang 2012-2016.....	50

BAB I PENDAHULUAN

Setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, keberhasilan program ini mulai banyak dipertanyakan. Otonomi daerah yang tadinya diharapkan mampu memperbaiki masalah ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, justru menimbulkan masalah baru akibat penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Adanya temuan lembaga independen yang ikut mengawasi pelaksanaan otonomi daerah juga telah menyebutkan bahwa kini kondisi keuangan daerah cenderung kritis dan mengkhawatirkan. Kecenderungan kritis dan mengkhawatirkan ini ditandai dengan adanya fenomena pegawai yang lebih besar dibandingkan dengan belanja-belanja lainnya antara 60-70% dari pendapatan daerah, penataan dan pengembangan sumber daya dan aset daerah yang belum optimal dan adanya disparitas pembangunan wilayah khususnya kota/kabupaten antar provinsi masih timpang.

FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi) menyebutkan pada tahun 2012 terdapat 291 pemerintah daerah yang memproyeksikan belanja pegawai lebih dari 50 persen, yang artinya sisa anggaran yang masih tersedia untuk belanja program dalam rangka memenuhi pelayanan publik hanya sebesar 9 persen sampai 14 persen (*seknasfitra.org*,2013).Perilaku boros pemerintah daerah yang menguras separuh lebih anggarannya hanya untuk belanja pegawai dikhawatirkan akan mengantarkan pemerintah daerah pada kondisi kebangkrutan. Pembiaran terjadinya rekrutmen pegawai secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah akan berdampak pada berkurangnya dana untuk membangun fasilitas publik, percepatan pembangunan daerah, penciptaan pelayanan yang berkualitas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam kebijakan otonomi daerah.

Pada sektor swasta *financial distress* didefinisikan sebagai kegagalan untuk memenuhi komitmen keuangan, berupa ketidaksanggupan melunasi pinjaman, kegagalan membayar dividen (atau bahkan pengurangan jumlah pembayaran dividen), kekurangan modal kerja, dan ketidakcukupan dana untuk membayar sejumlah biaya perusahaan (Foster, 1986; Lau, 1987; Ward, 1994; Jones and Hensher, 2004, Luo and Yu, 2011). Pada sektor publik, Jones dan Walker (2007) mendefinisikan *financial distress* sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan ini dikarenakan pemerintah tidak memiliki kecukupan

dana untuk membangun infrastruktur pelayanan publik, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi dan fasilitas publik lainnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengembangkan indikator untuk memprediksi *financial distress*. Pada sektor swasta, rasio-rasio keuangan digunakan untuk memprediksi ketidakpastian atau kepailitan sebuah perusahaan (Platt and Platt, 2002; Jones and Hensher, 2004, Luo and Yu, 2011). Pada sektor pemerintahan, Jones dan Walker (2007) menggunakan dua indikator untuk memprediksi *financial distress* negara bagian di Australia, yaitu indikator keuangan dan non-keuangan. Indikator keuangan terdiri dari: (1) besaran dana yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur pelayanan publik dan (2) rasio-rasio kinerja keuangan, sedangkan indikator non keuangan terdiri dari: (1) karakteristik dewan dan (2) kualitas pelayanan publik.

Permasalahan

Apakah analisis financial distress dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya penurunan terhadap fasilitas pelayanan publik dan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang?.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing.

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Bab V UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, serta pemerintah/ lembaga asing. Sementara itu, Bab VI UU No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah terjadi dalam bentuk:

- a. Pengalokasian transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian
- b. Pemberian pinjaman dan/atau hibah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau sebaliknya dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat
- c. Pemberian Pinjaman/hibah/penyertaan modal oleh pemerintah pusat kepada perusahaan daerah atau sebaliknya pemberian pinjaman/hibah oleh perusahaan daerah kepada pemerintah pusat
- d. Pemberian pinjaman/hibah oleh perusahaan negara kepada pemerintah daerah.

Financial Distress

Financial distress atau “kesulitan keuangan” pada sektor swasta didefinisikan sebagai kegagalan untuk memenuhi komitmen keuangan, berupa ketidaksanggupan melunasi pinjaman, kegagalan membayar dividen (atau bahkan pengurangan jumlah pembayaran dividen), kekurangan modal kerja, dan ketidakcukupan dana untuk membayar sejumlah biaya perusahaan (Foster, 1986; Lau, 1987; Ward, 1994; Jones and Hensher, 2004, Luo and Yu, 2011). Pada sektor publik, Jones dan Walker (2007) mendefinisikan *financial distress* sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan ini dikarenakan pemerintah tidak memiliki kecukupan dana untuk membangun infrastruktur pelayanan publik, seperti jalan, jembatan dan fasilitas publik lainnya. Pada pemerintah daerah, *Financial Distress* ditandai dengan tidak terkendalinya pengeluaran yang dilakukan untuk belanja rutin, sehingga pemerintah daerah menekan pengeluaran untuk belanja modal atau belanja investasi.

Pengaruh kemandirian Keuangan terhadap Prediksi Financial Distress

Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan mengenai hubungan antar organisasi. Sebuah organisasi dipandang memiliki sifat seperti makhluk hidup (organisme) yang survabilitas akan tergantung pada lingkungan. Organisasi mengambil sumber daya dari lingkungannya, seperti bahan baku dan tenaga kerja. Organisasi yang mampu menguasai sumber daya vital atau bisa mengurangi ketidakpastian dalam hubungannya dengan organisasi lain akan memiliki kekuatan (power) yang paling besar (Peffer dan Salancik, 1978 dalam Gudono, 2009).

Pada pemerintah daerah, kekuatan (power) sumber daya keuangan dapat tercermin dari besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut. Menurut Undang-Undang, Pemerintah daerah memiliki tiga komponen sumber pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan LainLain. Pemerintah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah rendah akan membutuhkan dana dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sumber dana tersebut diantaranya dapat berasal dari dana transfer pemerintah pusat/provinsi (dana perimbangan).

Sesuai pandangan teori ketergantungan sumber daya, pemerintah daerah yang memiliki kemandirian sumber daya keuangan akan memiliki kekuatan untuk *survive* dan terhindar dari financial distress. Kemandirian keuangan juga telah digunakan oleh peneliti terdahulu

sebagai indikator dalam menilai kinerja keuangan pemerintah (Cheng, 1992; Christiaens, 1999; Christiaens dan Pateghem, 2007). Kloha, Weissert, dan Kleine (2005)

Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Prediksi Fiancial Distress

Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan bahwa organisasi adalah konsekwensi dari kemampuan mereka mempengaruhi, sehingga organisasi yang hidupnya tergantung pada subsidi pemerintah biasanya akan cenderung lebih taat pada perintah (aturan) pemerintah (Pfeffer dan Salancik, 1978 dalam Gudono, 2009). Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah akan bergantung pada transfer dana pemerintah pusat/provinsi, agar dapat mendanai program-programnya. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi dapat menyelenggarakan desentralisasi dengan mengandalkan pendapatan asli daerah lebih banyak, disamping dana transfer (perimbangan).

Jones dan Walker (2007) meneliti financial distress pada pemerintah lokal di negara bagian Australia (New South Wales). Hasil temuannya menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan terhadap dana pemerintah federal diprediksi mengalami financial distress

Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap Prediksi Fiancial Distress

Ketersediaan sumber daya untuk melunasi hutang merupakan sinyal kemampuan organisasi dalam memenuhi komitmen keuangan. Beberapa penelitian terdahulu, baik di sektor bisnis maupun sektor publik, menggunakan hutang sebagai indikator financial distress. Monti dan Garcia (2010) menggunakan *debt turnover ratio*, *non current debt ratio*, *debt coverage* dan *liabilities (average)* untuk memprediksi financial distress jangka pendek perusahaan-perusahaan di Argentina. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan dalam memprediksi financial distress.

Wibowo dan Samekto (2013) menggunakan Current Liability ratio, dan Debt to Revenue ratio sebagai informasi akuntansi relevan dalam mengukur Financial distress pemerintah daerah di Jawa Timur. Penelitiannya menghasilkan adanya hubungan yang cukup kuat dan searah antara ketiga variabel tersebut dengan financial distress. Sutaryo, dkk (2010) menggunakan *Current Liability Government Wealth*, *Current Liabilities*, *Long Term Debt to Total Asset*, dan *Debt to Revenue* sebagai nilai relevan informasi laporan keuangan terkait financial distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel-variabel tersebut.

Pengaruh Kompleksitas terhadap Prediksi Fiancial Distress

Organisasi yang kompleks akan dilengkapi dengan sistem informasi yang lebih canggih (*sophisticated*) dibanding organisasi sederhana (kecil). Pada organisasi yang kompleks terdapat sistem informasi yang efektif untuk menjamin ketersediaan informasi dan mengurangi kos informasi per unit. Sistem informasi yang efektif akan diperlukan pada organisasi yang kompleks untuk mengawasi ketercapaian tujuan organisasi (Hossain, 2008). Kompleksitas pada riset akuntansi pemerintahan diukur dengan menggunakan proksi populasi penduduk suatu wilayah pada periode tertentu (Ingram, 1984; Robbins dan Austin, 1986; Evans dan Patton, 1987; Cheng, 1992; Christiaens, 1999; Christiaens dan Pateghem, 2007). Populasi dianggap sebagai ukuran pembayaran transfer pemerintah berkaitan dengan jumlah sumber daya yang mungkin dapat disalahgunakan oleh pejabat pemerintah (agen). Jadi kota dengan populasi yang lebih besar diperkirakan akan menghasilkan kinerja yang lebih baik karena lebih banyak sumber daya yang dipertaruhkan (Evans dan Patton, 1987).

Christiaens (1999) dan Christiaens dan Pateghem (2007) menemukan bahwa kota besar dengan jumlah penduduk yang lebih banyak memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik terhadap prinsip akuntansi. Penelitian ini juga menduga bahwa semakin banyak populasi penduduk yang dimiliki sebuah Kabupaten/Kota, maka probabilitas mengalami financial distress akan semakin kecil dikarena populasi penduduk menggambarkan besaran transfer (sumber daya) yang dimiliki pemerintah (Evans dan Patton, 1987).

Pengaruh Pemekaran Wilayah terhadap Fiancial Distress

Pelaksanaan otonomi daerah yang berlangsung sejak tahun 1999 memberikan aspek penting terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah. Salah satu tujuan pemekaran atau penggabungan wilayah adalah untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan berdemokrasi. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara lebih baik sebagai warga negara.

Namun, pemekaran dan penggabungan wilayah diduga akan berpengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami financial distress. Pemerintah daerah yang sudah lama terbentuk (tidak mengalami pemekaran), sudah memiliki pengalaman dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, sehingga diduga akan terhindar dari financial distress. Sebaliknya, pemerintah daerah yang baru terbentuk (hasil pemekaran), belum memiliki

cukup pengalaman dalam pemerintahan sehingga memiliki kinerja yang lebih buruk dan berisiko mengalami financial distress. Amitabh (2006) menggunakan umur (pengalaman) sebagai indikator dalam menilai kinerja pelaporan keuangan institusi pemerintah. Hasil temuannya menunjukkan bahwa pertumbuhan umur institusi pemerintah akan meningkatkan kinerja dan pengalaman mereka dalam praktik pelaporan keuangan. Hussein (2008) juga menggunakan umur organisasi dalam menjelaskan variasi dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan. Umur organisasi diketahui berpengaruh terhadap kinerja pelaporan keuangan.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesehatan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimulai dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan penelitian terhadap suatu objek tertentu, dimana data selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan. Dalam melakukan penelitian ini, data yang peneliti dapatkan adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2016 yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, serta data Laporan Realisasi APBD (LRA) Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2016. Berdasarkan data tersebut, peneliti menggunakan beberapa rasio keuangan untuk menganalisis kesehatan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Analisis Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam penerapan otonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut dalam membangun daerahnya. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian daerah, yaitu dengan cara membandingkan total Penerimaan Asli Daerah (PAD) dengan total Penerimaan Daerah.

a. Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012

Tabel 5.1.
Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012.

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
I.	PENDAPATAN	
	Pendapatan Asli Daerah	68.673.500.000,00
	Pajak Daerah	19.178.930.000,00
	Retribusi Daerah	25.482.970.000,00
	Bagian Laba Usaha Daerah	6.451.680.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	17.559.920.000,00
II	Dana Perimbangan	874.661.230.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	45.559.840.000,00
	Dana Alokasi Umum	770.394.000.000,00
	Dana Alokasi Khusus	15.480.000.000,00
	Dana Perimbangan dari Propinsi	43.227.390.000,00
Total Pendapatan Daerah		943.334.730.000,00

Sumber : data diolah

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012, diketahui bahwa jumlah total Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp. 68.673.500.000. PAD tersebut terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.19.178.930.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.25.482.970.000,00, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp. 6.451.680.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.17.559.920.000,00. Sedangkan total Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, ialah sebesar Rp. 874.661.230.000,00. Sehingga total penerimaan daerah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun anggaran bersangkutan adalah sebesar Rp. 943.334.730.000,00.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{68.673.500.000,00}{943.334.730.000,00} \times 100 \% = 7,28\%$$

Berdasarkan perhitungan atas perbandingan antara total PAD dan total pendapatan daerah di atas, dapat diketahui bahwa tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2012 adalah sebesar 7,28%. Berdasarkan tabel tingkat kemandirian pada bab 3, tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang

Bawang untuk tahun anggaran 2012 tergolong sangat rendah, karena berada pada kisaran 0% hingga 25%, dan memiliki pola hubungan *instruktif*, yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

b. Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013

Tabel 5.2.
Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
I	PENDAPATAN	
	Pendapatan Asli Daerah	77.180.270.000,00
	Pajak Daerah	55.494.160.000,00
	Retribusi Daerah	861.126.000.000,00
	Bagian Laba Usaha Daerah	66.222.800.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	17.256.370.000,00
II	Dana Perimbangan	982.842.960.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	55.494.160.000,00
	Dana Alokasi Umum	861.126.000.000,00
	Dana Alokasi Khusus	66.222.800.000,00
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	37.222.635.000,00
	Hibah	60.368.000,00
	Dana Darurat	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	50.654.342.000,00
	Total Pendapatan Daerah	1.110.737.940.000,00

Sumber : data diolah

Pada tahun anggaran 2013, total penerimaan daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 17,75% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 943.334.730.000,00 menjadi Rp.1.110.737.940.000,00. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan sebesar 12,39% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 68.673.500.000,00 menjadi Rp.77.180.270.000,00.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{77.180.270.000,00}{1.110.737.940.000,00} \times 100 \% = \mathbf{6,95\%}$$

Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2013 mengalami penurunan sebesar 4,55%, dari tahun sebelumnya sebesar 7,28%, menjadi 6,95%. Berdasarkan tabel tingkat kemandirian daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3,

sebesar 6,95% menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong masih sangat rendah karena masih berada pada kisaran 0% hingga 25%, dan memiliki pola hubungan *instruktif*, yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

c. Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014

Pada tahun anggaran 2014, total penerimaan daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 15,27% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.110.737.940.000,00 menjadi Rp1.280.324.520.000,00. PAD juga mengalami peningkatan sebesar 76,82% dari tahun sebelumnya sebesar Rp77.180.270.000,00 menjadi Rp136.470.690.000,00. Rincian mengenai perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 5.3.
Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
I	PENDAPATAN	
	Pendapatan Asli Daerah	136.470.690.000,00
	Pajak Daerah	24.222.730.000,00
	Retribusi Daerah	65.576.840.000,00
	Bagian Laba Usaha Daerah	15.043.630.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	31.627.490.000,00
II	Dana Perimbangan	982.842.960.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	62.165.920.000,00
	Dana Alokasi Umum	942.532.800.000,00
	Dana Alokasi Khusus	66.485.000.000,00
	Dana Penyesuaian Infrastruktur	-
	Dana Kontingensi	-
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	72.670.110.000,00
	Hibah	-
	Dana Darurat	17.510.000.000,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	45.656.460.000,00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9.385.150.000,00
	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	118.500.000,00
	Total Pendapatan Daerah	1.280.324.520.000,00

Sumber : data diolah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{136.470.690.000,00}{1.280.324.520.000,00} \times 100 \% = \mathbf{10,66\%}$$

Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2014 mengalami peningkatan sebesar 53,4%, dari tahun sebelumnya sebesar 6,95% menjadi 10,66%. Berdasarkan tabel tingkat kemandirian daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2014 sebesar 10,66% menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh besarnya tingkat kemandirian daerah masih berada pada kisaran 0% hingga 25%, dan memiliki pola hubungan *instruktif*, yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

d. Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran

2015

Pada tahun anggaran 2015, total penerimaan daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 4,55% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.280.324.520.000,00 menjadi Rp. 1.338.578.665.186,72. Namun PAD mengalami penurunan sebesar 1,06% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 136.470.690.000,00 menjadi Rp. 135.022.280.000,00.

Tabel 5.4.
Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
I	PENDAPATAN	
	Pendapatan Asli Daerah	135.022.280.000,00
	Pajak Daerah	26.481.360.000,00
	Retribusi Daerah	78.007.400.000,00
	Bagian Laba Usaha Daerah	15.747.510.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	14.786.010.000,00
II	Dana Perimbangan	109.049.845.186,72
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	79.488.430.000,00
	Dana Alokasi Umum	940.397.110.000,00
	Dana Alokasi Khusus	74.621.000.000,00
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	72.670.110.000,00
	Hibah	-
	Dana Darurat	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	59.401.740.000,00

	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28.757.400.000,00
	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20.791.510.000,00
	Dana Bagi Hasil Retribusi	99.195.186,72
	Total Pendapatan Daerah	1.338.578.665.186,72

Sumber : data diolah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{135.022.280.000,0}{1.338.578.665.186,72} \times 100\% = \mathbf{10,09\%}$$

Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar 5,37%, dari tahun sebelumnya sebesar 10,66% menjadi 10,09%. Berdasarkan tabel tingkat kemandirian daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2015 masih berada pada kisaran 0% hingga 25%, sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong masih sangat rendah, dan memiliki pola hubungan *instruktif*, yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

d. Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016

Tabel 5.5.
Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016.

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
I	PENDAPATAN	
	Pendapatan Asli Daerah	153.802.040.000,00
	Pajak Daerah	30.841.170.000,00
	Retribusi Daerah	96.585.340.000,00
	Bagian Laba Usaha Daerah	11.953.810.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	14.421.720.000,00
II	Dana Perimbangan	1.130.522.873.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	87.762.600.000,00
	Dana Alokasi Umum	955.007.373.000,00
	Dana Alokasi Khusus	87.752.900.000,00
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	52.557.613.327,14
	Total Pendapatan Daerah	1.542.856.103.000,00

Sumber data : LKPJ Bupati Kabupaten Tulang Bawang

Pada tahun anggaran 2016, total penerimaan daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 15,26% dari tahun sebelumnya sebesar Rp.1.338.578.665.186,72 menjadi Rp.1.542.856.103.000,00. PAD juga mengalami peningkatan sebesar 13,91% dari tahun sebelumnya sebesar Rp.135.022.280.000,00 menjadi Rp.153.802.040.000,00.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{153.802.040.000,00}{1.542.856.103.000,00} \times 100 \% = \mathbf{9,97\%}$$

Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar 1,17%, dari tahun sebelumnya sebesar 10,09% menjadi 9,97%. Berdasarkan tabel tingkat kemandirian daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2016 masih berada pada kisaran 0% hingga 25%, sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong masih sangat rendah, dan memiliki pola hubungan *instruktif*, yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

Tabel 5.6.
Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah	% TKD	Kemandirian
2012	68.673.500.000	943.334.730.000,00	7,28%	Sangat rendah
2013	77.180.270.000	1.110.737.940.000,00	6,95%	Sangat rendah
2014	136.470.690.000	1.280.324.520.000,00	10,66%	Sangat rendah
2015	135.022.280.000	1.338.578.665.186,72	10,09%	Sangat rendah
2016	153.802.040.000	1.542.856.103.000,00	9,97%	Sangat rendah

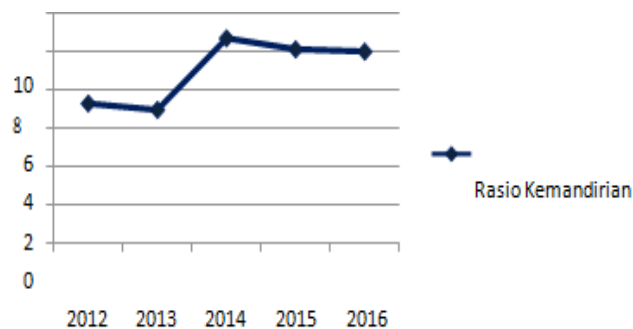
Sumber data: Data diolah

Dari tabel 4.6 di atas, terlihat bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan sosial kemasyarakatan tergolong masih sangat rendah. Rasio kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tergambar pada gambar 5.1, diketahui hanya berada di kisaran 6% sampai 10%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang

memiliki pola hubungan yang instruktif, yaitu suatu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada peranan kemandirian daerah. penyebabnya tak lain ialah karena besarnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah atas transfer dari pemerintah pusat dalam APBD secara keseluruhan terhadap APBD Kabupaten Tulang Bawang pada tahun anggaran 2012 hingga 2016. Peranan pemerintah pusat masih sangat dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Walaupun tingkat kemandirian rendah tetapi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya mengalami peningkatan

Gambar 5.1
Rasio Kemandirian Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016

12



Untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, ditinjau dari tingkat kemandirian daerah selama lima tahun anggaran, digunakan metode analisis trend dengan formula : $Y' = a + Bx$

Tabel 5.7.
Trend Perkembangan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Tingkat Kemandirian(Y)	X	XY	X ²
2012	7,28	-2	-14,56	4
2013	6,95	-1	-6,95	1
2014	10,66	0	0	0
2015	10,09	1	10,09	1
2016	9,97	2	19,94	4
Total	44,95	0	8,52	10

Sumber data: Data diolah

Nilai a dan b dicari dengan formula :

$$a = \frac{\sum Y}{N} = \frac{44,95}{5} = 8,99$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{8,52}{10} = 0,852$$

Sehingga, persamaan trend dilihat dari tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah : $Y' = 8,99 + 0,852 X$

Tabel 5.8.
Proyeksi Perkembangan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2017 – 2021

No	Tahun Anggaran	Proyeksi Tingkat Kemandirian (%)
1	2017	11,55 %
2	2018	12,4 %
3	2019	13,25 %
4	2020	14,1 %
5	2021	14,95 %

Sumber data: Data diolah

Dari persamaan trend di atas, maka proyeksi/perkiraan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel 4.8. Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa proyeksi Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun-tahun yang akan datang, akan terus mengalami peningkatan.

Analisis Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Tulang Bawang

Kemampuan rutin daerah menunjukkan sejauh mana kemampuan keuangan pada potensi suatu daerah dalam rangka membiayai belanja langsung daerah. Kemampuan rutin suatu daerah dapat diketahui dengan menggunakan rasio indeks kemampuan rutin (IKR), yaitu dengan cara membandingkan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Belanja Langsung.

a. Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012, diketahui bahwa jumlah total Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.68.673.500.000. PAD tersebut terdiri dari Pajak Daerah sebesar

Rp.19.178.930.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.25.482.970.000,00, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp.6.451.680.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.17.559.920.000,00. Sedangkan total Belanja Langsung adalah sebesar Rp.793.682.420.000. Belanja langsung tersebut terdiri dari Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal, masing-masing ialah sebesar Rp.464.069.230.000, Rp.175.414.810.000, dan Rp.154.198.380.000.

$$\text{IKR} = \frac{68.673.500.000}{793.682.420.000} \times 100\% = 8,65\%$$

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2012 adalah sebesar 8,65%. Berdasarkan tabel tingkat kemampuan rutin daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, IKR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2012 berada pada kisaran 0% hingga 20%, sehingga tingkat kemampuan rutin Kabupaten Tulang Bawang tergolong masih sangat kurang dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah.

b. Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013

Pada tahun anggaran 2013, total PAD Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 12,39% dari tahun sebelumnya sebesar Rp68.673.500.000,00 menjadi Rp77.180.270.000,00. Sedangkan Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar 34,71% daripada tahun sebelumnya, menjadi Rp518.221.690.000,00.

$$\text{IKR} = \frac{77.180.270.000}{518.221.690.000} \times 100\% = 14,89\%$$

Tingkat kemampuan rutin daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2013 mengalami peningkatan sebesar 72,13%, dari tahun sebelumnya sebesar 8,65% menjadi 14,89%. Berdasarkan tabel tingkat kemampuan rutin daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, IKR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2013 berada pada kisaran 0% hingga 20%, sehingga tingkat kemampuan rutin Kabupaten Tulang Bawang tergolong masih sangat kurang dalam membiayai pengeluaran rutin daerah.

c. Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014

Pada tahun anggaran 2013, total PAD Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 76,82% dari tahun sebelumnya sebesar

$$\text{IKR} = \frac{136.470.690.000}{527.672.050.000} \times 100\% = 25,86\%$$

Rp.77.180.270.000,00 menjadi Rp.136.470.690.000,00. Belanja Langsung juga mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,82% daripada tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp.518.221.690.000,00 menjadi Rp.527.672.050.000,00.

Tingkat kemampuan rutin daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2014 mengalami peningkatan sebesar 13,80%, dari tahun sebelumnya sebesar 14,89% menjadi 25,86%. Berdasarkan tabel tingkat kemampuan rutin daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, IKR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2014 berada pada kisaran 20% hingga 40%, sehingga tingkat kemampuan rutin Kabupaten Tulang Bawang tergolong kurang mampu dalam membiayai belanja rutin daerah.

d. Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015

Pada tahun anggaran 2015, total PAD Kabupaten Tulang Bawang mengalami penurunan sebesar 1,06% dari tahun sebelumnya sebesar Rp136.470.690.000 menjadi Rp135.022.280.000. Sedangkan pos Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar 14,3% daripada tahun sebelumnya, menjadi Rp 458.754.820.000.

$$\text{IKR} = \frac{135.022.280.000}{458.754.820.000} \times 100\% = 29,43\%$$

Tingkat kemampuan rutin daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2015 mengalami peningkatan sebesar 13,8%, dari tahun sebelumnya sebesar 25,86% menjadi 29,43%. Berdasarkan tabel tingkat kemampuan rutin daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, IKR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2015 berada pada kisaran 20% hingga 40%, sehingga tingkat kemampuan rutin Kabupaten Tulang Bawang tergolong kurang mampu dalam membiayai belanja rutin daerah.

e. Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016

Pada tahun anggaran 2016, total PAD Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 13,91% dari tahun sebelumnya sebesar Rp.135.022.280.000 menjadi Rp.153.802.040.000. Sedangkan pos Belanja Langsung kembali mengalami penurunan sebesar 14,3% dari pada tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp.458.754.820.000 menjadi Rp.393.148.340.000.

$$\text{IKR} = \frac{153.802.040.000}{393.148.340.000} \times 100\% = 39,12\%$$

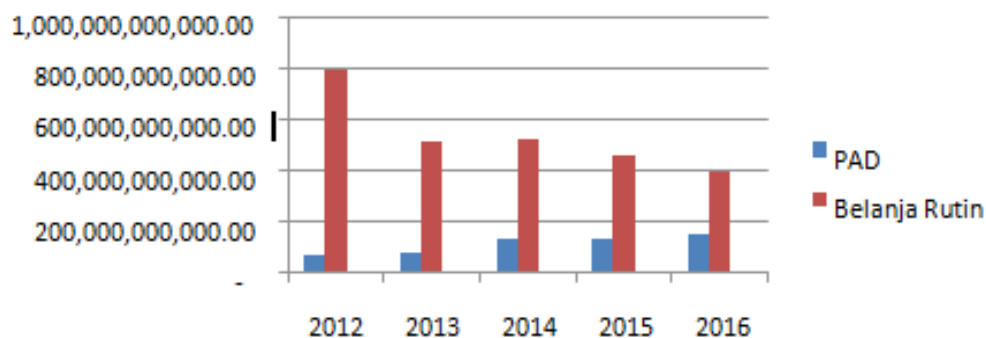
Tingkat kemampuan rutin daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2016 kembali mengalami peningkatan sebesar 32,92%, dari tahun sebelumnya sebesar 29,43% menjadi 39,12%. Berdasarkan tabel tingkat kemampuan rutin daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, IKR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2016 berada pada kisaran 20% hingga 40%, sehingga tingkat kemampuan rutin Kabupaten Tulang Bawang tergolong kurang mampu dalam membiayai belanja rutin daerah.

Tabel 5.9
Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	PAD	Total Belanja Rutin	% IKR	Kemandirian
2012	68.673.500.000	793.682.420.000	8,65 %	Sangat kurang
2013	77.180.270.000	518.221.690.000	14,89 %	Sangat kurang
2014	136.470.690.000	527.672.050.000	25,86 %	Kurang
2015	135.022.280.000	458.754.820.000	29,43 %	Kurang
2016	153.802.040.000	393.148.340.000	39,12 %	Kurang

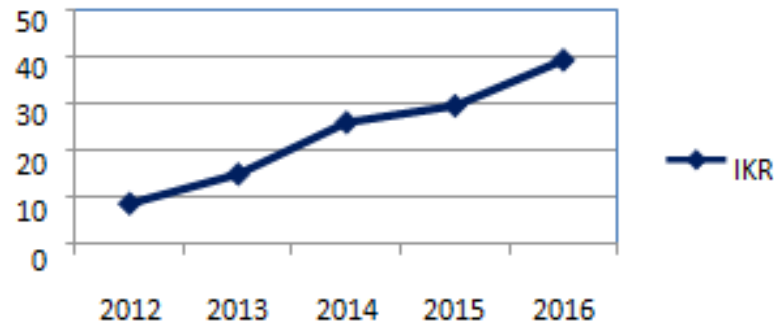
Sumber data: Data diolah

Gambar 5.2.
Perbandingan PAD dan Belanja Rutin Daerah Kab. Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016



Untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, ditinjau dari tingkat kemampuan rutin daerah selama lima tahun anggaran, digunakan metode analisis trend dengan formula $Y' = a + bX$

Gambar 5.3.
IKR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016



Tabel 5.10.

Trend Perkembangan Tingkat Kemampuan Rutin Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016.

Tahun Anggaran	IKR (Y)	X	XY	X ²
2012	8,65	-2	-17,3	4
2013	14,89	-1	-14,89	1
2014	25,86	0	0	0
2015	29,43	1	29,43	1
2016	39,12	2	78,24	4
Total	117,95	0	75,48	10

Nilai a dan b dicari dengan formula :

$$a = \frac{\sum Y}{N} = \frac{117,95}{5} = 23,59$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{75,48}{10} = 7,548$$

Sehingga, persamaan trend dilihat dari tingkat kemampuan rutindaerahKabupaten Tulang Bawang adalah : $Y' = 23,59 + 7,548 X$

Dari persamaan trend di atas, maka proyeksi/perkiraan tingkat kemampuan rutin daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 5.11
Proyeksi Perkembangan IKR Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2017 - 2021

No	Tahun Anggaran	Proyeksi Tingkat Kemandirian (%)
1	2017	46,23 %
2	2018	53,78 %
3	2019	61,33 %
4	2020	68,88 %
5	2021	76,43 %

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, dapat diketahui bahwa proyeksi Tingkat Kemampuan Rutin Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun-tahun yang akan datang, akan terus mengalami peningkatan.

Analisis Efektivitas Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Efektivitas merupakan keberhasilan suatu entitas dalam usaha mencapai tujuan entitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio Efektivitas Anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas anggaran suatu daerah dapat diketahui dari total realisasi penerimaan PAD dibandingkan dengan total penerimaan PAD berdasarkan potensi riil.

a. Tingkat Efektivitas Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012, diketahui bahwa jumlah total realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.68.673.500.000. Sedangkan total penerimaan PAD daerah ialah sebesar Rp.53.189.640.000. Sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{68.673.500.000}{53.189.640.000} \times 100\% = 129,11\%$$

Tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan perhitungan di atas diketahui mencapai 129,11%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang mampu menjalankan tugasnya dengan efektif, karena tingkat efektivitas anggaran mampu melebihi tingkat efektivitas minimal sebesar 100%.

b. Tingkat Efektivitas Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007

Pada tahun anggaran 2013, total PAD berdasarkan potensi riil daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 29,26% dari tahun sebelumnya, yang hanya sebesar Rp. 53.189.640.000 menjadi Rp. 68.752.734.749,98. Namun total realisasi PAD hanya mengalami peningkatan sebesar 12,39% dari tahun sebelumnya sebesar Rp.68.673.500.000 menjadi sebesar Rp.77.180.270.000.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{77.180.270.000}{68.752.734.749,98} \times 100\% = \mathbf{112,26\%}$$

Tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2013 mengalami penurunan sebesar 13,05%, dari tahun sebelumnya sebesar 129,11% menjadi 112,26%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2013 tergolong mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, karena tingkat efektivitas anggaran mampu melebihi tingkat efektivitas minimal sebesar 100%.

c. Tingkat Efektivitas Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014

Pada tahun anggaran 2014, total PAD berdasar potensi riil daerah Kabupaten Tulang Bawang mencapai Rp113.611.443.946,02. Dan total realisasi PAD Kabupaten Tulang Bawang pada tahun anggaran yang sama, mencapai Rp. 136.470.690.000.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{136.470.690.000}{113.611.443.946,02} \times 100\% = \mathbf{120,12\%}$$

Tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2014 mengalami peningkatan sebesar 7%, dari tahun sebelumnya sebesar 112,26% menjadi 120,12%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2014 tergolong mampu melaksanakan tugasnya

dengan efektif, karena tingkat efektivitas anggaran mampu melebihi tingkat efektivitas minimal sebesar 100%.

d. Tingkat Efektivitas Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015

Pada tahun anggaran 2015, total PAD berdasar potensi riil daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp119.817.120.000. Dan total realisasi PAD Kabupaten Tulang Bawang pada tahun anggaran yang sama, mencapai Rp.135.022.280.000.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{135.022.280.000}{119.817.120.000} \times 100\% = \mathbf{112,69\%}$$

Tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2015 kembali mengalami penurunan sebesar 6,19 %, dari tahun sebelumnya sebesar 120,12% menjadi 112,69%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2015 masih tergolong mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, karena tingkat efektivitas anggaran mampu melebihi tingkat efektivitas minimal sebesar 100%.

e. Tingkat Efektivitas Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016

Pada tahun anggaran 2016, total PAD berdasar potensi riil daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp149.343.450.000. Dan total realisasi PAD Kabupaten Tulang Bawang pada tahun anggaran yang sama, mencapai Rp153.802.040.00

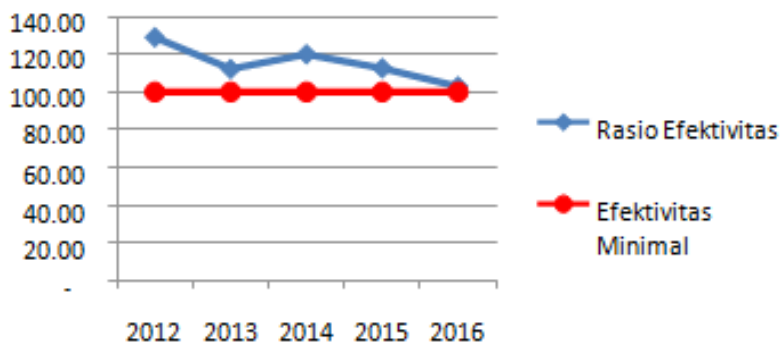
$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{153.802.040.000}{149.343.450.000} \times 100\% = \mathbf{102,99\%}$$

Tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2016 kembali mengalami penurunan sebesar 8,61%, dari tahun sebelumnya sebesar 112,69% menjadi 102,99%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2016 masih tergolong mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, karena tingkat efektivitas anggaran mampu melebihi tingkat.

Tabel 5.12
Tingkat Efektivitas Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016.

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Anggaran PAD	% Efektivitas	Efektivitas
2012	68.673.500.000	53.189.640.000	129,11 %	Efektif
2013	77.180.270.000	68.752.734.749,98	112,26 %	Efektif
2014	136.470.690.000	113.611.443.946,02	120,12 %	Efektif
2015	135.022.280.000	119.817.120.000	112,69 %	Efektif
2016	153.802.040.000	149.343.450.000	102,99 %	Efektif

Gambar 5.4
Rasio Efektivitas Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016



Berdasarkan tabel 5.12 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka merealisasikan anggaran pendapatan yang telah tersusun dalam rancangan APBD Kabupaten Tulang Bawang, mengalami perubahan fluktuatif setiap tahunnya. Jika dilihat pada Gambar 5.4, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas anggaran melebihi 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang mampu menjalankan tugas pemerintahannya secara efektif dalam upaya merealisasikan anggaran pendapatan yang telah tersusun dalam rancangan APBD.

Tabel 5.13
Trend Perkembangan Tingkat Efektivitas Anggaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Efektivitas (Y)	X	XY	X²
2012	129,11	-2	-258,22	4
2013	112,26	-1	-112,26	1
2014	120,12	0	0	0
2015	112,69	1	112,69	1
2016	102,99	2	205,97	4
Total	577,16	0	-51,82	10

Untuk mengetahui perkembangan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, ditinjau dari efektivitas PAD selama lima tahun anggaran, digunakan metode analisis trend dengan formula $Y' = a + bX$.

Nilai a dan b dicari dengan formula :

$$a = \frac{\sum Y}{N} = \frac{577,16}{5} = 115,43$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-51,82}{10} = -5,182$$

Sehingga, persamaan trend dilihat dari tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah : $Y' = 115,43 - 5,182 X$

Dari persamaan trend di atas, maka proyeksi/perkiraan tingkat efektivitas daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel 4.14.

Tabel 5.14

Proyeksi Perkembangan Tingkat Efektivitas Anggaran Daerah
Kab. Tulang Bawang Tahun Anggaran 2017 – 2021

No	Tahun Anggaran	Proyeksi Tingkat Efektivitas (%)
1	2017	99,89 %
2	2018	94,7 %
3	2019	89,52 %
4	2020	84,34 %
5	2021	79,16 %

Sumber data: Data diolah

Berdasarkan tabel 5.14 dapat diketahui bahwa proyeksi Tingkat Efektivitas Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun-tahun yang akan datang, akan terus mengalami penurunan.

Analisis Efisiensi Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Analisis efisiensi anggaran merupakan gambaran perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan daerah, dengan realisasi pendapatan daerah yang diterima. Pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat besar biaya yang diperlukan guna merealisasikan seluruh kegiatan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan pendapatan yang akan dihasilkannya. Keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pendapatan tidak akan berarti jika besar biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkannya melebihi apa yang dihasilkannya.

a. Tingkat Efisiensi Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012, diketahui bahwa jumlah total realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.68.673.500.000. Sedangkan besar biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD ialah Rp.5.138.605.250. Sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{5.138.605.250}{68.673.500.000} \times 100\% = 7,48 \%$$

Tingkat efisiensi anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan perhitungan di atas diketahui mencapai 7,48%. Berdasarkan tabel tingkat efisiensi

anggaran daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, tingkat efisiensi Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2012 berada di kisaran, <60%, sehingga tingkat efisiensi anggaran sebesar 7,48% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong cukup efisien dalam rangka melakukan pemungutan PAD.

b. Tingkat Efisiensi Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013

Pada tahun anggaran 2013, total realisasi PAD mengalami peningkatan sebesar 12,39% dari tahun sebelumnya sebesar Rp68.673.500.000 menjadi Rp77.180.270.000. Sedangkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD mengalami penurunan yang cukup tajam, menjadi Rp1.990.500.000. Sehingga, tingkat efisiensi anggaran tahun 2013 adalah sebesar :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.990.500.000}{77.180.270.000} \times 100\% = 2,58 \%$$

Tingkat efisiensi anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2013 mengalami penurunan sebesar 65,53%, dari tahun sebelumnya sebesar 7,48% menjadi 2,58%. Berdasarkan tabel tingkat efisiensi anggaran daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, tingkat efisiensi Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2013 berada di kisaran, <60%, sehingga tingkat efisiensi anggaran sebesar 2,58% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong cukup efisien dalam rangka melakukan pemungutan PAD.

c. Tingkat Efisiensi Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014

Pada tahun anggaran 2014, total realisasi PAD mencapai Rp136.470.690.000. Sedangkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD pada tahun anggaran bersangkutan, mencapai Rp2.910.767.870,00. Sehingga, tingkat efisiensi anggaran tahun 2014 adalah sebesar :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{2.910.767.870}{136.470.690.000} \times 100\% = 2,13 \%$$

Tingkat efisiensi anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2014 mengalami penurunan sebesar 17,3%, dari tahun sebelumnya sebesar 2,58% menjadi 2,13%. Berdasarkan tabel tingkat efisiensi anggaran daerah yang peneliti

cantumkan pada bab 3, tingkat efisiensi Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2014 berada di kisaran, <60%, sehingga tingkat efisiensi anggaran sebesar 2,13% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong cukup efisien dalam rangka melakukan pemungutan PAD.

d. Tingkat Efisiensi Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015

Pada tahun anggaran 2015, total realisasi PAD mencapai Rp135.022.280.000. Sedangkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD pada tahun anggaran bersangkutan, mencapai Rp2.220.037.627. Sehingga, tingkat efisiensi anggaran tahun 2015 adalah sebesar :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{2.220.037.627}{135.022.280.000} \times 100\% = 1,64 \%$$

Tingkat efisiensi anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar 22,91%, dari tahun sebelumnya sebesar 2,13% menjadi 1,64%. Berdasarkan tabel tingkat efisiensi anggaran daerah yang peneliti cantumkan pada bab 3, tingkat efisiensi Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2015 berada di kisaran, <60%, sehingga tingkat efisiensi anggaran sebesar 1,64% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong cukup efisien dalam rangka melakukan pemungutan PAD.

e. Tingkat Efisiensi Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016

Pada tahun anggaran 2016, total realisasi PAD mencapai Rp153.802.040.000. Sedangkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD pada tahun anggaran bersangkutan, mencapai Rp1.916.630.700. Sehingga, tingkat efisiensi anggaran tahun 2016 adalah sebesar :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.916.630.700}{153.802.040.000} \times 100\% = 1,25 \%$$

Tingkat efisiensi anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar 24,21%, dari tahun sebelumnya sebesar 1,64% menjadi 1,25%. Berdasarkan tabel tingkat efisiensi anggaran daerah yang peneliti

cantumkan pada bab 3, tingkat efisiensi Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2016 berada di kisaran, <60%, sehingga tingkat efisiensi anggaran sebesar 1,25% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong cukup efisien dalam rangka melakukan pemungutan PAD.

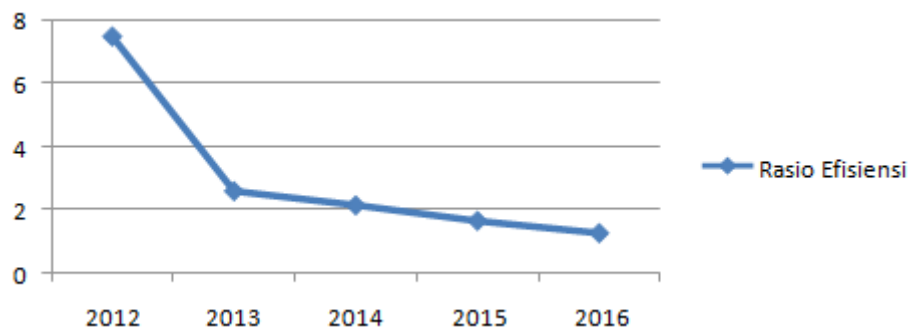
Berdasarkan tabel 4.15, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka merealisasikan anggaran pendapatan yang telah tersusun dalam rancangan APBD Kabupaten Tulang Bawang, mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang mampu menjalankan tugas pemerintahannya secara efisien dalam upaya menghasilkan PAD Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 5.15
Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Biaya Guna Memungut PAD	Realisasi PAD	% Efisiensi	Efisiensi
2012	5.138.605.250	68.673.500.000	7,48 %	Efisien
2013	1.990.500.000	77.180.270.000	2,58 %	Efisien
2014	2.910.767.870	136.470.690.000	2,13 %	Efisien
2015	2.220.037.627	135.022.280.000	1,64 %	Efisien
2016	1.916.630.700	153.802.040.000	1,25 %	Efisien

Sumber data: Data diolah

Gambar 5.5
Rasio Efisiensi Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016



Tabel 5.16

Trend Perkembangan Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Efisiensi (Y)	X	XY	X ²
2012	7,48	-2	-14,96	4
2013	2,58	-1	-2,58	1
2014	2,13	0	0	0
2015	1,64	1	1,64	1
2016	1,25	2	2,5	4
Total	15,08	0	-13,4	10

Sumber data : Data diolah

Untuk mengetahui perkembangan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, ditinjau dari tingkat efisiensi anggaran selama lima tahun anggaran, digunakan metode analisis trend dengan formula $Y' = a + bX$

Nilai a dan b dicari dengan formula :

$$a = \frac{\sum Y}{N} = \frac{15,08}{5} = 3,02$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-13,4}{10} = -1,34$$

Sehingga, persamaan trend dilihat dari tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah :

$$Y' = 3,02 - 1,34 X$$

Dari persamaan trend di atas, maka proyeksi/perkiraan tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel 4.17.

Tabel 5.17
 Proyeksi Perkembangan Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah
 Kabupaten Tulang Bawang
 Tahun Anggaran 2017 – 2021

No	Tahun Anggaran	Proyeksi Tingkat Efisiensi (%)
1	2017	-1 %
2	2018	-2,34 %
3	2019	-3,68 %
4	2020	-5,02 %
5	2021	-6,36 %

Sumber data: Data diolah

Berdasarkan tabel 5.17 dapat diketahui bahwa proyeksi Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun-tahun yang akan datang, akan terus mengalami penurunan.

Analisis DSCR Kabupaten Tulang Bawang

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) merupakan suatu tolok ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu entitas dalam rangka menghasilkan pendapatan yang cukup guna membayar utang maupun sewa. Dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah, selain menggunakan PAD dan dana perimbangan dari pusat, pemerintah juga dapat menggunakan sumber alternatif lain, yaitu dengan melakukan pinjaman, seoptimal prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti DSCR minimal 2,5.

a. DSCR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012, diketahui bahwa jumlah total realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah, DAU, dan Belanja Wajib Kabupaten Tulang Bawang masing-masing adalah sebesar Rp.68.673.500.000,00, Rp.26.239.900.000,00, Rp.770.394.000.000,00, dan Rp143.919.390.000,00. Sedangkan total pokok dan bunga pinjaman daerah adalah sebesar Rp.770.394.000.000,00. Sehingga perhitungan DSCR Kabupaten Tulang Bawang untuk Tahun Anggaran 2012 adalah:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	68.673.500.000	
Bagian Daerah	26.239.900.000	
Dana Alokasi Umum (DAU)	770.394.000.000	
Total PAD + BD + DAU	865.307.400.000	+
Belanja Wajib (BW)	143.919.390.000	
Total (PAD + BD + DAU) - BW	721.388.010.000	-

$$\text{DSCR} = \frac{721.388.010.000}{770.394.000.000} \times 100\% = 93,64\%$$

$$\text{Maksimal Angsuran Pokok Pinjaman} = \frac{721.388.010.000}{2,5} \times 100\% = \text{Rp } 288.555.204.000$$

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa DSCR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2012 mencapai 93,64%. Dan maksimal angsuran pokok pinjaman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran yang sama, adalah sebesar Rp.288.555.204.000. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat melakukan pinjaman dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah dengan jumlah angsuran maksimal sebesar Rp.288.555.204.000.

b. DSCR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013

Pada tahun anggaran 2013, total realisasi PAD ialah sebesar Rp.77.180.270.000. Dan besarnya Bagian Daerah, DAU, serta Belanja Wajib, masing-masing adalah sebesar Rp.68.000.870.000,00, Rp.861.126.000.000, dan Rp.587.864.180.000,00. Sedangkan besarnya total pokok dan bunga angsuran adalah Rp.861.126.000.000,00. Sehingga, perhitungan DSCR Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	77.180.270.000	
Bagian Daerah	68.000.870.000	
Dana Alokasi Umum (DAU)	861.126.000.000	
Total PAD + BD + DAU	1.006.307.140.000	+
Belanja Wajib (BW)	587.864.180.000	
Total (PAD + BD + DAU) - BW	418.442.960.000	-

$$\text{DSCR} = \frac{418.442.960.000}{861.126.000.000} \times 100\% = 48,59\%$$

$$\text{Maksimal Angsuran Pokok Pinjaman} = \frac{418.442.960.000}{2,5} \times 100\% = \text{Rp } 167.377.184.000$$

Tingkat DSCR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2013 mengalami penurunan sebesar 47%, dari tahun sebelumnya sebesar 91,63% menjadi 48,59%. Dan maksimal angsuran pokok pinjaman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran yang sama, adalah sebesar Rp.167.377.184.000. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat melakukan pinjaman dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah dengan jumlah angsuran maksimal sebesar Rp.167.377.184.000.

c. DSCR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014

Pada tahun anggaran 2014, besar realisasi PAD, Bagian Daerah, DAU, serta Belanja Wajib, masing-masing adalah Rp.136.470.690.000, Rp.106.316.286.665,00, Rp.942.532.800.000, dan Rp.736.711.555.050. Sedangkan total pokok dan bunga angsuran adalah Rp.942.532.800.000. Sehingga, perhitungan DSCR Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	136.470.690.000	
Bagian Daerah	106.316.286.665	
Dana Alokasi Umum (DAU)	942.532.800.000	
Total PAD + BD + DAU	1.185.319.776.665	+
Belanja Wajib (BW)	736.711.555.050	
Total (PAD + BD + DAU) - BW	448.608.221.615	-

$$\text{DSCR} = \frac{448.608.221.615}{942.532.800.000} \times 100\% = 47,6\%$$

$$\text{Maksimal Angsuran Pokok Pinjaman} = \frac{448.608.221.615}{2,5} \times 100\% = \text{Rp } 179.443.288.646$$

Tingkat DSCR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2014 mengalami penurunan sebesar 2,05%, dari tahun sebelumnya sebesar 48,59% menjadi 47,6%. Dan maksimal angsuran pokok pinjaman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran yang sama, adalah sebesar Rp.179.443.288.646,00. Hal ini menandakan bahwa

pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat melakukan pinjaman dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah dengan jumlah angsuran maksimal sebesar Rp.179.443.288.646.

d. DSCR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015

Pada tahun anggaran 2015, total PAD, Bagian Daerah, DAU, dan Belanja Wajib, masing-masing mencapai Rp.135.022.280.000, Rp.123.405.439.483,13, Rp.940.397.110.000, dan Rp.865.535.337.303,41. Sedangkan besarnya total pokok dan bunga pinjaman daerah pada tahun anggaran bersangkutan, mencapai Rp.940.397.110.000. Sehingga, perhitungan DSCR Kabupaten Tulang Bawang tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	135.022.280.000,00	
Bagian Daerah	123.405.439.483,13	
Dana Alokasi Umum (DAU)	940.397.110.000,00	
Total PAD + BD + DAU	1.198.824.829.483,13	+
Belanja Wajib (BW)	865.535.337.303,41	
Total (PAD + BD + DAU) - BW	333.289.492.179,72	-

$$\text{DSCR} = \frac{333.289.492.179,72}{940.397.110.000,00} \times 100\% = 35,44\%$$

$$\text{Maksimal Angsuran Pokok Pinjaman} = \frac{333.289.492.179,72}{2,5} \times 100\% = \text{Rp } 133.315.796.871,89$$

Tingkat DSCR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar 25,54%, dari tahun sebelumnya sebesar 47,6% menjadi 35,44%. Dan maksimal angsuran pokok pinjaman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran yang sama, adalah sebesar Rp.133.315.796.871,89. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat melakukan pinjaman dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah dengan jumlah angsuran maksimal sebesar Rp.133.315.796.871,89.

e. DSCR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016

Pada tahun anggaran 2016, total PAD, Bagian Daerah, DAU, dan Belanja Wajib, masing-masing mencapai Rp.153.802.040.000, Rp.340.139.827.100,

Rp955.007.373.000, dan Rp.1.110.566.800.000. Sedangkan besarnya total pokok dan bunga pinjaman daerah pada tahun anggaran bersangkutan, mencapai Rp.955.007.373.000,00. Sehingga, perhitungan DSCR Kabupaten Tulang Bawang tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tingkat DSCR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar 0,025%, dari tahun sebelumnya sebesar 35,44% menjadi 35,43%. Dan maksimal angsuran pokok pinjaman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun anggaran yang sama, adalah sebesar Rp.135.352.976.040. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat melakukan pinjaman dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah dengan jumlah angsuran maksimal sebesar Rp.135.352.976.040.

Tabel 5.18

DSCR Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016

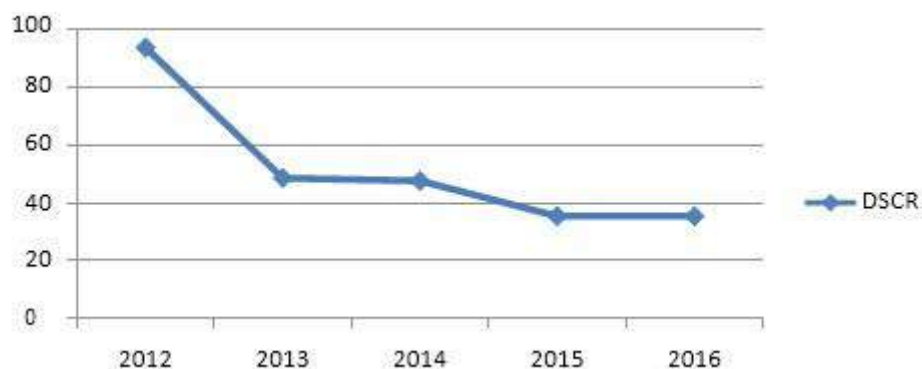
Tahun Anggaran	(PAD + BD + DAU) - BW	(Pokok Angsuran + Bunga + B.Pinjaman)	% DSCR
2012	721.388.010.000,00	770.394.000.000	93,64
2013	418.442.960.000,00	861.126.000.000	48,59
2014	448.608.221.615,00	942.532.800.000	47,6
2015	333.289.492.179,72	940.397.110.000	35,44
2016	338.382.440.100,00	955.007.373.000	35,43

Sumber data: Data diolah

Gambar 5.6

DSCR Kabupaten Tulang Bawang

Tahun Anggaran 2012-2016



Berdasarkan tabel 5.18, dapat diketahui bahwa DSCR daerah Kabupaten Tulang Bawang menurun setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka membayar pokok pinjaman daerah beserta bunganya mengalami penurunan setiap tahunnya.

Tabel 5.19
Trend Perkembangan DSCR Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	DSCR (Y)	X	XY	X ²
2012	93,64	-2	-187,28	4
2013	48,59	-1	-48,59	1
2014	47,6	0	0	0
2015	35,44	1	35,44	1
2016	35,43	2	70,86	4
Total	260,7	0	-129,57	10

Untuk mengetahui perkembangan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, ditinjau dari kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam rangka membayar pokok pinjaman daerah beserta bunganya selama lima tahun anggaran, peneliti menggunakan metode analisis trend dengan formula $Y' = a + bX$

$$a = \frac{\sum Y}{N} = \frac{260,7}{5} = 52,14$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-129,57}{10} = -12,957$$

Nilai a dan b dicari dengan formula :

Sehingga, persamaan trend dilihat dari DSCR Kabupaten Tulang Bawang adalah :

$$Y' = 52,14 - 12,957 X$$

Dari persamaan trend di atas, maka proyeksi/perkiraan DSCR Kabupaten Tulang Bawang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel 4.20.

Tabel 5.20

Proyeksi Perkembangan DSCR Kabupaten Tulang Bawang

Tahun Anggaran 2017 – 2021

No	Tahun Anggaran	Proyeksi DSCR (%)
1	2017	13,27
2	2018	0,31
3	2019	-12,65
4	2020	-25,6
5	2021	-38,56

Berdasarkan tabel 4.26 dapat diketahui bahwa proyeksi DSCR Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun-tahun yang akan datang, akan terus mengalami penurunan.

Analisis Pertumbuhan PAD Kabupaten Tulang Bawang

Analisis pertumbuhan PAD dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan PAD yang telah dicapai. Analisis pertumbuhan PAD dapat diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan dengan cara membandingkan PAD tahun bersangkutan dengan PAD tahun sebelumnya.

a. Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012, diketahui bahwa jumlah total Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.68.673.500.000,00. PAD tersebut terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.19.178.930.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.25.482.970.000,00, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp.6.451.680.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.17.559.920.000,00. Sedangkan berdasarkan data perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013, diketahui bahwa jumlah PAD Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.77.180.270.000,00, yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.21.533.250.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.29.630.780.000,00, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp.8.759.870.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.17.256.370.000,00.

Tabel 5.21
Ringkasan Perhitungan PAD Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012 dan 2013
(dalam ribuan rupiah)

Nomor	Uraian	Tahun Anggaran		Pertumbuhan (%)
		2012	2013	
1.1.1	Pajak Daerah	19.178.930	21.533.250	12,28
1.1.2	Retribusi Daerah	25.482.970	29.630.780	16,28
1.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah	6.451.680	8.759.870	35,78
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	17.559.920	17.256.370	-1,73
1.1	Total PAD	68.673.500	77.180.270	12,39

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{77.180.270.000 - 68.673.500.000}{68.673.500.000} \times 100\% = 12,39\%$$

Berdasarkan tabel 5.21, dapat diketahui, bahwa selain pos Lain-lain PAD, seluruh komponen PAD pada tahun anggaran 2013 mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Sehingga, meskipun pos Lain-lain PAD mengalami penurunan pada tahun 2013, pertumbuhan PAD Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2013 meningkat sebesar 12,39%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2013, pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

b. Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008

Tabel 5.22

Ringkasan Perhitungan PAD Kabupaten Tulang Bawang

Tahun Anggaran 2013 dan 2014

(dalam ribuan rupiah)

Nomor	Uraian	Tahun Anggaran		Pertumbuhan (%)
		2013	2014	
1.1.1	Pajak Daerah	21.533.250	24.222.730	12,49
1.1.2	Retribusi Daerah	29.630.780	65.576.840	121,31
1.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah	8.759.870	15.043.630	71,73
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	17.256.370	31.627.490	83,28
1.1	Total PAD	77.180.270	136.470.690	76,82

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{136.470.690.000 - 77.180.270.000}{77.180.270.000} \times 100\% = 76,82\%$$

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013, diketahui bahwa jumlah total Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.77.180.270.000,00, yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.21.533.250.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.29.630.780.000,00, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp.8.759.870.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.17.256.370.000,00. Sedangkan berdasarkan data perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014, diketahui bahwa jumlah PAD Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.136.470.690.000,00, yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.24.222.730.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.65.576.840.000,00, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp.15.043.630.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.31.627.490.000,00.

Berdasarkan tabel 5.22 dapat diketahui, bahwa seluruh komponen PAD pada tahun anggaran 2014 mengalami peningkatan daripada tahun

sebelumnya. Sehingga, total PAD Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2014 meningkat sebesar 76,82%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2014, pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

c. Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015

Tabel 5.23

Ringkasan Perhitungan PAD Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (dalam ribuan rupiah)

Nomor	Uraian	Tahun Anggaran		Pertumbuhan (%)
		2014	2015	
1.1.1	Pajak Daerah	24.222.730	26.481.360	9,32
1.1.2	Retribusi Daerah	65.576.840	78.007.400	18,96
1.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah	15.043.630	15.747.510	4,68
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	31.627.490	14.786.010	-53,25
1.1	Total PAD	136.470.690	135.022.280	-1,06

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{135.022.280.000 - 136.470.690.000}{136.470.690.000} \times 100\% = -1,06\%$$

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014, diketahui bahwa jumlah total Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.136.470.690.000,00, yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.24.222.730.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.65.576.840.000,00, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp.15.043.630.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.31.627.490.000,00. Sedangkan berdasarkan data perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015, diketahui bahwa jumlah PAD Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.135.022.280.000,00, yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.26.481.360.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.78.007.400.000,00, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp.15.747.510.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.14.786.010.000,00.

Berdasarkan tabel 4.23 dapat diketahui, bahwa selain pos Lain-lain PAD, seluruh komponen PAD pada tahun anggaran 2015 mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Namun, meskipun sebagian besar pos PAD mengalami peningkatan, tingkat pertumbuhan PAD pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,06%. Hal ini disebabkan oleh penurunan pos Lain-lain PAD yang cukup signifikan, yaitu sebesar lebih dari 50%. Dan hal ini menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2015, pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tidak mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

d. Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015, diketahui bahwa jumlah total Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.135.022.280.000,00, yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.26.481.360.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp 78.007.400.000,00, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp. 15.747.510.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.14.786.010.000,00. Sedangkan berdasarkan data perhitungan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016, diketahui bahwa jumlah PAD Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp.153.802.040.000,00, yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.30.841.170.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.96.585.340.000,00, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp.11.953.810.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.14.421.720.000,00.

Tabel 5.24
Ringkasan Perhitungan PAD Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (dalam ribuan rupiah)

Nomor	Uraian	Tahun Anggaran		Pertumbuhan (%)
		2015	2016	
1.1.1	Pajak Daerah	26.481.360	30.841.170	16,46
1.1.2	Retribusi Daerah	78.007.400	96.585.340	23,82
1.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah	15.747.510	11.953.810	-24,09
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	14.786.010	14.421.720	-2,46
1.1	Total PAD	135.022.280	153.802.040	13,91

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{135.022.280.000 - 136.470.690.000}{136.470.690.000} \times 100\% = -1,06\%$$

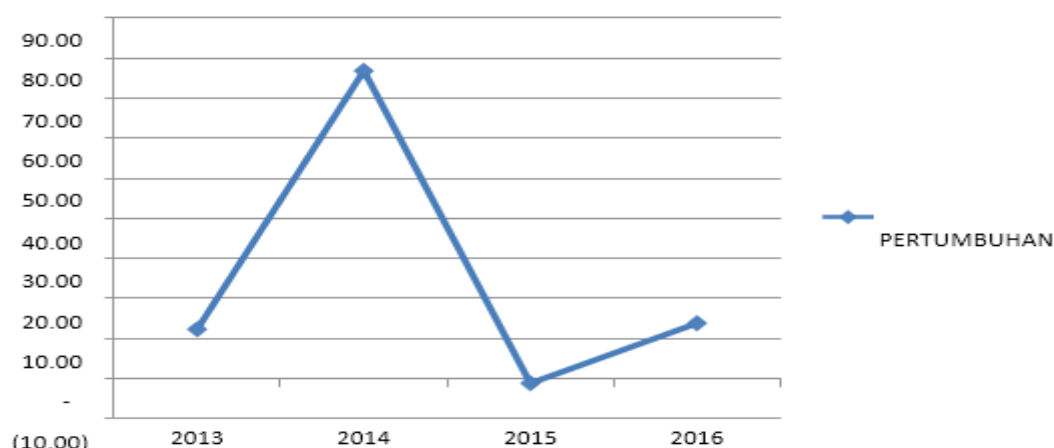
Berdasarkan tabel 4.24 dapat diketahui, bahwa untuk tahun anggaran 2016, komponen PAD yang berupa Pajak Daerah serta Retribusi Daerah mengalami peningkatan daripada tahun anggaran sebelumnya, masing-masing sebesar 16,46% dan 23,82%. Sedangkan untuk pos Bagian Usaha Laba Daerah serta Lain-lain PAD, mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 24,09% dan 2,46%. Namun, meskipun pos Bagian Usaha Laba Daerah serta Lain-lain PAD mengalami penurunan, tingkat pertumbuhan PAD pada tahun 2016 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 13,91%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2016, pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

Tabel 5.25
Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	% Pertumbuhan
2012	68.673.500.000	--
2013	77.180.270.000	12,39
2014	136.470.690.000	76,82
2015	135.022.280.000	-1,06
2016	153.802.040.000	13,91

Sumber data: Data diolah

Gambar 5.7
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016



Dari tabel 5.25 di atas, terlihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode, ke periode berikutnya.

Pembahasan

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 mengenai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 8,99%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat dikatakan masih rendah, artinya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dinilai masih tinggi. Hal ini diperkuat dengan grafik yang terdapat pada Gambar 4.3 mengenai pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2012 hingga 2016. Pada Gambar 4.3, terlihat bahwa lebih dari 75% komponen pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan, dimana dana perimbangan merupakan dana bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat bagi daerah otonom.

Berdasarkan perhitungan mengenai rasio kemandirian Kabupaten Tulang Bawang, diketahui bahwa tahun anggaran 2014 memiliki tingkat kemandirian tertinggi dengan nilai rasio sebesar 10,66%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2014 memiliki kemandirian daerah yang lebih baik dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat daripada tahun anggaran lainnya. Sedangkan tingkat kemandirian yang paling rendah terjadi pada tahun anggaran 2013 dengan tingkat rasio sebesar 6,95%. Hal ini diperkuat dengan grafik yang penulis cantumkan pada Gambar 4.4 mengenai rasio kemandirian Kabupaten Tulang Bawang. Pada gambar tersebut, diketahui bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Tulang Bawang relatif fluktuatif.

Pada tahun anggaran 2012, tingkat kemandirian Kabupaten Tulang Bawang mencapai 7,28%. Namun pada tahun selanjutnya, tingkat kemandirian menurun pada level 6,95% meskipun pada tahun bersangkutan, PAD Kabupaten Tulang

Bawang meningkat. Hal ini disebabkan oleh tidak sebandingnya peningkatan PAD dengan peningkatan Pendapatan Daerah. Pada tahun 2013, PAD hanya meningkat sebesar 12,39%, sedangkan Pendapatan Daerah meningkat sebesar 17,75%. Peningkatan Pendapatan Daerah tersebut berasal dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dimana pada tahun anggaran 2012, tidak terdapat pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, artinya nilai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sama dengan nol. Sedangkan pada tahun 2013, terdapat nilai pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp50.714.710.000,00.

Tingkat kemandirian Kabupaten Tulang Bawang pada tahun anggaran 2014, meningkat lebih dari 50% daripada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan, peningkatan PAD pada tahun 2014 lebih dari 75%. Peningkatan tajam PAD tersebut berasal dari peningkatan pos Retribusi Daerah, dimana pos tersebut mengalami peningkatan lebih dari 100% daripada tahun sebelumnya. Selain itu, pos Bagian Laba Usaha Daerah dan pos Lain-lain PAD yang Sah, mengalami peningkatan lebih dari 70%. Sedangkan untuk pos Pajak daerah, hanya meningkat sebesar 12,5%. Namun, meskipun peningkatan PAD mencapai lebih dari 75%, tingkat kemandirian Kabupaten Tulang Bawang tetap tergolong sangat rendah, karena tingkat kemandirian masih berada di bawah 25%. Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang harus berusaha meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan perolehan PAD Kabupaten Tulang Bawang, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam kaitan dengan usaha peningkatan PAD, maka kebijakan yang dapat ditempuh ialah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PAD, sehingga diharapkan PAD dapat lebih berperan, dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kebijakan dan usaha intensifikasi PAD ialah usaha berupa peningkatan PAD dari sumber-sumber PAD yang telah ada atau telah berjalan selama ini. Sedangkan usaha ekstensifikasi PAD ialah berupa mencari dan menggali sumber-sumber PAD baru dalam batas peraturan perundang-undangan.

Indeks Kemampuan Rutin

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.9 mengenai tingkat kemampuan rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 23,59%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat

kemampuan rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong masih kurang mampu dalam rangka membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah. Berdasarkan nilai indeks kemampuan rutin Kabupaten Tulang Bawang, tahun anggaran 2016 memiliki tingkat kemampuan tertinggi dengan nilai rasio sebesar 39,12%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2016 memiliki kemampuan keuangan dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat yang lebih baik daripada tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan tingkat kemampuan rutin yang paling rendah terjadi pada tahun anggaran 2012 dengan tingkat rasio sebesar 8,65%.

Hasil dari analisis IKR ini berhubungan dengan hasil analisis atas kemandirian daerah, dimana pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang kurang mandiri dalam hal keuangan, dan masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang harus berusaha meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan PAD dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Rasio Efektivitas

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.12 mengenai tingkat efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 115,43%. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat dikatakan efektif dalam melakukan pemungutan PAD karena berada pada nilai minimum rasio efektifitas yaitu diatas 100%.

Berdasarkan rasio efektivitas selama 2012-2016, tahun anggaran 2012 memiliki tingkat efektivitas anggaran tertinggi dengan nilai rasio sebesar 129,11%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dalam rangka merealisasikan tujuan entitas yang telah ditetapkan sebelumnya daripada tahun anggaran setelahnya. Sedangkan tingkat efektivitas yang paling rendah terjadi pada tahun anggaran 2016 dengan tingkat rasio sebesar 102,99%.

Hasil dari analisis rasio ini, diketahui bahwa keuangan pemerintah daerah cukup efektif meskipun cenderung menurun. Sedangkan rasio kemandirian serta IKR menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Tulang Bawang masih

tergolong kurang, dalam hal kemandirian daerah, serta kemampuan rutinnya. Hal ini menggambarkan bahwa usaha intensifikasi PAD telah berhasil dilaksanakan, karena realisasi penerimaan PAD lebih besar daripada penerimaan PAD berdasarkan potensi riil daerah. Oleh sebab itu, usaha peningkatan PAD perlu dilakukan guna mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam hal membiayai pengeluaran rutin daerah, dengan cara ekstensifikasi PAD, atau menggali sumber-sumber PAD baru. Contohnya, pemungutan pajak daerah untuk pemilik pemondokan (rumah kost).

Rasio Efisiensi

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.15 mengenai tingkat efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 3,016%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat dikatakan sangat efisien dalam rangka memungut PAD guna merealisasikan target penerimaan PAD yang telah dianggarkan sebelumnya dalam rancangan APBD Kabupaten Tulang Bawang .

Berdasarkan rasio efisiensi anggaran selama tahun anggaran 2012-2016, tahun anggaran 2012 memiliki tingkat efisiensi anggaran tertinggi dengan nilai rasio sebesar 7,48%. Sedangkan tingkat efisiensi anggaran yang paling rendah terjadi pada tahun anggaran 2016 dengan tingkat rasio sebesar 1,25%.

Berdasarkan hasil analisa di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mampu memungut PAD secara efisien. Hal ini dibuktikan dengan kinerja pemerintah daerah yang telah meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.18, Kabupaten Tulang Bawang memiliki nilai DSCR diatas nilai minimum yang ditetapkan oleh PP nomor 58 Tahun 2012 Pasal 116 yaitu di atas 2,5%. Meskipun cenderung terjadi penurunan nilai rasio setiap tahunnya, tetapi nilai rasio Pemda Kabupaten Tulang Bawang masih berada diatas batas minimum DSCR. Hal ini menerangkan bahwa Pemda Kabupaten Tulang Bawang dapat melakukan pinjaman kepada pihak eksternal.

Kabupaten Tulang Bawang memiliki nilai DSCR yang cenderung menurun pada setiap tahun anggarannya, sehingga jumlah maksimal angsuran pokok atas pinjaman selalu menurun. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan Pemda Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka melakukan pinjaman kepada pihak eksternal semakin menurun. Sehingga, Pemda Kabupaten Tulang Bawang harus meningkatkan atau mempertahankan kemampuan keuangannya jika ingin melakukan pinjaman kepada pihak eksternal pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

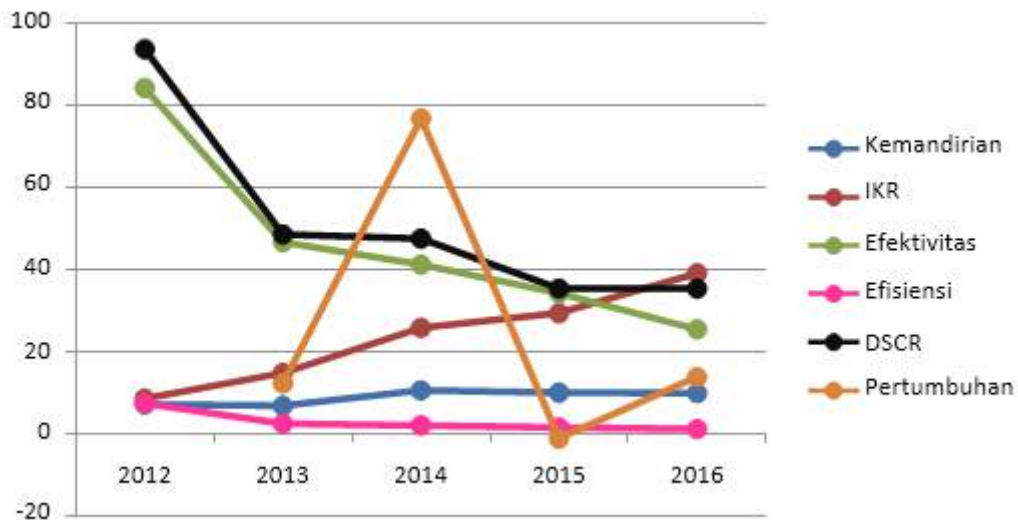
Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.25, pertumbuhan PAD Kabupaten Tulang Bawang cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2009 sempat mengalami penurunan tipis sebesar 1,06%. Namun pada tahun berikutnya, Pemda Kabupaten Tulang Bawang mampu meningkatkan kembali pertumbuhan PAD sebesar 13,91%. Pada tahun 2014, pertumbuhan PAD mengalami peningkatan tertinggi sebesar 76,82%.

Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang terdapat di daerahnya sehingga pendapatan yang dihasilkan dari pos PAD mengalami pertumbuhan yang meningkat.

Gambar 5.8 menggambarkan perbandingan antara beberapa analisis rasio keuangan yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Dari gambar tersebut dapat dilihat, bahwa rasio kemandirian, yang merupakan perbandingan antara total PAD dan total Pendapatan Daerah, berhasil meningkat pada 3 tahun pertama, yaitu pada tahun 2012 hingga tahun 2014. Akan tetapi, pada 2 tahun selanjutnya, tingkat kemandirian justru mengalami penurunan. Dilihat dari nilai nominal PAD Kabupaten Tulang Bawang, sebenarnya selalu meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, prosentase peningkatan PAD tersebut tidak sebanding dengan peningkatan prosentase Dana Perimbangan, sehingga rasio kemandirian cenderung menurun selama 3 tahun terakhir.

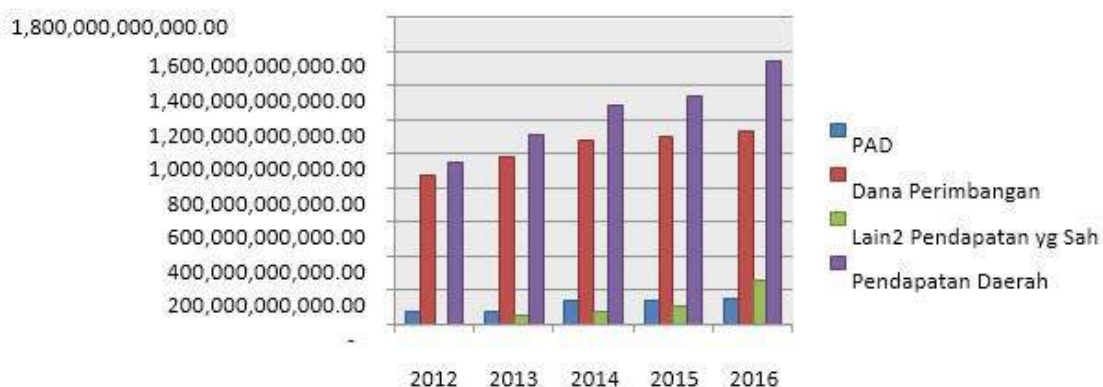
Gambar 5.8
 Analisis Rasio Keuangan Pemda Kab.Tulang Bawang
 Tahun Anggaran 2012-2016



Sedangkan untuk rasio IKR, yang merupakan perbandingan antara PAD dengan Belanja Rutin daerah, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Artinya, pemerintah telah mampu meminimalisir pengeluaran rutin pemerintah daerah dan mengoptimalkan PAD. Namun, tren peningkatan tersebut tidak berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang telah mampu mengatasi seluruh pengeluaran rutinnya. Karena hasil dari analisis rasio IKR menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang masih kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran rutinnya.

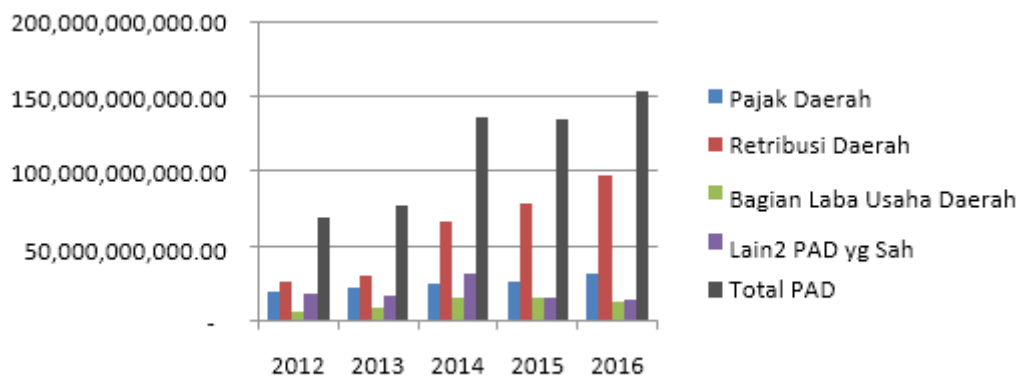
Dan untuk empat rasio keuangan selanjutnya, yang terdiri dari rasio efektivitas, rasio efisiensi, DSCR, serta rasio pertumbuhan sama-sama memiliki trend menurun setiap tahunnya.

Gambar 4.9
 Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
 Tahun Anggaran 2012-2016



Berdasarkan hasil beberapa analisa rasio keuangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang memerlukan upaya-upaya konkrit dari pemerintah daerah untuk secara perlahan mampu mengurangi ketergantungan atas sumber dana yang berasal dari luar/ekstern. Upaya-upaya konkrit tersebut dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Hairunisya (2008, dalam Febriyanti,2011) mengatakan bahwa hal tersebut perlu adanya usaha dari pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber dari pihak eksternal, baik melalui pengoptimalan sumber pendapatan yang telah ada maupun dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai pusat dan provinsi. Pengoptimalan PAD tersebut perlu dilakukan terutama untuk pos Pajak Daerah dan pos Bagian Laba Usaha Daerah, karena jika dilihat pada Gambar 5.8, dapat diketahui bahwa prosentase rata-rata atas pos Pajak Daerah terhadap PAD hanya berkisar 23% per tahun. Sedangkan prosentase rata-rata untuk pos Bagian Laba Usaha Daerah, hanya berkisar 10% per tahun.

Gambar 5.10
Pendapatan Asli Daerah Kab.Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2012-2016



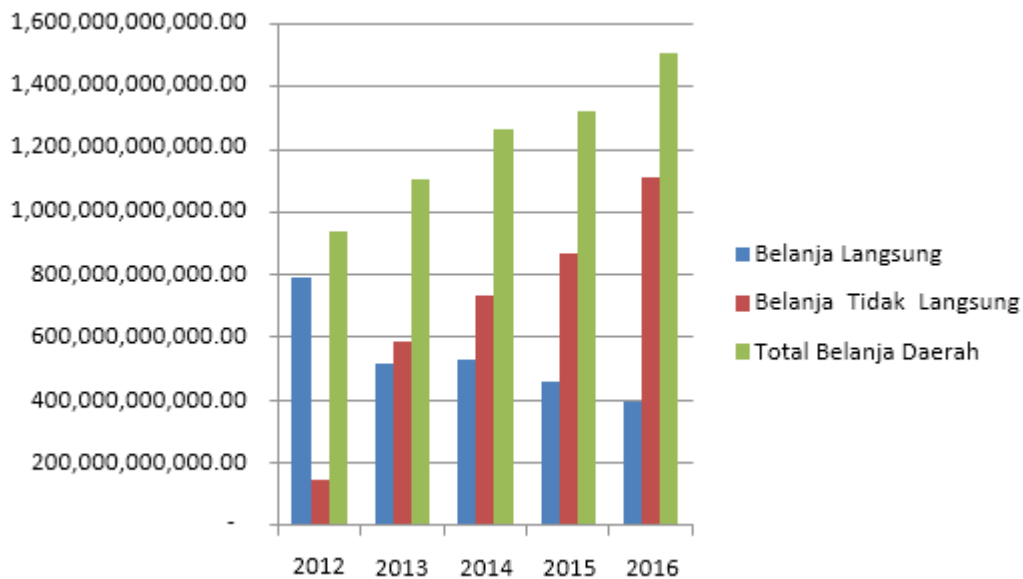
Sumber : data diolah.

Usaha peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Jika dilihat dari rasio efektivitas, diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang telah mampu mengelola keuangan daerah secara efisien. Artinya, intensifikasi telah dilaksanakan dengan optimal. Hal ini terbukti dari hasil analisis rasio efektivitas, dimana tingkat efektivitas mampu melebihi 100%, meskipun tren rasionya menurun. Oleh sebab itu, usaha peningkatan PAD perlu dilakukan dengan cara ekstensifikasi PAD, yaitu dengan cara menggali sumber-sumber PAD baru. Hal ini

perlu dilakukan karena meskipun pemerintah telah mengelola keuangan dengan efektif, namun keuangan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu, PAD Kabupaten Tulang Bawang masih belum mampu membiayai seluruh pengeluaran rutin pemerintah.

Gambar 5.11

Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012-2016



Sumber : data diolah.

Grafik pada Gambar 5.11 menunjukkan perkembangan belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang, yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2012 hingga 2016. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa total belanja daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, peningkatan belanja tersebut tidak digunakan untuk meningkatkan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Sebagian besar anggaran belanja tersebut justru dialokasikan untuk belanja tidak langsung, yaitu belanja yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung, seperti belanja pegawai. Pada Gambar 4.9 terlihat bahwa belanja tidak langsung, meningkat setiap tahunnya. Sebaliknya, belanja langsung justru mengalami penurunan setiap tahunnya. Artinya, peningkatan jumlah belanja daerah setiap tahun, tidak disebabkan oleh meningkatnya alokasi belanja bagi pembangunan daerah, namun disebabkan oleh meningkatnya alokasi belanja gaji bagi para pegawai pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulang

Bawang tergolong kurang sehat, karena dilihat dari perkembangan alokasi belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang, selama 5 tahun terakhir, dapat diketahui bahwa lebih dari 60% belanja daerah, dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai.

Hubungan Antar Rasio

Salah satu komponen yang paling penting untuk digunakan sebagai indikator guna mengukur kelima rasio di atas adalah pendapatan asli daerah (PAD). Maka dari itu, pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendapatan Daerah harus lebih efektif dalam melakukan pemungutan PAD. Bertolak dari penelitian di atas, pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan PAD harus semakin ditingkatkan karena PAD merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam pendapatan daerah. Jika PAD di daerah yang lain semakin meningkat maka, kemandirian daerah tersebut semakin meningkat sebab ketergantungan terhadap pihak eksternal semakin menurun. Peningkatan PAD sekaligus juga dapat menggambarkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak atau retribusi.

Semakin meningkatnya alokasi belanja rutin pemerintah daerah, otomatis akan mengurangi alokasi pada belanja pembangunannya. Jika PAD suatu daerah tersebut kurang dan pemerintah daerah ingin terus melakukan pembangunan pada daerahnya, biasanya suatu daerah melakukan pinjaman jangka panjang kepada pihak eksternal.

Namun menurut PP nomor 58 Tahun 2012 Pasal 116, nilai DSCR pemerintah daerah harus diatas 2,5%. DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, bagian daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian lainnya serta Dana Alokasi umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, biaya, pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Oleh sebab itu, semakin banyak pemerintah daerah melakukan pinjaman kepada pihak eksternal, kemandirian daerah tersebut akan menurun. Peran Dinas Pendapatan Daerah dalam hal memungut PAD juga harus ditingkatkan agar semakin efektif dalam memungut PAD sehingga pertumbuhan PAD pada tahun-tahun berikutnya semakin meningkat. Usaha untuk meningkatkan PAD tidak hanya dilakukan dengan mengoptimalkan intensifikasi PAD, namun pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan PAD melalui ekstensifikasi PAD, yaitu menggali sumber-sumber PAD baru.

Selain usaha untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah juga harus mengurangi alokasi belanja rutinnya agar pembangunan di daerahnya tersebut juga semakin meningkat. Karena sebagai bagian dari negara berkembang, serta tuntutan otonomi daerah, pemerintah daerah juga perlu berusaha untuk meningkatkan pembangunan daerahnya dan mengurangi tingkat ketergantungan daerah pada bantuan pemerintah pusat.

BAB IV

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tingkat kemandirian

keuangan daerah serta tingkat kesehatan keuangan pemerintah daerah dalam rangka penerapan otonomi daerah. Pengujian terhadap tingkat kesehatan keuangan pemerintah daerah ditentukan dengan menggunakan analisis rasio-rasio keuangan.

Berdasarkan analisa data dan pembahasan yang telah peneliti uraikan dalam bab 4, dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawangtergolong masih sangat rendah, dengan rata-rata antara tahun anggaran 2012 – 2016 sebesar 8,99%. Artinya, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, masih sangat tinggi.
2. Beberapa rasio keuangan menunjukkan trend meningkat. Namun sebagian besar justru menunjukkan trend menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kurang optimal dalam hal mengelola keuangan daerah.
3. Dilihat dari beberapa rasio yang telah peneliti uraikan dalam bab 4, keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong kurang sehat. Bahkan cenderung menuju kebangkrutan daerah. Hal ini peneliti simpulkan dari besarnya alokasi belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang, dimana lebih dari 60% belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang dialokasikan bagi belanja pegawai. Artinya, sebagian besar pendapatan daerah tidak dialokasikan bagi pembangunan daerah, melainkan justru dialokasikan untuk membayar gaji pegawai pemerintah daerah. Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya usaha untuk memperbaikinya, Kabupaten Tulang Bawang terancam mengalami kebangkrutan, karena tidak ada lagi anggaran belanja yang dialokasikan bagi pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten*

Dan Kota se Jawa - Bali). Jurnal SNA IX. Padang.

Adi, Priyo Hari dan David Harianto. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita*. Jurnal SNA X. Makassar.

Adi, Priyo Hari dan Wirawan Setiaji. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa - Bali)*. Jurnal SNA X. Makassar.

Anthony, Robert N, John Dearden, dan Norton M. Bedford. 1993. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi Keenam. Jilid 2. Binarupa Aksara. Jakarta.

Anthony, Robert N, Vijay Govindarajan. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jilid 2. Salemba Empat. Jakarta.

Berti, Emelia. 2006. *Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 di Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Calia, Roland dan Woods Bowman. 1997. *Evaluating Local Government Financial Health*. Chicago.

Dajan, Anto. 1986. *Pengantar Metode Statistik Jilid 1*. LP3ES. Jakarta.

Detisa, Dora. 2009. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Khusus pada Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara Medan.

Eriadi. 2004. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah*

Daerah Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah (Suatu Tinjauan terhadap Perubahan Regulasi Keuangan Daerah). Tesis. Universitas Sumatera Utara Medan.

Fauziana, Ayu. 2009. *Analisis Rasio Keuangan dan Model Z-Score untuk Menilai Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Febriyanti, Dyvita. 2016. *Analisis Rasio Keuangan Guna Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sumatra Periode Anggaran Tahun 2011-2014*. Skripsi. Universitas Andalas.

Hansen, Don R. dan Maryanal M. Mowen. 1997. *Akuntansi Manajemen*. Edisi 4. Jilid 1. Erlangga. Bandung.

Haryanto, Joko Tri. *Potret PAD dan Relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah*.

<http://didicarsidiawan.wordpress.com/2009/04/29/mengungkap-penyebab-lambatnya-penyerapan-anggaran-belanja-pemerintah/>

http://id.wikipedia.org/wiki/AnggaranSektor_Publik#KarakteristikAnggaran_Sektor_Publik

<http://joernalakuntansi.wordpress.com/2009/08/31/kinerja-keuangan-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-pengangguran-dan-kemiskinan-pendekatan-analisis-jalur/>

<http://journal.uui.ac.id/index.php/JAAI/article/viewFile/390/304>

<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8F558006-ECB1-4FFA-989F-53DCD3B5A0FF/11116/Boks3.pdf>

[http://www.docstoc.com/docs/22735011/FLYPAPER-EFFECT-PADA-DANA-ALOKASI-UMUM-\(DAU\)-DAN-PENDAPATAN.](http://www.docstoc.com/docs/22735011/FLYPAPER-EFFECT-PADA-DANA-ALOKASI-UMUM-(DAU)-DAN-PENDAPATAN.)

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE. Yogyakarta.

Kuncoro, Haryo. 2007. *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Jurnal SNA X. Makassar.

Kusumadewi, Diah Ayu dan Arief Rahman. 2007. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.

Maimunah, Mutiara dan Rusdi Akbar. 2008. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mulyana, Budi, Subkhan dan Kuwat Slamet. 2006. *Keuangan Daerah : Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP). Jakarta.

Nordiawan D., Iswahyudi, dan Rahmawati M. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.

Nordiawan D. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.

Nurkhamid, Muh. 2008. *Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.3.

Padovani, Emanuele, Francesca Manes Rossi dan Rebecca Levy Orelli. 2010. *The Use of Financial Indicators to Determine Financial Health of Italian Municipalities*. Toulouse.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2011. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012*. Tulang Bawang.

- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2012. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2013. *Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013 Buku I*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2013. *Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013 Buku II*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2013. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014 Buku I*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2013. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014 Buku II*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2014. *Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014 Buku I*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2014. *Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014 Buku II*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2014. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015 Buku I*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2014. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015 Buku II*. Tulang Bawang.

- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2015. *Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015 Buku I*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2015. *Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015 Buku II*. Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2015. *Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016*. Tulang Bawang.
- Penman, Stephen H. dan Doron Nissim. 1999. *Ratio Analysis and Equity Valuation*.
- Suryanovi, Sri. 2008. *Kajian Standar Akuntansi Pemerintahan, Keharmonisan dan Kejelasan Penerapan Basis Kas Menuju Akrual Berdasarkan Perspektif UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.3.
- Tambun, Keriahen Tarigan. 2005. *Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sektor-Sektor Berpotensi yang Dapat Dikembangkan di Pemerintah Kota Medan*. Tesis. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Tunggal, Amin Widjaya. 1995. *Dasar-dasar Budgeting*. Rineka Cipta. Jakarta.